

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI
INDONESIA PERSPEKTIF *VALUE FOR MONEY* TAHUN ANGGARAN**

2012-2015

SKRIPSI



Oleh :

Nama : April Wulandari
Nomor Mahasiswa : 13313317
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2017

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Perspektif *Value for Money* Tahun Anggaran 2012-2015

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : April Wulandari

Nomor Mahasiswa : 13313317

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2017

Penulis



April Wulandari

PENGESAHAN SKRIPSI

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Perspektif

Value for Money Tahun Anggaran 2012-2015

Nama : April Wulandari
Nomor Mahasiswa : 13313317
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Desember 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY TAHUN ANGGARAN 2012-2015**

Disusun Oleh : **APRIL WULANDARI**

Nomor Mahasiswa : **13313317**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

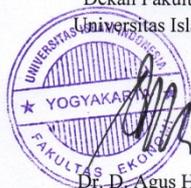
Pada hari Kamis, tanggal: 11 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seraya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dari sanubari yang terdalam, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

*Orang Tua yang terhormat serta almamater tercinta
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta*

MOTTO

**“AKU LEBIH MENGHARGAI ORANG YANG BERADAB
DARIPADA ORANG YANG BERILMU.**

Kalau Hanya Berilmu, Iblispun Lebih Tinggi Ilmunya daripada
Manusia”

(SYEKH ABDUL QADIR AL-JAILANI R.A)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, pelimpah berkah dan karunia. Tiada pantas kupersembahkan kecuali kepada-Mu ya Rabbi. Alaahumma Solli ‘ala Sayyidina Muhammad, shalawat serta salam senantiasa teriringi untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja keuangannya dan dalam mengambil kebijakan. Adapun judul skripsi ini adalah “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Perspektif *Value for Money* Tahun Anggaran 2012-2015”.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada:

1. Dekan FE UII Yogyakarta, Dwipraptono Agus Hardjito, M.Si
2. Dosen Pembimbing, Bapak Mohammad Bektu Hendrie Anto, S.E., M.Sc.
yang sangat saya ta’dzimi dan sangat saya harapkan ridho atas olmunya,
yang senantiasa memberikan bimbingan dan do’a dalam pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Ibuku yang terhormat dan tersayang, H. Soedjono (alm) dan Ibu Messinah, yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik moril maupun materiil serta do'a yang tak pernah lepas, cinta kalian dalam kehidupanku adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan untukku, semoga Allah melindungi kalian dan meridhoi segala perjalanan hidupku.
4. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Nurussalam, yang senantiasa saya ta'dzimi, KH. Fairuzi Afiq Dalhar Munawwir, Alh. dan Ibu Nyai Hj. Siti Mukarromah Mustahal yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan.
6. Saudara saudariku tercinta, yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk bisa berkarya sebaik mungkin dalam skripsi ini.
7. Semua teman di PP Nurussalam Krapyak Yogyakarta yang telah menjadi singgahan setia dan yang telah memberikan bantuan materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 24 Desember 2017

April Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Motto	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Abstrak	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LAANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	21
2.2.1 Teori Kinerja	21

2.2.2	Teori <i>Value for Money</i>	28
2.2.3	Teori <i>Good and Clean Government</i>	35
BAB III Metode Penelitian		42
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Penentuan Sumber Data	44
3.3	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4	Metode Analisis Data	45
3.4.1	Pengukuran Rasio Ekonomis.....	45
3.4.2	Pengukuran Rasio Efisiensi.....	46
3.4.3	Pengukuran Rasio Efektivitas	47
3.5	Tahap-tahap Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		49
4.1 Hasil Perhitungan Pengukuran Rasio Kinerja Keuangan		
Setiap Provinsi		49
4.1.1	Provinsi Aceh	49
4.1.2	Provinsi Sumatera Utara	53
4.1.3	Provinsi Sumatera Barat.....	55
4.1.4	Provinsi Riau	57
4.1.5	Provinsi Jambi	59
4.1.6	Provinsi Sumatera Selatan.....	61
4.1.7	Provinsi Bengkulu	63

4.1.8	Provinsi Lampung	65
4.1.9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67
4.1.10	Provinsi Kepulauan Riau	69
4.1.11	Provinsi DKI Jakarta	71
4.1.12	Provinsi Jawa Barat	74
4.1.13	Provinsi Jawa Tengah.....	75
4.1.14	Provinsi DIY	78
4.1.15	Provinsi Jawa Timur.....	80
4.1.16	Provinsi Banten	82
4.1.17	Provinsi Bali	84
4.1.18	Provinsi NTB.....	86
4.1.19	Provinsi NTT	89
4.1.20	Provinsi Kalimantan Barat	91
4.1.21	Provinsi Kalimantan Tengah	93
4.1.22	Provinsi Kalimantan Selatan	96
4.1.23	Provinsi Kalimantan Timur	98
4.1.24	Provinsi Kalimantan Utara	101
4.1.25	Provinsi Sulawesi Utara	103
4.1.26	Provinsi Sulawesi Tengah	105
4.1.27	Provinsi Sulawesi Selatan.....	108
4.1.28	Provinsi Sulawesi Tenggara	110
4.1.29	Provinsi Gorontalo.....	112
4.1.30	Provinsi Sulawesi Barat.....	114

4.1.31 Provinsi Maluku	117
4.1.32 Provinsi Maluku Utara	119
4.1.33 Provinsi Papua	121
4.1.34 Provinsi Papua Barat	123
4.2 Pembahasan	125
4.2.1 Rasio Ekonomis	127
4.2.2 Rasio Efisiensi	129
4.2.3 Rasio Efektivitas	131
4.3 Klasifikasi Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pada Setiap Pulau	136
BAB V Kesimpulan dan Implikasi	137
5.1 Kesimpulan	137
5.2 Implikasi	138
Daftar Pustaka	140
Lampiran.....	147

Daftar Tabel

2.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	32
2.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	34
4.1 Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2012-2015	125
4.2 Perbandingan Rata-rata Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Berdasarkan Pulau	133

HALAMAN ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia menggunakan metode *Value for Money* dari tahun 2012 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa APBD atau LRA 34 dari provinsi. Kemudian untuk mengetahui perbandingan kinerja, data dihitung dengan menggunakan perhitungan *Value for Money* yang terdiri dari tiga elemen, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta dibandingkan dengan statistik diskriptif, termasuk di dalamnya standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui fluktuasi kinerja keuangan provinsi selama lima tahun anggaran dan ketimpangan kinerja keuangan setiap provinsi terhadap rata-rata kinerja keuangan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang paling ekonomis adalah pemerintah Provinsi Riau dengan rasio ekonomis sebesar 73,88%. Kinerja keuangan yang paling efisien adalah pemerintah Provinsi Banten dengan rasio efisien sebesar 88,80%. Sementara kinerja keuangan yang paling efektif adalah pemerintah Provinsi Papua Barat dengan rasio efektivitas sebesar 108,48%. Ditinjau secara keseluruhan, efisiensi dan ekonomis kinerja keuangan berada di pulau jawa, dan untuk efektivitas kinerja keuangan pulau Papua, yang terdiri dari pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat dengan rata-rata rasio sebesar 104,16%.

Kata Kunci: Kinerja, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, *Value for Money*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan dan terdiri dari ribuan pulau atau kurang lebih mencapai 17.508 pulau tersebar di berbagai wilayah provinsi di Indonesia sehingga Indonesia sering disebut juga dengan sebutan negara kepulauan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Negara Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan beragam tradisi, budaya, dan juga memiliki sumber daya yang berbeda-beda, baik itu dari segi alam maupun personalia, yang dalam pengelolaannya diatur sendiri oleh masing-masing pemerintah provinsi. Contoh sumber daya alam yang kemudian dikombinasikan dengan sumber daya personalia di bawah manajemen pemerintah adalah sektor pariwisata. Banyak sumber daya yang dimiliki daerah, yang nantinya dapat dijadikan sebagai lumbung pendapatan asli daerah.

Pada awal kemerdekaan RI, jumlah provinsi hanya 8. Hingga saat ini berjumlah 34 provinsi berarti bertambah 34 dalam kurun waktu 72 tahun. Pemekaran provinsi dilakukan 9 kali. Pemekaran pertama dilakukan pada tahun 1950 di bawah pemerintahan Ir. Soekarno menjadi 11 provinsi, berikutnya tahun 1956 menjadi 13 provinsi. Tahun 1967 dilakukan pemekaran kembali dengan

jumlah provinsi mencapai 25. Pada masa pemerintahan Soeharto, kembali dilakukan pemekaran, yaitu pada tahun 1968, sehingga bertambah menjadi 26 provinsi. Selanjutnya pada tahun 1976 dilakukan pemekaran yang terakhir untuk masa pemerintahan Soeharto dan jumlah provinsi menjadi 27. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sampai dengan Megawati telah dilakukan beberapa kali pemekaran yang pada akhirnya jumlah provinsi menjadi 33. Pemekaran terakhir dilakukan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kalimantan Timur dipecah menjadi provinsi Kalimantan Utara dan menjadi provinsi ke 34 sampai saat ini (Tuliat, 2017). Saat ini setiap pemerintah daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya, termasuk dalam hal keuangan.

Berbicara mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD), kita selalu tertuju langsung pada otonomi daerah. Salah satu peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah UU nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, juga termasuk di dalamnya mengenai otonomi daerah. Secara umum yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri segala sumber daya yang dimiliki, urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam BAB I pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi, yang berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal. Melalui dua hal tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat pemeratakan hasil pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah. Di Indonesia otonomi daerah sudah berjalan lebih dari 16 tahun, namun berbagai tujuan otonomi daerah belum tercapai secara optimal (Badrudin, 2017).

Karakteristik utama dari suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu: pertama, kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan (misalnya dengan cara pemberdayaan pariwisata, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi), mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Kedua, meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat agar nantinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

menjadi komponen yang terbesar dalam sumber keuangan daerah (Punamasari dkk, 2014).

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang diiringi dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat, secara tidak langsung akan memberi kontribusi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah.

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. *Good Governance* merupakan citra penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, baik dan transparan.

Kemampuan untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan, baik secara nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, pemerintah yang ekonomis dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dilakukan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta mengikuti tuntutan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan pandangan dan metode kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

Lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas di semua sektor. Sebagai organisasi nirlaba, jelas pemerintah mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan kualitas layanan tersebut di masa yang akan datang bagi masyarakatnya. Berbeda dengan sektor swasta, dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga pemerintah tidak hanya memperhatikan output saja, melainkan juga memperhatikan proses yang ditempuh dan dampak yang berkelanjutan (*multiplier effect*).

Pemerintah di tingkat daerah memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, tentunya dalam hal kualitas jasa yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Adanya globalisasi dan perubahan lingkungan yang terus menerus berlangsung sangat cepat, mengharuskan setiap organisasi dapat beradaptasi secara tepat dan cepat dengan menerapkan berbagai metode pengelolaan organisasi. Organisasi dikatakan baik dalam pengelolaannya, dapat dilihat dari bagaimana kinerjanya. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pemeritahan, artinya kebutuhan masyarakat harus bisa terlayani dengan baik dengan tetap memperhatikan dan menjalankan proses secara benar.

Pengukuran kinerja suatu organisasi adalah faktor penting, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan sumber-sumber ekonomis sangatlah erat kaitannya dengan finansial atau pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Kinerja pengelolaan keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik, termasuk pada pemerintah daerah. Kinerja pemerintah dalam hal keuangan dapat menggambarkan bagaimana kondisi dan kinerja pemerintah, apakah termasuk dalam kategori *good and clean government* atau tidak. Diharapkan dengan adanya tuntutan tersebut, dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan dapat mendeteksi serta mengidentifikasi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Misalnya, terdapat dua program atau lebih yang saling tumpang tindih yang pada akhirnya akan menghabiskan-habiskan dana.

Asian Development Bank (ADB) dalam sebuah seminar di Fukuoka Jepang pada tanggal 10 Mei 1997 memberikan kesimpulan bahwa pemerintahan yang

baik dan bersih (*good and clean government*) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Empat elemen penting pemerintahan yang baik dan bersih yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), prediktabilitas atau kemampuan meramalkan masa depan (*predictability*), dan partisipasi (*participation*). Sehingga *good governance* pada pemerintah daerah berarti mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek politik, aspek ekonomi dan aspek administratif yang berimplikasi pada pemerataan, penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan (ADB dalam Isra, 2010).

Ukuran kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui dengan menggunakan beberapa metode, antara lain menggunakan metode *Balance Scorecard* dan metode *Value for Money*. Sipayung (2009) mengemukakan *Balance Scorecard* adalah suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan yang meliputi: perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata (Nugrahayu, 2015). Sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Harvey dan Green dalam Putra, 2012)

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis (penghematan) berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien (berdaya guna) berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektivitas (berhasil guna) berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah bahkan masyarakat tidak hanya dapat mengukur besarnya biaya barang dan jasa, tetapi dengan menggunakan *value for money* pemerintah juga dapat memperhitungkan kualitas penggunaan sumber daya, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk dapat menilai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program.

Kebutuhan terhadap pengetahuan tentang pengukuran kinerja sangat terasa pada saat sebuah organisasi sektor publik untuk menerapkan *good governance*. Apalagi dengan adanya tuntutan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan nasional maupun daerah, maka pengukuran kinerja pemerintah juga dapat menggambarkan akuntabilitas pemerintah (Mardiasmo dalam Mahsun, 2013: v).

Berdasarkan hasil evaluasi, yang dilakukan oleh BPKP dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59,21 pada tahun 2014 menjadi 60,47 pada tahun 2015. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2015).

Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil, orientasi penyelenggaraan pembangunan yang memfokuskan pada upaya memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah provinsi di Negara Indonesia selama ini belum melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money*. Pengukuran kinerja ini lebih menitikberatkan dalam hal keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan dengan adanya pengukuran kinerja dengan metode ini, masyarakat secara luas akan lebih mengetahui dan

dapat menilai secara fokus tentang bagaimana pemerintah daerah provinsi dalam memajemen atau mengelola APBD untuk merealisasikan kebijakan berdasarkan pada sasaran yang telah ditentukan, apakah terjadi pemborosan atau tidak, bagaimana hasilnya dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan sasaran awal atau tidak, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Perspektif *Value For Money* Tahun Anggaran 2012-2015”.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia perspektif *Value For Money* tahun anggaran 2012-2015.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta dapat bermanfaat oleh berbagai kalangan, seperti:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam mengukur kinerja pemerintah daerah provinsi dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2012-2015 dengan menggunakan metode yang berbeda dari sebelumnya, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan serta mengukur kinerja untuk tahun yang berikutnya.

2. Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti:

- a. Lembaga Pendidikan UII Yogyakarta, yakni sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan UII Yogyakarta.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat membantu dalam proses penelitian berikutnya dalam mengungkap berbagai hal yang belum terjawab dalam *government studies*.
- c. Bagi lembaga pemerintah, berbagai bentuk studi lanjutan dari data ini akan memberikan imbas positif bagi arah pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian dapat dimanfaatkan sebagai penyedia informasi mengenai kinerja dan praktik yang dilakukan pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam mengelola keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 KAJIAN PUSTAKA

1. Menurut I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, dan Wayan Cipta (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. Studi penelitian tersebut dilakukan di kabupaten Buleleng, Bali dengan hasil penelitian bahwa secara umum kinerja Dinas Pendapatan Daerah tahun 2007-2011 cukup baik karena telah memenuhi kriteria pengukuran. Akan tetapi, jika dilihat dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomis berada pada kriteria sangat ekonomis (di atas 100%) yaitu 124,85%. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang ditetapkan (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien yaitu 86,86%, (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan. Prosentase efektivitas tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD dapat melampaui target. Rasio efektivitas yang dicapai sebesar 136,45%. Ini menandakan bahwa kinerja Dispenda terus meningkat karena para aparturnya telah berusaha semaksimal mungkin di dalam meningkatkan PAD baik melalui pajak maupun retribusi.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry Saputra Liando, Davi Paul Elia dan Inggriani Elim (2014) tentang pengukuran kinerja pemerintah menggunakan metode *Value For Money* dengan studi kasus Pemkab Sangihe menunjukkan bahwa hasil tahun 2012 dan Realisasi Anggaran Belanja menunjukkan kenaikan, artinya realisasi belanja lebih besar dari total realisasi penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 di mana Realisasi Anggaran Penerimaan/Pendapatan dan realisasi anggaran belanja menunjukkan terjadi penurunan. Hasil analisa ekonomis berdasarkan data laporan keuangan dari jumlah realisasi belanja menunjukkan bahwa komponen belanja operasional masih didominasi oleh belanja pegawai. Karena itu optimalisasi pengelolaan anggaran yang berpihak kepada pelayanan publik sangatlah penting. Dari segi efisiensi harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Sedangkan dari segi efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi anggaran secara nominal, tahun 2012 lebih kecil dari tahun 2013, artinya bahwa pengelolaan anggaran ditahun 2013 lebih efektif dibanding dengan tahun 2012.
3. Menurut Fatmasari Sukesti dan Alfasanudin dalam jurnalnya yang berjudul “*Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan Good Governance*” menyebutkan bahwa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat daerah tersebut. Terlebih untuk menggambarkan kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, baik menggunakan metode *Balance Score Card*, *VFM (Value for Money)*, atau metode yang lainnya. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, pengelolaan keuangan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat melakukan efisiensi anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Kemudian, apabila dilihat dari sisi pelaporan realisasi anggaran, pihak-pihak pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus menyajikan laporan secara detail artinya semakin rinci informasi tersebut maka akan semakin menjamin adanya transparansi. Diharapkan penyimpangan akan penggunaan anggaran, seperti kebocoran dana dan pemborosan dana dapat dikurangi secara optimal. Karena dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui dan mengukur secara langsung kinerja pemerintah dalam hal keuangan.

4. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh”, menyimpulkan bahwa pemerintah yang baik atau *Good Governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas

dan membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya termasuk di dalamnya adalah keuangan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang biasa dikenal dengan APBD atau LRA juga dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah. Misalnya, akan diketahui berapa prosentase tingkat keefektivan dan keefisienan dalam memanfaatkan keuangan negara. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit terdapat permasalahan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah masih terdapat penyimpangan penggunaan keuangan negara yaitu KKN. Permasalahan yang lain yaitu terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari perangkat kerja. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara simultan penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Pada SKPD di Kota Banda Aceh, penerapan *good governance* telah dilakukan dengan baik yang meliputi transparansi informasi keuangan dan non keuangan, partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan dan pelayanan kepada media pers serta telah melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik.

5. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda” oleh Ayu Amrina Rosyada menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu adanya beberapa substansi yang mendukung, antara lain transparansi. Segala aspek yang bersangkutan dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik seperti sumber dan besarnya penggunaan dana atau biaya, persyaratan, cara pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka agar diketahui dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Berkaitan dengan keuangan, maka harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk menghindari adanya kebocoran dan penyelewengan penggunaan dana. Yang kedua adalah akuntabilitas. Aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidang tugasnya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output*. Kedua hal tersebut dapat diukur dari waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan suatu bentuk pelayanan. Efisien menggambarkan penggunaan suatu sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan *output* yang maksimal, sedangkan efektif menggambarkan tingkat pencapaian suatu pelayanan publik yang berdasarkan pada sasaran awal. Prinsip ini, dalam pelayanan publik di

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah diterapkan dengan baik, yaitu dibuktikannya dengan penerapan beberapa kebijakan yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat. Kecepatan waktu dan kesederhanaan prosedur membuat masyarakat dapat lebih menghemat waktu, biaya serta tenaga dalam proses pengurusan dokumen. Suatu badan ataupun suatu Pemerintah Daerah yang mengutamakan ketiga substansi tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas maka tidak menutup kemungkinan akan mendapat kepercayaan publik.

6. Merujuk pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Idhar Yahya dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” menyimpulkan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mengetahui setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bukan hanya sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan, namun juga lebih rinci pada biaya yang digunakan. Dengan adanya transparansi tersebut maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Gerakan pada era reformasi saat ini mengedepankan beberapa tuntutan penting antara lain mendesak pemerintah meningkatkan kinerja, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan pelaksanaan praktik pemerintah yang *good governance* dan *clean government*. *Good governance* mengandung dua pengertian yaitu nilai-nilai yang menjunjung

tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sedangkan *Clean Governance* memiliki makna pemerintah yang bebas dari penyelewengan penggunaan dana dan tidak ada kebocoran dana. Dalam mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini pencapaian kinerja pemerintah biasanya dikaitkan dengan konsep 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) atau *Value for Money*. Kemudian, kaitannya dengan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah mengeluarkan atau menyampaikan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran.

7. Menurut Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value for Money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”, *Value For Money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep *Value for Money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *Value for Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah pada tahun 2010 sampai dengan 2013,

analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102,27% berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Analisis rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107,69% berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien VFM dan menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72,05% berada di bawah 100%, sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi. Dengan demikian instansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja negara, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan *output* yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Kinerja

a. Definisi Kinerja

Menurut Mahsun dalam Hidayat (2006) yang dimaksud dengan kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja sangat erat kaitannya dengan prestasi, tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat diketahui dari seberapa jauh pencapaian sasaran dan target awal.

Sementara pengertian kinerja (*performance*) menurut *Oxford Dictionary* adalah penggambaran dari baik buruknya seorang dalam melaksanakan kewajiban atau tugasnya. Menurut Helfert, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki (Aji, 2011: 241)

Dessler menyatakan bahwa kinerja merupakan perihal yang sama dengan prestasi kerja. Di mana prestasi kerja merupakan perbandingan antara realisasi hasil kerja dengan standar kerja yang

ditetapkan, jadi dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerjanya (Dessler dalam Afiati, 2011: 21).

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) menurut Robertson, 2002 (dalam Mahsun, 2006: 25) adalah proses evaluasi terhadap kinerja pekerja atas tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya (*input*) dalam menghasilkan barang dan jasa (*output*), kualitas barang dan jasa yang dinikmati pelanggan (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dari suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan (Hidayat, 2015: 3).

b. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja (Mahsun, 2013: 26)

a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi

Penetapan ketiga hal tersebut harus berpedoman pada visi dan misi organisasi. Tujuan adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh organisasi tapi belum secara khusus dan bersifat implisit. Sedangkan sasaran adalah tujuan dari organisasi yang ditetapkan lebih jelas dan secara eksplisit, biasanya diwujudkan secara kuantitatif. Sementara strategi merupakan metode yang diterapkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Indikator kinerja lebih menekankan pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu perihal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Sedangkan ukuran kinerja menekankan pada penilaian kinerja secara langsung.

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi

Pengukuran tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi adalah dengan cara membandingkan realisasi hasil dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis tersebut kemudian akan diketahui adanya penyimpangan, baik itu penyimpangan positif (hasil telah melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan), penyimpangan negatif (hasil belum melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan), maupun penyimpangan nol (hasil berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan).

d. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja menggambarkan informasi mengenai bagaimana nilai kinerja yang telah berhasil dicapai organisasi

c. Aspek-aspek atau Jenis Indikator Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Mahsun, 2013: 32)

a. *Input* (sumber daya)

Segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan output. Sumber daya di

sini dapat berupa anggaran atau dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan, perlengkapan atau material lain yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan.

b. Proses

Hal ini berkaitan dengan ukuran dalam melaksanakan kegiatan seperti kecepatan, ketepatan, dan tingkat akurasi. Ukuran yang paling spesifik dari proses adalah ekonomis dan efisiensi. Efisiensi mencerminkan besarnya hasil yang didapat dengan memanfaatkan *input* yang serendah-rendahnya. Sedang ekonomis mencerminkan kehematan realitas dana dibandingkan dengan anggaran yang ditentukan.

c. *Output* (keluaran)

Segala sesuatu yang dihasilkan dari proses kegiatan dengan menggunakan input baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*)

d. *Outcome* (hasil)

Segala sesuatu yang menggambarkan berfungsi atau tidaknya keluaran yang dihasilkan kepada *stakeholder*

e. *Benefit* (manfaat)

Hal ini erat kaitannya dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

f. *Impact* (dampak)

Pengaruh yang timbul dari adanya hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, baik positif maupun negatif.

**d. Pendekatan Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
(Mahsun, 2013: 131-132)**

1. Analisis anggaran

Perspektif pengukuran kinerja pemerintah dengan cara membandingkan anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya. Dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu selisih lebih atau selisih kurang. Selisih lebih (*favourable variance*) terjadi jika realisasi penggunaan dana melebihi anggarannya. Sebaliknya, selisih kurang (*unfavourable variance*) terjadi jika realisasi penggunaan dana kurang dari anggarannya.

2. Analisis rasio laporan keuangan

Pengukuran kinerja organisasi pemerintah yang berdasarkan pada perspektif analisis laporan keuangan dapat berupa rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan pasar. Rasio likuiditas mencerminkan bagaimana kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio aktivitas mencerminkan sejauh mana efektivitas organisasi dalam memanfaatkan asset. Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio pasar digunakan untuk melihat posisi

organisasi yang bersangkutan, biasanya data yang dirujuk adalah neraca.

3. *Balance Scorecard Method (BSC)*

Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*). *Balanced scorecard* merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk organisasi pemerintah, berfokus pada strategi, karena penerapan *balanced scorecard* memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanaan strategi organisasi (Darwanto, 2009).

4. *Performace Audit (Value for Money)*

Pengukuran kinerja pemerintah dengan metode ini menekankan pada tiga substansi, yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomis menggambarkan seberapa hemat dalam penggunaan dana. Efisiensi menggambarkan seberapa benar cara yang digunakan untuk membandingkan input dengan output. Efektivitas menggambarkan seberapa tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. **Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik (BPKP, 2000 dalam Mahsun, 2013: 3)**

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, dengan tujuan agar para pelaksana dapat berpedoman pada indikator dan ukuran kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan pemerintah.
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja agar sesegera mungkin kesalahan dapat terdeteksi dan teridentifikasi serta menetapkan solusi penyelesaian masalah dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
- c. Memberikan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) yang obyektif sesuai dengan prestasi pelaksana
- d. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi dan dasar dalam penentuan strategi organisasi untuk masa yang mendatang
- e. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Hal ini merupakan hal yang paling pokok karena tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dilakukan secara obyektif sesuai dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat

- g. Mengungkapkan kesalahan yang terjadi. Permasalahan yang ditemukan dalam proses pengawasan kinerja, kemudian diumumkan kepada para pekerja agar mereka dapat memperbaiki kualitas kinerjanya. Selain dari itu dapat pula diperlihatkan kepada para staf atau *stakeholder*, untuk segera disusun program-program baru atau alat untuk menyelesaikannya (Mangkunegara, 2005 dalam Al-Maqassary, 2013)
- h. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan (Afiati, 2011: 22)

2.2.2 Teori *Value for Money*

a. Definisi *Value for Money*

Erlendsson (2002) menggambarkan nilai untuk uang (*Value for Money*) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah keseluruhan itu merupakan nilai yang baik (Purnamasari, dkk. 2014).

Selain dari pada itu, definisi lain dari *Value for Money* adalah penghargaan terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Pada dasarnya kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari hasil atau *output* namun juga harus diperhatikan elemen yang lain yaitu *input* atau sumber daya yang digunakan, dan *outcome* atau dampak secara bersama-sama (Mahmudi dalam Liando dkk, 2014: 1688)

Barnett (dalam Purnamasari, dkk. 2014) menyatakan bahwa, *Value for Money Audit* adalah tolok ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) yang meliputi tiga elemen penting yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi, baik swasta maupun publik dengan berdasarkan tiga substansi penting, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan penghematan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan daya guna dan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Elemen-elemen *Value for Money*

a. Ekonomi

Konsep ekonomi erat kaitannya dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi adalah seluruh sumber daya *input* diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati pasar (Afiati, 2011: 24). Pengertian ekonomi yang biasa dikenal dengan istilah tepet guna atau penghematan adalah mengelola keuangan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi pemborosan dana (pengeluaran biaya yang tidak produktif) dan kebocoran dana.

Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan realisasi penggunaan sumber daya melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya *input* tidak terjadi pemborosan. Kriteria Ekonomi adalah (Mahsun, 2013: 188)

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomi berimbang
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.
- b. Efisiensi

Efisiensi (daya guna) memiliki maksud yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output*

yang dihasilkan terhadap *input* atau sumber daya yang digunakan. Jadi konsep efisiensi dalam pengelolaan suatu organisasi adalah penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya untuk mencapai hasil yang maksimal (*spending well*) (Mahsun, 2013: 182).

Efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan atau rasio antara input dengan input. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam memperbaiki efisiensi, yaitu sebagai berikut (Mahsun, 2013: 183):

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama. Misalnya dapat dilakukan dengan cara perbaikan kualitas pelayanan baik dari segi kenyamanan, perolehan informasi oleh masyarakat dan sikap pemerintah atau pegawai terhadap konsumen.
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*. Maksudnya yaitu penambahan hasil dilakukan lebih banyak dibandingkan dengan penambahan sumber daya yang digunakan
- c. Menurunkan *input* pada tingkat yang sama
- d. Menurunkan *input* pada proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

Dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money*, efisiensi dapat digolongkan menjadi dua yaitu (1) efisiensi alokasi, yang terkait dengan kemampuan untuk mendayakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. (2) efisiensi teknis atau manajerial, yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan *input* pada tingkat *output* tertentu.

Berikut merupakan kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 :

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja	Kriteria
Lebih dari 100% (> 100%)	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60% (< 60%)	Sangat Efisien

c. Efektivitas

Mengukur tingkat output dari pemerintah sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik (Ferina, 2013:

36)

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya organisasi dalam menapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi efektivitas hanya melihat apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2013: 183).

Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. Perbedaan antara *outcome* dan *output* adalah bahwa *outcome* merupakan dampak yang dirasakan masyarakat atas program atau kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program atau kebijakan.

Selain dari pada itu, Halim (2007: 234 dalam Purnamasari: 2014) menyatakan “rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan”.

Berikut merupakan kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 :

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja	Kriteria
Lebih dari 100% (> 100%)	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60% (< 60%)	Tidak Efektif

d. Manfaat Implementasi *Value for Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Berikut merupakan manfaat *Value for Money* (Halim, 2002: 14):

- a. Efektivitas pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak serta merta hanya sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, namun juga harus memperhatikan kualitas, manfaat dan dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat.

- c. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- d. Alokasi biaya yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Program-program yang dinilai tidak ekonomis sebaiknya untuk tidak direalisasikan. Sehingga dana dapat dialokasikan pada program yang dinilai lebih penting untuk diterapkan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akunabilitas publik. Maksud dari *cost awareness* adalah pemangku kebijakan sadar akan uang publik.

2.2.3 Teori *Good and Clean Government*

a. Konsep *Good and Clean Government*

Dalam teori, organisasi publik dalam menjalankan pemerintahannya berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu, masyarakat atau warga merupakan “bos” yang harus dilayani dengan kualitas yang baik. Pemerintah yang demikian akan dapat mengenali

apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang akan dilayaninya. Namun dalam realitas kehidupan, kinerja pemimpin di negeri ini jauh dari teori. Para pejabatlah yang menjadi “bos”.

Tidak hanya dilirik dengan mata fasilitator terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat saja, kinerja pemerintah juga harus dilirik dengan mata ekonomi keuangan. Pencitraan *good governance* akan mencerminkan transparansi atau keterbukaan kepada rakyat mengenai bagaimana pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan. Sehingga kecil kemungkinan terjadi penyelewengan dan kebocoran dana. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan tercipta pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Asian Development Bank (ADB) dalam sebuah seminar di Fukuoka, Jepang pada tanggal 10 Mei 1997 memberikan kesimpulan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada dasarnya *good governance* pada pemerintah daerah berarti mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan

aspek politik, aspek ekonomi dan aspek administratif yang berimplikasi pada pemerataan, penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan (ADB dalam Isra, 2010).

Good Governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik memiliki korelasi yang erat dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Bappenas, 2008 dalam Winarno dan Sari, 2012 hal: 2).

Pemerintahan yang bersih adalah Pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, dan bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak melakukan praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), bisa bertindak obyektif, netral dan tidak diskriminatif (Bappenas, 2008 dalam Sari dan Winarni, 2012: 5).

Penerapan prinsip *Good and Clean Governance* adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan aparatur pemerintah lainnya dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui rumusannya yaitu melalui prinsip-prinsip ekonomis, efektif dan efisiensi, transparansi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap dan akuntabilitas. Secara keseluruhan pemerintah dapat

bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru serta responsive terhadap kepentingan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik seperti yang diharapkan. (Rosyada, 2016: 165).

Secara konseptual, pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman, yaitu:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Departemen Agama RI, 2007: 25-26)

Definisi lain dikemukakan oleh *Indonesia Governance Index* (IGI) yang mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi (merumuskan) dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis) (Yarni dan Amir, 2014: 123).

- b. **Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*)**

UNDP mengemukakan ada beberapa karakteristik prinsip-prinsip dari *Good Governance* yang saling terkait. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Departemen Agama RI 2007: 27-28):

- a. Partisipasi (*Participation*). Masyarakat diberi kesempatan dan hak yang luas dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Taat hukum (*Rule of Law*). Hukum keadilan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih harus secara merata, tidak pandang bulu.
- c. Transparansi (*Transparency*). Masyarakat berhak mengetahui segala informasi, baik keuangan, kinerja, akuntabilitas, dengan tujuan agar mudah untuk mereka pahami dan dimonitori.
- d. Responsif (*Responsiveness*). Instansi pemerintah melayani setiap *stakeholdernya* dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Aparatur pemerintah harus menghayati bahwasannya esensi dari administrasi publik adalah untuk melayani publik dengan kualitas yang baik, bukan dilayani oleh publik. Kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas, dan mengembangkannya ke dalam program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- e. Orientasi kepada kesepakatan (*Consensus Orientation*). Menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama.

- f. Kesetaraan (*Equity*). Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan.
- g. Efektif dan Efisien (*Efektiveness and Efficiency*). Proses pelaksanaan program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud dan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*). Mempertanggungjawabkan dan mampu menerangkan kinerja pemerintah atau pemangku kebijakan mengenai keberhasilan atau kegagalan kepada publik dan lembaga *stakeholders*.
- i. Visi Strategik (*Strategik Vision*). Pemimpin dan publik memiliki pandangan *Good Governance* yang luas dan memiliki pandangan jauh ke depan yang diperlukan untuk pembangunan.

c. Manfaat *Good and Clean Governance*

Manfaat yang diperoleh dari *Good Governance* menurut Bappenas (2008) adalah:

- a. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- c. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.

- d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah (Sari dan Winarno, 2012: 6)

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam sebuah laporan penelitian, pemaparan mengenai metode yang digunakan merupakan perihal yang sangat penting. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian terapan, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang nantinya dapat diinformasikan kepada masyarakat luas.

Sementara menurut Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan penelitian itu dilakukan dengan dasar ciri-ciri keilmuan, rasional (dapat diterima secara akal), sistematis (berurutan dan logis), dan empiris atau nyata (dapat dijangkau oleh panca indera).

Metode penelitian adalah cara kerja, teknik dan metode yang tepat yang digunakan untuk memecahkan persoalan yang muncul dari judul “Bagaimana Perbandingan Kinerja Pemerintah Provinsi di Negara Indonesia Perspektif *Value For Money* tahun 2011-2015 untuk Mewujudkan *Good and Clean Government*”.

Adapun metode yang penulis gunakan sebagai acuan untuk memecahkan persoalan dan menentukan tahapan-tahapan dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif (*quantitative research*). Penelitian kuantitatif di sini bertujuan untuk mengetahui besarnya prosentase kinerja pemerintah daerah provinsi dengan metode *Value for Money*. Data yang digunakan berupa data kuantitatif, adalah data-data yang berupa angka atau bilangan, seperti laporan daerah atau Laporan Realisasi Anggaran atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam proses penelitian, penulis menggali informasi yang bersumber dari media internet yang berkenaan dengan realisasi anggaran 34 pemerintah provinsi yang terdapat di Indonesia selama lima tahun anggaran. Penulis juga menggali informasi mengenai contoh penilaian kinerja 34 pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dari data LRA yang telah diperoleh, kemudian diolah dengan cara melakukan perhitungan untuk mengetahui bagaimana kinerja tiap-tiap pemerintah provinsi dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, beserta diagram perkembangannya selama lima tahun. Hasil perhitungan, selanjutnya dilakukan perbandingan menggunakan statistik deskriptif, yaitu *mean* atau rata-rata, modus dan standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan

rata-rata dari penyimbangan nilai sebuah data dengan nilai rata-rata yang mencerminkan pemerataan.

3.2. Penentuan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data ini dapat berupa bukti catatan yang telah tersusun dalam dokumen, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat juga bersumber dari penelusuran buku, surat kabar, jurnal, internet dan bukti catatan lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dapat membantu menyelesaikan pemecahan masalah dan mendukung kebenaran dalam skripsi ini. Sangat disadari bahwa ketersediaan data tentang kinerja pemerintah provinsi di Negara Indonesia dan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money* sangat terbatas, sehingga berbagai kajian ataupun bentuk penelitian lain yang berusaha mengeksplorasi karakteristik hal tersebut menjadi bahan rujukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Arfan, 2014). Informasi yang diperoleh dari metode ini adalah

data mengenai laporan realisasi anggaran (APBD) tahun 2012-2015 setiap provinsi di Indonesia.

3.4 Metode Analisis Data

Pada dasarnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Penelitian ini akan mengukur kinerja pemerintah daerah provinsi dan nantinya akan dibandingkan dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016: 208). Setelah diketahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitasnya, kemudian digambarkan dalam bentuk grafik dan juga dilakukan analisis data dengan statistik deskriptif dengan cara pengukuran nilai tertinggi (*max*), nilai terendah (*min*), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Pengukuran kinerja dalam hal ini menggunakan tiga elemen yang diteliti. Berikut ini penjelasan teknik analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen (Mardiasmo dalam Afiati, 2011: 33)

3.4.1 Pengukuran Rasio Ekonomis

Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Di mana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan (Mahsun, 2013: 188). Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan

dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengeluaran dan penerimaan. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{(Realisasi Anggaran : Anggaran Pengeluaran) x 100\%}$$

Kriteria Ekonomi adalah

- d. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti ekonomis
- e. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti ekonomis berimbang
- f. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak ekonomis.

3.4.2 Pengukuran Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja (Mahsun, 2013: 189). Berikut formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{(Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan : Realisasi Pendapatan) x 100\%}$$

Kriteria Efisiensi adalah:

- a. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisien

- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisiensi seimbang
- c. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efisien.

3.4.3 Tingkat Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Berikut formula yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{(Realisasi Pendapatan : Anggaran Pendapatan) x 100\%}$$

Kriteria Efektivitas adalah:

- a. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbangan
- c. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif

Semua provinsi yang telah diketahui kinerja keuangannya berdasarkan 3 elemen di atas, kemudian direkapitulasi guna untuk mengetahui perbandingan kinerja per provinsi selama empat tahun anggaran. Selanjutnya untuk lebih mengetahui secara spesifik per pulau, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data hasil perhitungan dengan dikelompokkan berdasarkan pulau di mana provinsi tersebut berada.

3.5 Tahap-tahap Penelitian

- a. Tahap Persiapan

Tahapan ini penulis lakukan dengan menggunakan referensi yang terkait dengan penelitian dan melakukan studi awal mengenai permasalahan dalam objek penelitian. Dalam hal ini pula, dilakukan penyusunan proposal sampai akhirnya mendapat persetujuan dosen pembimbing.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data, yaitu dengan mengakses Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau APBD pada website resmi yang terkait pada masing-masing pemerintah daerah provinsi selama lima tahun.

c. Tahap Analisis Data

Tahapan ini penulis menyusun data yang telah terkumpul dan dianalisis menggunakan perhitungan tiga elemen ukuran kinerja serta dibandingkan dengan menggunakan statistik deskriptif. Sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pihak lain secara jelas.

d. Tahap Pelaporan

Laporan dari penelitian yang telah dilakukan disampaikan secara tertulis, yaitu dalam bentuk skripsi.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perhitungan Pengukuran Kinerja Keuangan Setiap Provinsi

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan program kerja dalam bidang keuangan yang diukur berdasarkan tiga elemen, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam kurun waktu tahun anggaran 2012 sampai 2015. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.1 Provinsi Aceh

Perhitungan di bawah ini merupakan contoh perhitungan untuk menentukan rasio kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu tahun anggaran 2012:

a. Pengukuran Tingkat Ekonomis

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= (\text{Realisasi pengeluaran} : \text{Anggaran pengeluaran}) \times 100\% \\ &= (22.072.979.280.603,50 : 24.128.719.266.139,50) \times 100\% \\ &= 91,48 \% \text{ (ekonomis)}\end{aligned}$$

b. Pengukuran Tingkat Efisiensi

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= (\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan} : \text{Realisasi} \\ &\quad \text{Pendapatan}) \times 100\%\end{aligned}$$

$$= (22.072.979.280.603,50 : 22.935.543.518.387) \times 100\%$$

$$= 96,24 \% \text{ (kurang efisien)}$$

c. Pengukuran Tingkat Efektivitas

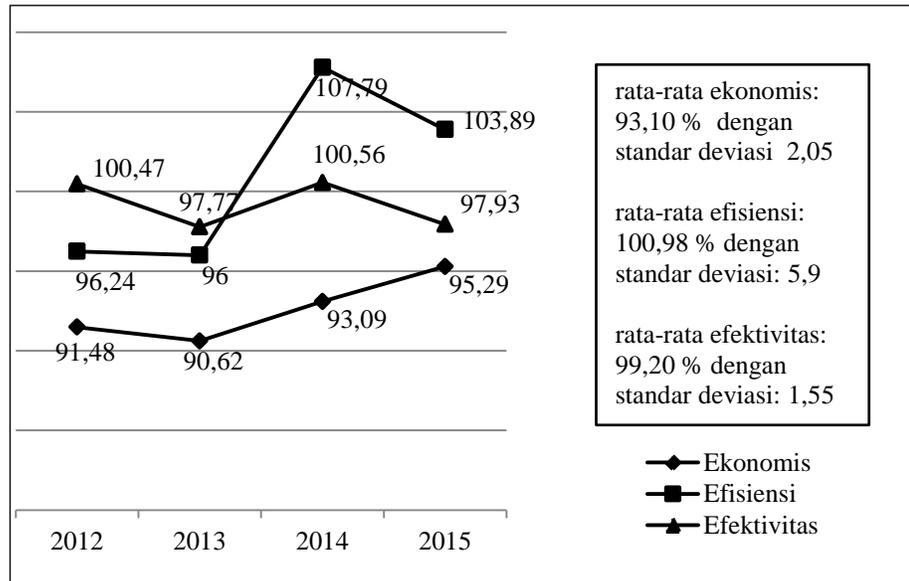
$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Pendapatan} : \text{Anggaran Pendapatan}) \times 100\%$$

$$= (22.935.543.518.387 : 22.828.126.702.750,80) \times 100\%$$

$$= 100,47 \% \text{ (sangat efektif)}$$

Untuk mengetahui perkembangan dan besarnya rasio kinerja keuangan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 akan disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 4.1
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Aceh (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



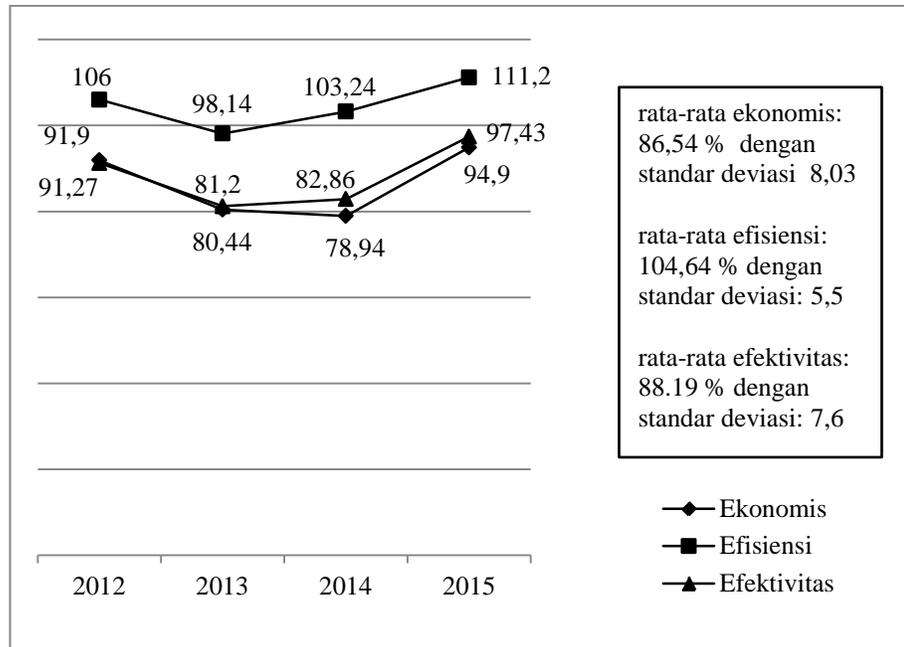
Terlihat lebih jelas dari grafik di atas bahwa secara umum kinerja pemerintah tahun anggaran 2012-2015 telah dapat dikatakan ekonomis, karena nilai rata-rata ekonomis masih mencapai 93,10%. Pada tahun 2012 kinerja mencapai 91,48% dan pada tahun 2013 mengalami perbaikan kinerja 0,86% menjadi 90,62%. Kemudian tiga tahun berikutnya, kinerja keuangan konsisten dalam penurunan. Tahun 2013 ke tahun 2014 turun 2,47% dan tahun 2015 turun 2,2% menjadi 95,2%. pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan sebesar 2,47% dan 2,20%.

Sementara itu, jika ditinjau dari elemen efisiensi, kinerja keuangan pemerintah Aceh juga mengalami penurunan. Hanya tahun 2012 ke tahun 2013, kinerja keuangan yang mengalami peningkatan, yaitu hanya sebesar 0,24%. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015, kinerja pemerintah Aceh termasuk ke dalam golongan tidak efisien, meskipun tahun 2015 rasio efisiensi kinerja pemerintah Aceh meningkat 3,9%. Pada dua tahun sebelumnya, kinerja menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Pada tahun 2014 dan 2015, komponen belanja barang merupakan komponen yang terbesar dalam menyumbang besarnya total belanja operasional. Besarnya belanja operasional yang lebih tinggi dari belanja modal akan menimbulkan adanya rasio tidak keseimbangan.

Ditinjau dari segi efektivitas tahun 2012 dan 2014 pemerintah dapat melampaui target dan mampu mempertahankan kinerjanya dalam posisi sangat efektivitas. Akan tetapi, pada tahun anggaran berikutnya pencapaian atau realisasi kinerja menjadi 97,93% atau turun 2,63%. Berdasarkan pada nilai rata-rata, kinerja pemerintah Aceh termasuk efektif, karena 99,2 % program kerja telah dicapai.

4.1.2 Provinsi Sumatera Utara

Grafik 4.2
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Grafik di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari segi ekonomis masih termasuk dalam kriteria ekonomis. Pada tiga tahun pertama, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan atau perbaikan kinerja keuangan. Tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 11,46% dan tahun 2014 meningkat sebesar 9,50%. Untuk tahun 2015 penurunan kinerja mencapai 15,96%. Penyerapan belanja yang besar terjadi

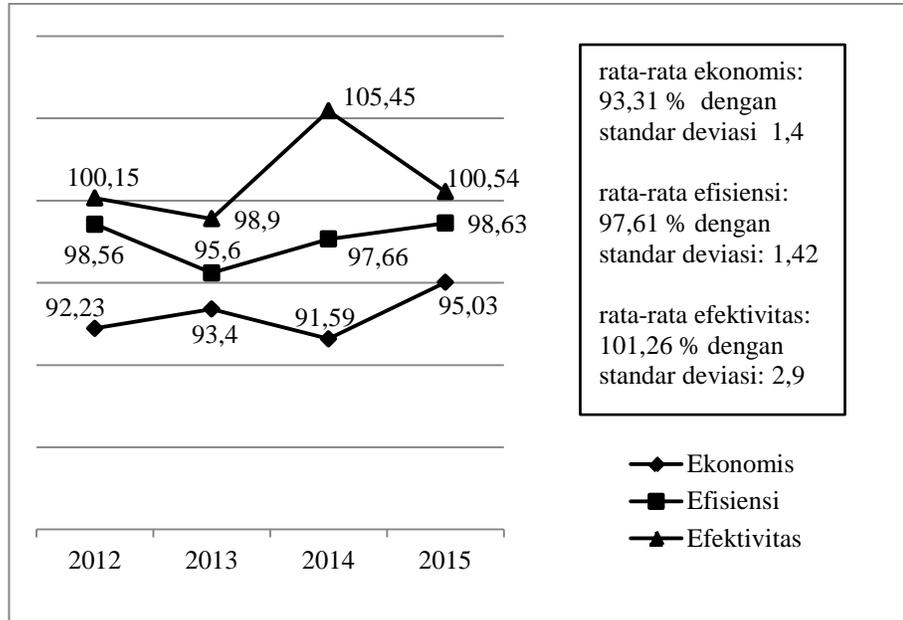
karena adanya peningkatan realisasi belanja operasi yang pada dasarnya merupakan sektor non produktif, tidak menimbulkan *multiplier effect* pada perekonomian.

Rata-rata secara keseluruhan selama empat tahun anggaran, efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak efisien. Lebih dari 70% dari total belanja disumbangkan oleh belanja operasi. Tahun 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu menghasilkan pendapatan daerah dengan menggunakan realisasi belanja yang minimal. Tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami penurunan efisiensi kinerja sama seperti pada tahun 2012, yang mencapai lebih dari 100%. Inefisiensi terjadi seiring dengan peningkatan PAD yang lebih kecil dari peningkatan belanja.

Ditinjau dari efektivitas kinerja, kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target kerja cukup efektif. Selama empat tahun anggaran kinerja mengalami naik turun. Tahun 2012 dan 2015 perbaikan kinerja disebabkan oleh meningkatnya penerimaan realisasi PAD, yang bersumber pada penerimaan pajak daerah. Namun secara keseluruhan, dana dari pemerintah pusat masih mendominasi, dan mengindikasikan bahwa masih ada ketergantungan pemerintah daerah yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

4.1.3 Provinsi Sumatera Barat

Grafik 4.3
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai 2015 dari segi ekonomis, berdasarkan hasil perhitungan termasuk dalam kriteria ekonomis dalam kisaran 95%. Secara keseluruhan percepatan dan kenaikan porsi belanja modal menjadi indikasi meningkatnya kualitas pemerintah belanja daerah karena jenis belanja ini yang dapat memacu aktivitas perekonomian. Penurunan kinerja yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,17%. Tahun 2014

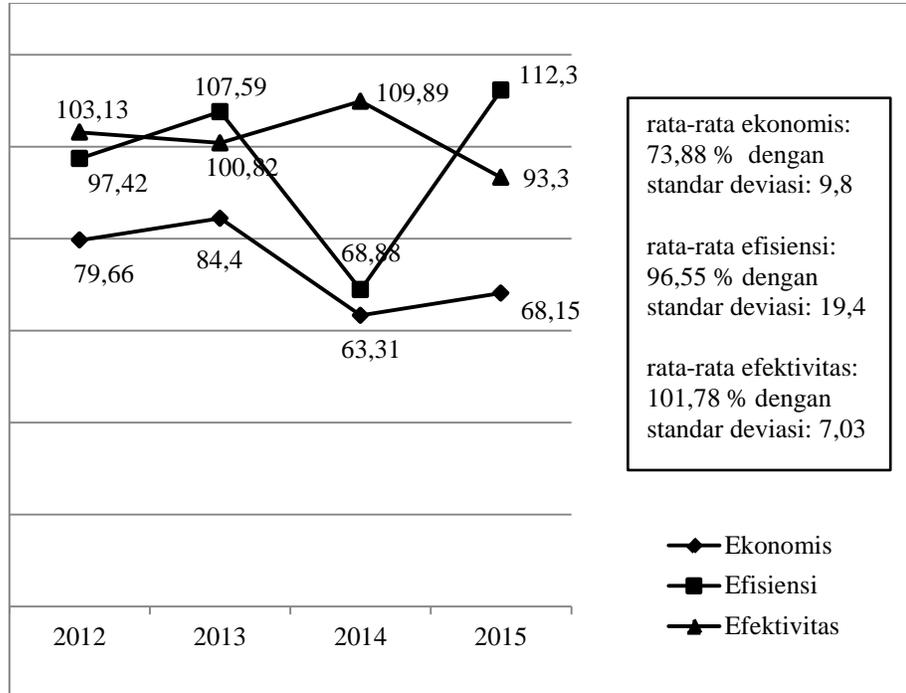
mengalami peningkatan kinerja, yaitu sebesar 2,9% dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 3,44%.

Ditinjau dari efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum termasuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun pertama, efisiensi kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,96% dari 98,5% menjadi 95,6%. Namun untuk tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2015 efisiensi kinerja konsisten mengalami penurunan. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,06% dari 95,6% menjadi 87,66% dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,97% dari 87,66% menjadi 86,69%.

Angka 101,26% merupakan skor untuk kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam kategori sangat efektif dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Untuk lebih khusus, hanya tahun 2013 yang kinerja keuangan pemerintah masuk dalam kriteria efektif. Untuk tahun 2013 pencapaian pendapatan daerah menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 100,1%. Namun pada tahun 2013 realisasi PAD lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu 102,4% dari 99,5%

4.1.4 Provinsi Riau

Grafik 4.4
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Riau (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, karena pada umumnya pemerintah daerah lain masuk dalam kriteria ekonomis pada kisaran 95% ke atas, sementara pemerintah Provinsi Riau, secara umum terletak pada kisaran 80%. Rata-rata rasio ekonomis selama 4 tahun anggaran sebesar 73,88%. Selama 4 tahun anggaran tersebut, tahun 2013 merupakan tahun dengan kriteria ekonomis yang terendah

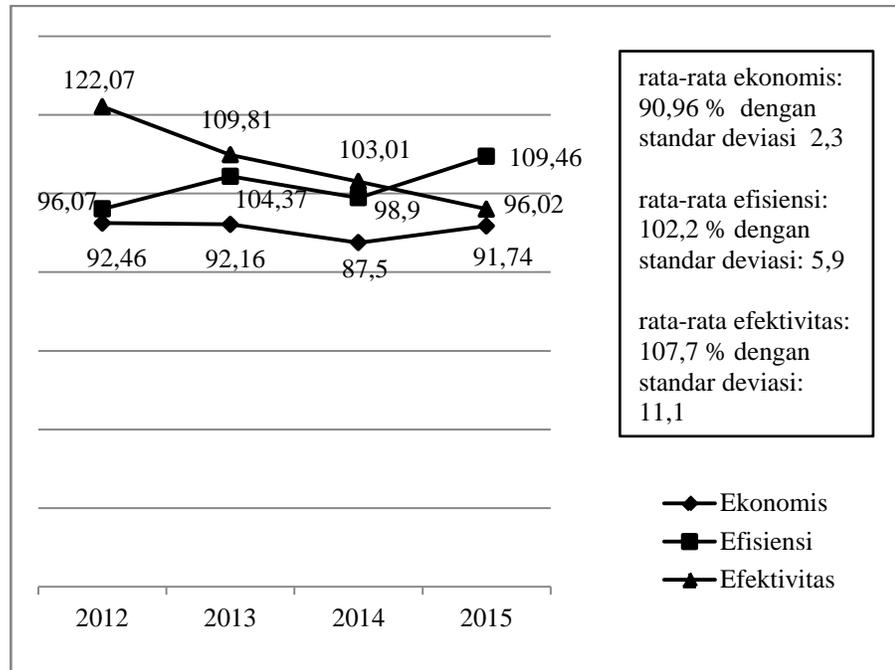
dengan rasio sebesar 84,4%. Realisasi anggaran belanja Provinsi Riau selama tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4,39 triliun atau sebesar 84,4% dari total anggaran yang dialokasikan.

Efisiensi rasio kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau sangat fluktuatif, yaitu juga ditunjukkan dengan nilai standar deviasi, 19,4. Berdasarkan nilai rata-rata, kinerja termasuk dalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2014, kinerja pemerintah menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat baik, meningkat 38,7%. Namun tahun 2015, kinerja pemerintah sangat anjlok, rasio mencapai 112,3%. Atau menurun sebesar 48,4%.

Tiga tahun pertama selama empat tahun anggaran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Riau sangat efektif, namun tahun 2015 kinerja mengalami penurunan sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Turun sebesar 16,6% sehingga menyebabkan standar deviasi sebesar 7,03. Efektivitas kinerja tahun 2012 sampai 2014 masing-masing sebesar 103,13%, 100,82% dan 109,8%. Kemudian pada tahun 2015 efektivitas kinerja turun 16,9% sehingga mencapai 93,3%.

4.1.5 Provinsi Jambi

Grafik 4.5
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jambi (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



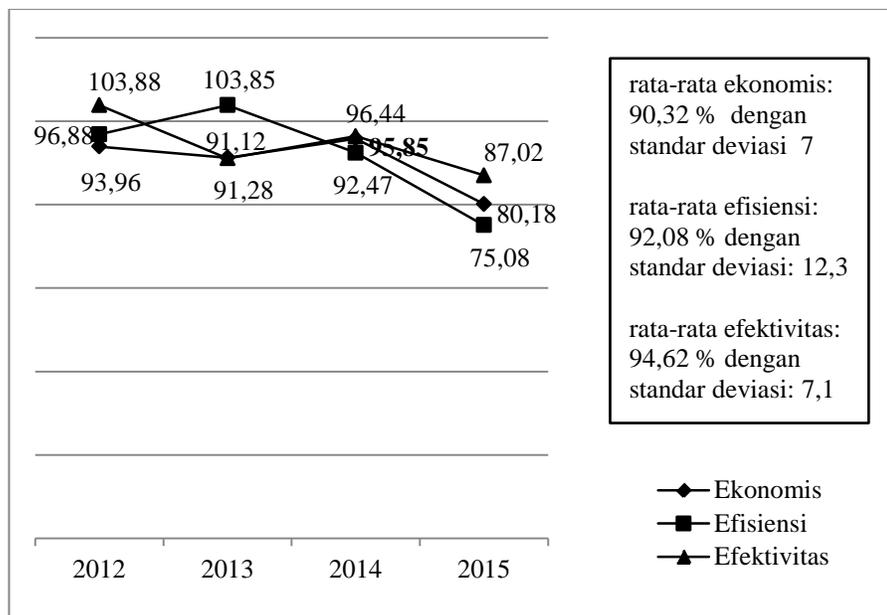
Fluktuasi yang terjadi selama 5 tahun tersebut tidaklah tinggi selisihnya dan nilai standar deviasi hanya 2,3. Tahun 2013 terjadi peningkatan kinerja 0,30% dan tahun 2014 meningkat sebesar 4,7%. Namun pada tahun anggaran 2015, kinerja Pemerintah Jambi kembali pada angka 90-an persen. Dari 87,5 % menjadi 91,74 % atau kinerja mengalami penurunan sebesar 4,24%.

Selain dari pada itu, jika ditinjau dari segi efisiensi, secara umum kinerja Pemerintah Jambi kurang efisiensi, yaitu berdasarkan rata-rata rasio efisiensi sebesar 98,60%. Meskipun secara rata-rata kinerja menunjukkan kurang efisiensi, namun pemerintah telah menunjukkan perbaikan, yaitu ditunjukkan dengan adanya peningkatan sebesar 5,5% pada tahun 2014, dari 104,37% menjadi 98,9%. Inefisien yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan perolehan pendapatan asli daerah belum mencapai target terutama dari sektor pajak.

Berdasarkan pada nilai rata-rata efektivitas, kinerja pemerintah Provinsi Jambi tergolong sangat efektif, yaitu sebesar 103,02%. Menurut grafik di atas, efektivitas kinerja selalu mengalami penurunan, walaupun masih tergolong efektif. Tahun 2012 efektivitas kinerja mencapai 12,07% dan turun menjadi 109,81% di tahun 2013. Tahun 2014 kembali turun sebesar 6,8% menjadi 103,01%. Hingga tahun 2015 penurunan efektivitas kinerja mencapai 96,02% atau turun sebesar 6,99%.

4.1.6 Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 4.6
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



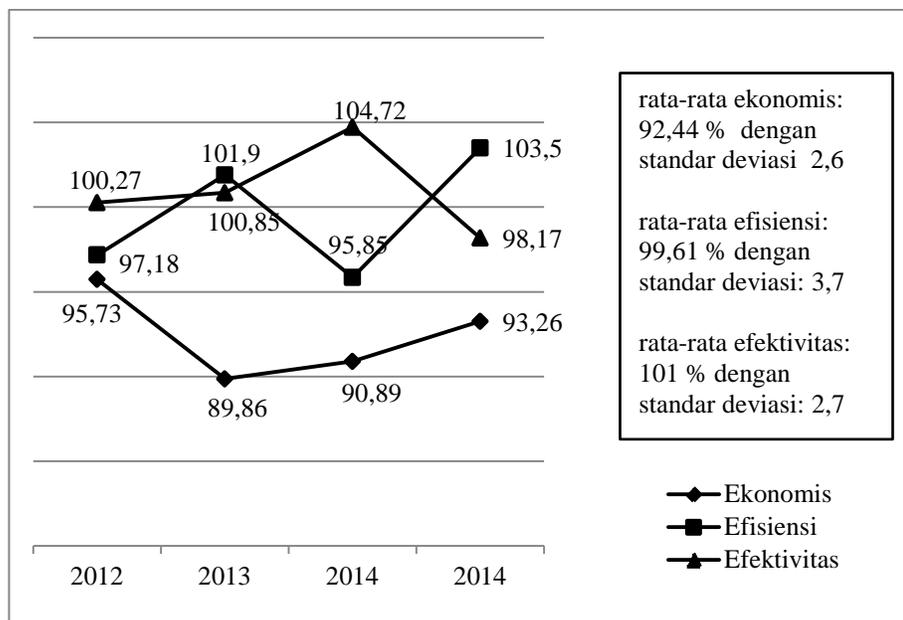
Grafik di atas dapat memberikan informasi bahwa rata-rata kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ekonomis, yaitu 90,32%. Peningkatan kinerja dilakukan pada tahun 2013, yaitu meningkat sebesar 2,7%. Kemudian tahun 2014 kinerja pemerintah semakin menurun yakni 4,57%. Tahun 2015 pemerintah provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan adanya peningkatan ekonomis, sebesar 15,67%. Peningkatan kinerja pada tahun 2015 yang cukup baik, menyebabkan standar deviasi cukup tinggi, yaitu 7.

Perbaikan kinerja dalam waktu tiga tahun terakhir dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari segi efisiensi. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin tidak efisien yaitu mencapai angka lebih dari 100% atau turun sekitar 7%. Tahun berikutnya kinerja semakin efisien dengan meningkat 11,38% dan tahun 2015 meningkat 17,39%.

Kesimpulan yang diperoleh dari grafik di atas, tahun anggaran 2012 ke tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebanyak 17,26% yaitu dari 103,88 % menjadi 91,12 %, pada tahun anggaran 2013 ke tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan sebanyak 5,32% yaitu dari 91,12 % menjadi 96,44%, kemudian dari tahun anggaran 2014 ke tahun anggaran 2015 kembali mengalami penurunan sebanyak 9,42% dari 96,44% menjadi 87,02%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kriteria telah efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

4.1.7 Provinsi Bengkulu

Grafik 4.7
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Bengkulu (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



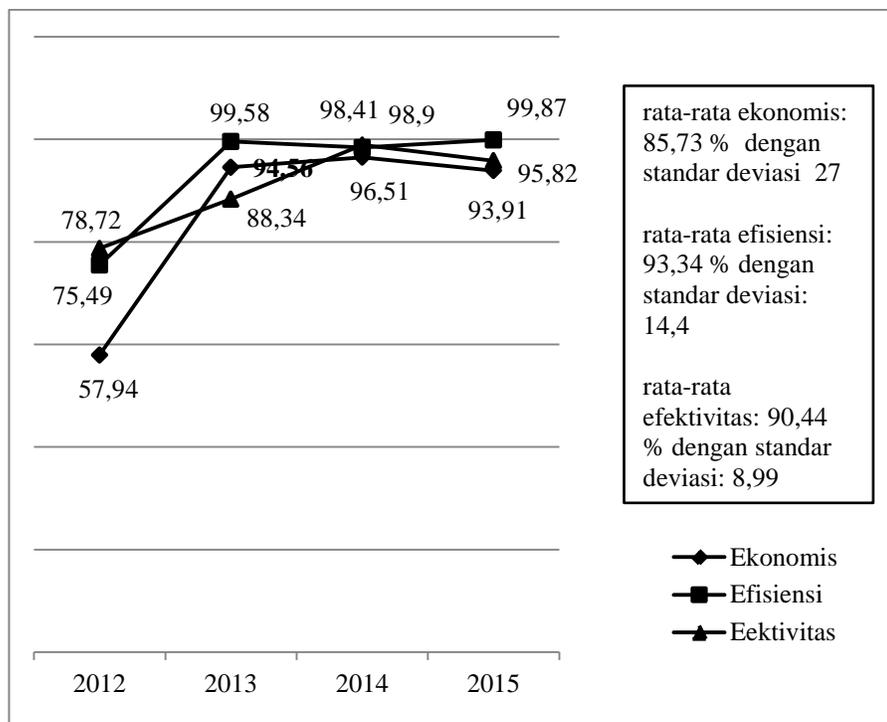
Kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Bengkulu, yang paling tidak ekonomis yaitu pada tahun 2012 dengan prosentase ekonomis 95,73%. Kemudian tahun 2013 mengalami perbaikan kinerja 5,87%. Sementara dua tahun berikutnya selalu mengalami penurunan kinerja. Realisasi pada tahun 2015 mencapai Rp 2,267,27 miliar atau 93,26% dari pagu sebesar Rp 2.426,78 miliar. Sementara pada tahun 2014 realisasi mencapai 1.934,72 miliar atau 92,48% dari pagu sebesar Rp 2.092,06 miliar.

Dilihat secara keseluruhan, efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu kurang efisien. Tahun 2013 dan 2015 efisiensi kinerja mengalami penurunan, masing-masing sebesar 4,72% dan 7,65%, bahkan terjadi inefisiensi kinerja dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan kinerja dari 101,9% menjadi 9,85% (2,05%).

Ditinjau dari pengukuran efektivitas kinerja, pemerintah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan sangat efektif. Namun untuk secara lebih rinci, tahun 2012 sampai 2014 pemerintah selalu melakukan perbaikan atau peningkatan efektivitas kinerja, yang masing-masing tahun tersebut rasio efektivitasnya sebesar 100,27%, 100,85% dan 104,72%. Namun, berbeda dengan tahun 2014. Tahun 2015 efektivitas kinerja menurun cukup besar dari 104,72% menjadi 98,16% atau sekitar 6,56%. Penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2015 bersumber pada penurunan pendapatan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sebagai dampak menurunnya penjualan otomotif.

4.1.8 Provinsi Lampung

Grafik 4.8
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Lampung (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Rata-rata rasio ekonomis sebesar 85,73%. Hal itu berarti secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Lampung telah ekonomis. Pada tahun pertama terjadi penurunan yang besar yaitu dari 57,94% menjadi 94,56% atau sekitar 43,38%, yang menyebabkan nilai standar deviasi mencapai 27. Pada tahun 2013 juga mengalami penurunan kinerja namun hanya 1,95%. Untuk dua tahun selanjutnya

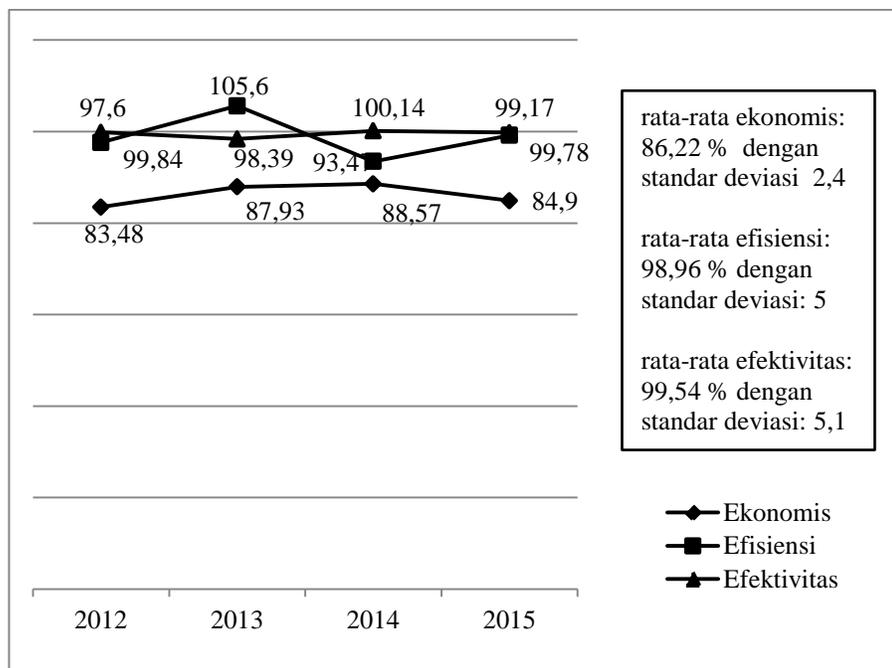
pemerintah Provinsi Lampung konsisten dalam meningkatkan kinerja ekonomisnya. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015, terdapat keseimbangan antara belanja modal dan belanja operasional.

Informasi dari nilai rata-rata efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dikategorikan kurang efisien. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dari 75,49% menjadi 99,58% atau sekitar 24,09%. Kemudian tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat dari 88,58% menjadi 99,41% atau sekitar 10,83%, dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 1,46%. Realisasi PAD selama empat tahun anggaran tidak pernah terealisasi sepenuhnya, sehingga dapat dikatakan kemampuan dalam memperoleh pendapatan kurang optimal. Sedangkan dari sisi belanja daerah, realisasi belanja untuk mendapatkan pendapatan daerah hampir sama jumlahnya, sehingga selisih antara kedua tersebut kecil.

Selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014 merupakan peningkatan kinerja walaupun belum mencapai sangat efektif. Hal ini menggambarkan ada upaya perbaikan kinerja. Tahun 2015 kinerja pemerintahan Provinsi Lampung turun dari 98,9% menjadi 95,82%. Selama empat tahun anggaran, realisasi dari pos-pos pendapatan daerah tidak terealisasi secara optimal, dan dapat dikatakan pencapaian program kerja kurang efektif.

4.1.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Grafik 4.9
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Realisasi belanja daerah untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum selalu mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2013 terjadi defisit anggaran. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 kinerja menurun 4,45%. Untuk tahun 2014, realisasi belanja daerah mencapai 83,79% atau Rp 1,19 triliun. Pangsa pasar yang terbesar adalah pada anggaran belanja operasional yang terealisasi mencapai Rp 1,03 triliun dengan pangsa 74,43%. Pada

tahun 2015 kinerja keuangan semakin ekonomis kembali dan masing berada di bawah nilai rata-rata rasio ekonomis.

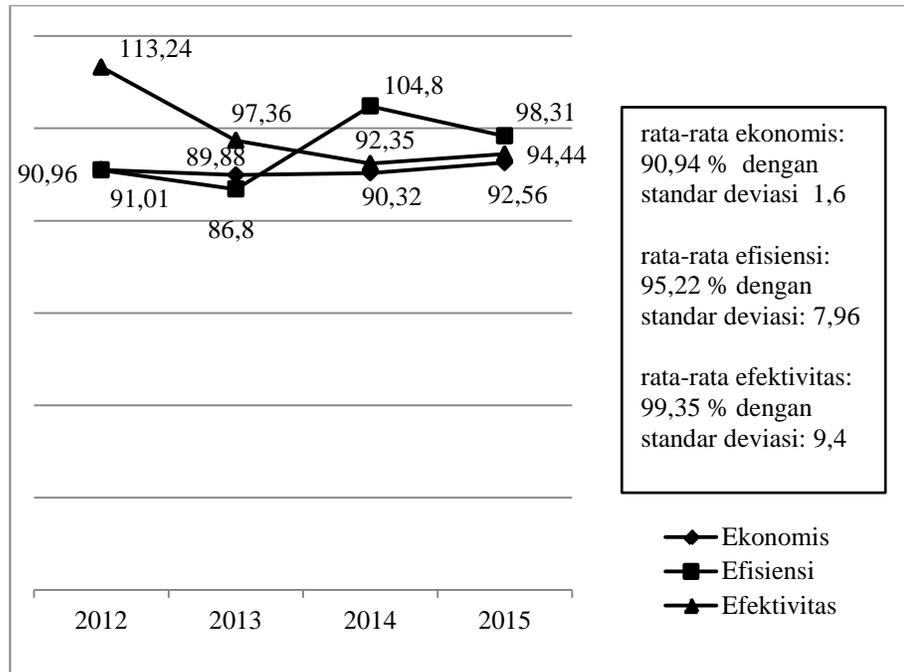
Efisiensi kinerja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 sampai 2014 tergolong kurang efisien dan naik turunnya kinerja cukup tinggi dengan standar deviasi 5. Hal ini berarti, pemerintah daerah kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya dalam menghasilkan *output*. Efisiensi kinerja pada tahun 2013 termasuk dalam kategori inefisien, belanja yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan, malah lebih besar realisasinya terhadap pendapatan yang dihasilkan, sehingga menyebabkan posisi anggaran pada tahun tersebut defisit. Pada tahun 2014, kinerja kembali membaik dengan capaian efisiensi kinerja 93,4%. Kemudian tahun 2015 efisiensi kinerja mengalami penurunan kembali. Namun masih di bawah 100%, yaitu penurunan sebesar 5,77%.

Realisasi pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,72 triliun atau sebesar 99,89% dan termasuk dalam kategori efektif. Nilai realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai 98,39%. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung masing sangat bergantung pada dana pemerintah pusat. Dana perimbangan masih menjadi kontributor terbesar pada pendapatan daerah dengan pangsa sebesar 60,56% dan terealisasi Rp 1,03 triliun atau 59,58%. Sama

halnya dengan tahun 2014, tahun 2012 sampai 2015, perolehan PAD ditopang oleh adanya dana perimbangan.

4.1.10 Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 4.10
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja keuangan pemerintah Kepulauan Riau, jika diamati secara sekilas pada grafik akan terlihat stabil. Namun pada dasarnya mengalami peningkatan. dari tahun 2013 sampai 2015 dan penurunan

yang sedikit pada tahun 2012 ke tahun 2013. Karena naik turunnya tidak terlihat jelas atau membentuk garis lurus dengan nilai standar deviasi 1,6. Secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah Pemerintah Kepulauan Riau telah dapat dikatakan ekonomis. Rata-rata rasio ekonomis selama empat tahun anggaran adalah sebesar 90,94%. Dari tahun 2012 sampai 2014, komponen belanja yang masih mendominasi total belanja daerah adalah belanja operasional, yaitu lebih dari 60%. Untuk tahun 2013, realisasi belanja pemerintah mencapai 89,88% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan.

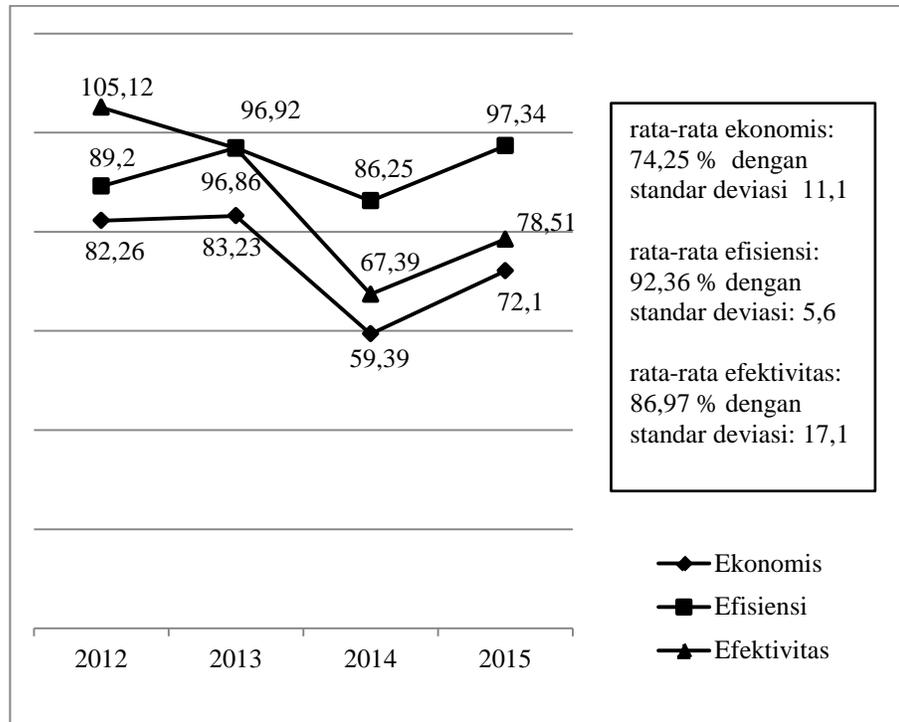
Pengukuran kinerja dari segi efisiensi pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara umum kurang efisien. Selama empat tahun anggaran tersebut terjadi fluktuasi kinerja dengan yang cukup besar dengan standar deviasi 7,96. Tahun 2012 kinerja mengalami peningkatan 4,16%. Kemudian tahun 2013 ke tahun 2014 efisiensi kinerja turun cukup banyak yaitu 6% hingga kinerja menjadi tidak efisien yaitu mencapai 104,8%. Sementara pada tahun 2015 ada upaya dari pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja. Meskipun pada tahun 2015 rasio efisiensi kinerja masih di atas nilai rata-rata, yaitu 98,31%.

Awal tahun 2012 efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat efektif. Namun dua tahun berikutnya,

yaitu tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, masing-masing 2,8% dan 5%. Angka efektivitas terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 92,35%. Tahun 2015 efektivitas kinerja meningkat 2,09% sehingga menjadi 94,44%. Turunnya kinerja yang cukup tinggi pada tahun 2012, membuat standar deviasi cukup besar, yaitu 9,4.

4.1.11 Provinsi DKI Jakarta

Grafik 4.11
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Berdasarkan pada nilai rata-rata, dapat diketahui bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ekonomis. Tahun 2012 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 82,26% atau teralisasi Rp 31.558.706.898.925,00 dari target yang ditetapkan Rp 38.366.680.073.841,00. Tahun 2013 terealisasi sebesar 38.301.502.396.759,00 dari anggaran belanja Rp 46.578.865.629.904,00 atau 83,23%. Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 37.799.664.298.459,00 dari anggaran Rp 63.650.106.383.473,00 atau 59,39%. Kemudian tahun 2015 terealisasi Rp 43.031.322.947.557,00 dari Rp 59.685.552.609.233,00 atau 72,1%. Realisasi dan anggaran dana belanja selama 4 tahun anggaran selalu mengalami peningkatan, namun bukan berarti kinerja ekonomis menurun. Namun hal tersebut tergantung pada besarnya rasio pencapaian realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

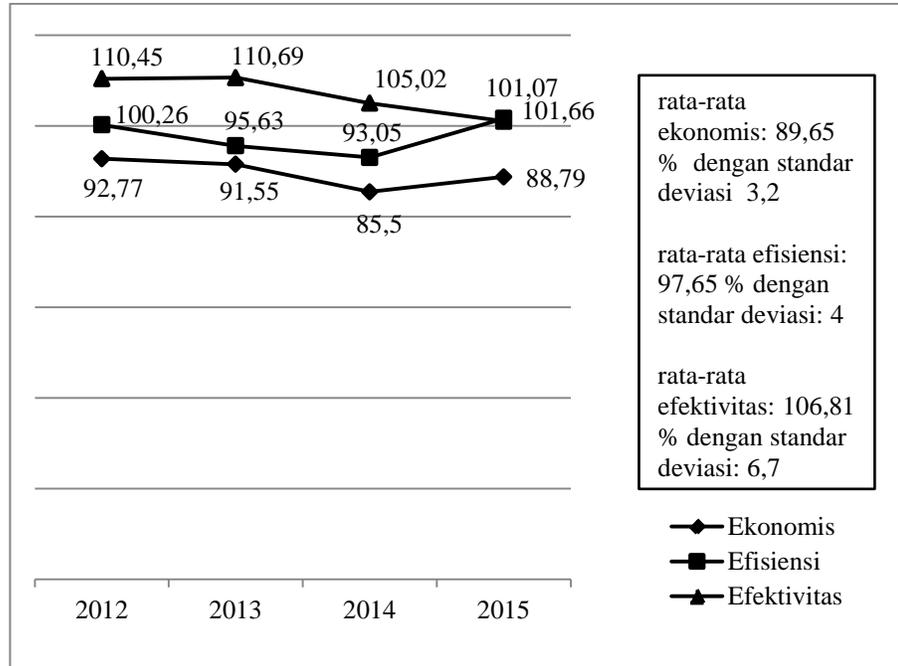
Tahun anggaran 2012 sampai tahun 2015 mengalami naik turun. Turunnya efisiensi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendapatkan pendapatan daerah disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Selama empat tahun anggaran tersebut, pos belanja operasi lebih dari 50%. Belanja modal seharusnya lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong

perolehan pendapatan daerah, misalnya dengan pembangunan infrastruktur, belanja jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu, inefisiensi kinerja terjadi karena adanya fakta bahwa setiap tahun terdapat estimasi kenaikan gaji pegawai 10% (*detik News*, 2015) .

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012 telah melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar Rp 1.729.168.093.372,03 atau 5,12%. Kemudian dua tahun berikutnya realisasi pendapatan mengalami penurunan yang drastis. Tahun 2013 turun 3,26% dan tahun 2014 turun 22,47%. Tahun 2015 kinerja keuangan mengalami peningkatan, walaupun belum sebesar pada tahun 2012, yaitu 11,12% dan menjadi 78,51%. Adanya ketidakefektivan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merealisasi pendapatan daerah disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: adanya mutasi mutasi kendaraan bermotor keluar daerah yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor turun, kurangnya jumlah sumber daya manusia sebagai petugas pelaksana pelayanan dan penelitian berkas pajak kendaraan bermotor.

4.1.12 Provinsi Jawa Barat

Grafik 4.12
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Penurunan kinerja keuangan kembali terjadi pada tahun 2015, namun prosentase ekonomis masih berada di bawah rata-rata. Secara periodik triwulanan, porsi realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat masing-masing 8%, 15%, 23% dan 54% dari total realisasi belanja tahun 2015. Tahun-tahun sebelumnya juga sama dengan tahun 2015. Bahwa penyerapan

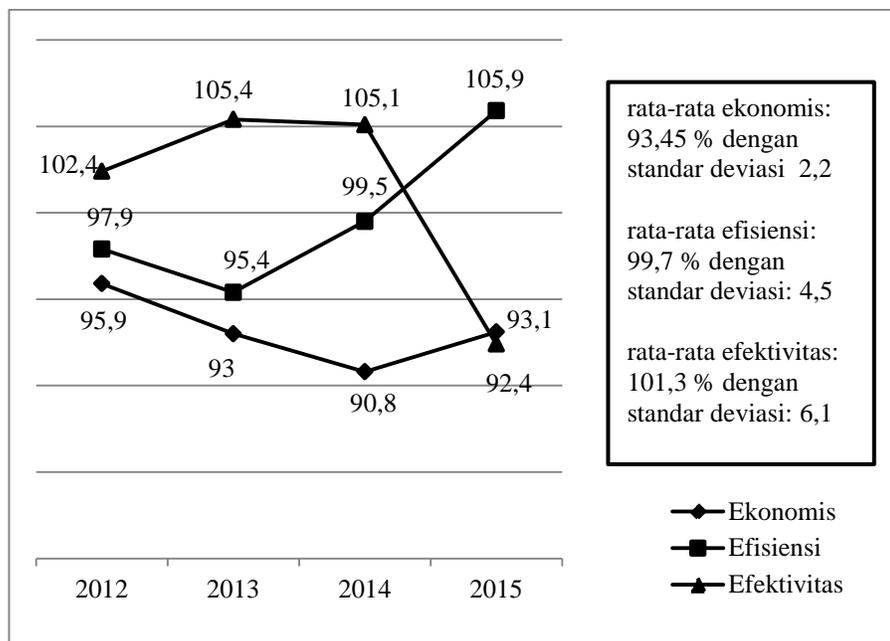
belanja selalu ditumpuk di akhir tahun atau pada triwulan IV. Kondisi ini merupakan *back-loaded expenditure* atau pengeluaran yang meningkat di akhir tahun. Diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran yang meningkat di akhir tahun dan meratakan pengeluaran daerah yang lebih merata di setiap periodiknya.

Angka 97,65 % pada rata-rata rasio efisiensi, menandakan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk efisien. Namun demikian, dari tahun 2012 sampai 2014 kinerja pemerintah yang paling efisien ada pada tahun 2014 yaitu 93,05%. Tahun 2012 dan 2015 terjadi inefisiensi kinerja yang ditunjukkan dengan angka 100,26% dan 101,66%. Peningkatan kinerja dilakukan pemerintah pada tahun 2013 dan 2014. Tahun 2013 meningkat dari 100,26% menjadi 95,63% dan tahun 2014 dari 95,63% menjadi 93,05%. Atau masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,63% dan 2,58%.

Secara gabungan, efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat efektif dengan rata-rata 106,81%. Selama empat tahun anggaran efektivitas kinerja mengalami penurunan, namun tidak signifikan dan masih termasuk kriteria sangat efektivitas. Hanya tahun 2012 yang mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Tahun 2014 dan 2015 masing-masing turun 5,67% dan 3,05%.

4.1.13 Provinsi Jawa Tengah

Grafik 4.13
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 4 tahun anggaran, secara umum adalah ekonomis. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dan rasio rata-rata ekonomis yang berada pada angka 90% - 100%. Sangat jelas terlihat dalam grafik di atas, bahwa rasio ekonomis kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 kinerja Pemerintah meningkat 3%. Sementara tahun 2014 kinerja turun kurang lebih 2%. Kinerja

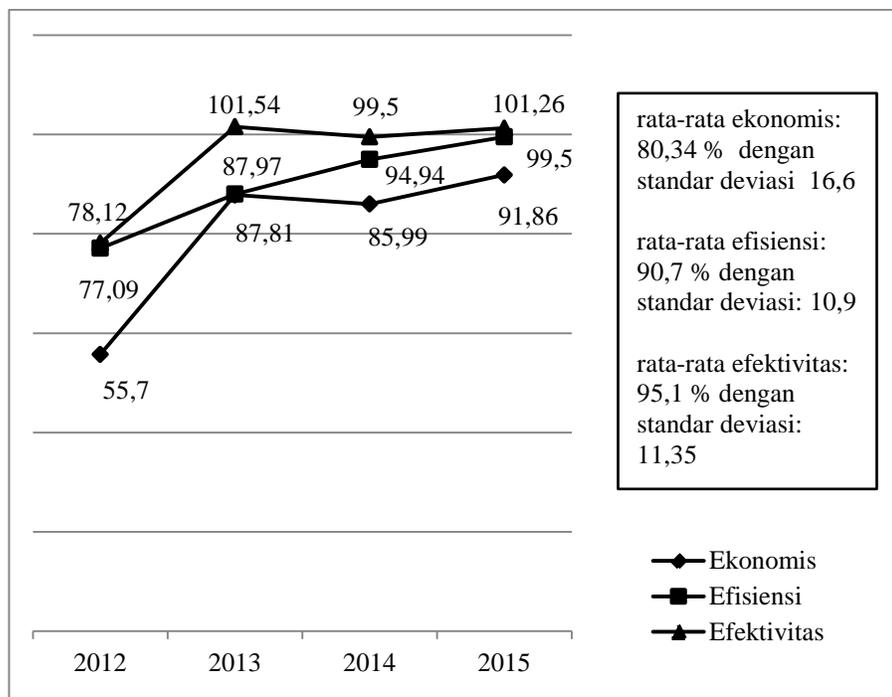
pemerintah mengalami peningkatan kembali, yaitu pada tahun 2015, tepatnya 3,8%. Meningkat dari 94,06 % menjadi 90,78 %.

Angka 99,7 % pada rata-rata rasio efisiensi, menandakan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk efisien. Namun demikian dari tahun 2012 sampai 2014 kinerja pemerintah yang paling efisien ada pada tahun 2013 yaitu 95,36%. Untuk tahun 2013 ada peningkatan kinerja sebesar 2,5%. Kemudian tiga tahun berikutnya, konsisten dalam penurunan kinerja. Tahun 2014 efisiensi kinerja turun 4,1% dan tahun 2015 turun 6,4%, yang menyebabkan tahun 2015 inefisiensi kinerja.

Selama tiga tahun anggaran, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu mempertahankan kinerja efektivitasnya. Namun tahun 2015, keadaan tidak sepadan dengan tiga tahun sebelumnya. Kinerja pemerintah Jawa Tengah anjlok 12,4% dari 105,08% menjadi 92,35%. Keadaan tersebut disebabkan oleh adanya realisasi PAD yang diperoleh lebih sedikit dari yang dianggarkan, yaitu selisih Rp 1.163.203.944.496,00. Kemudian, sekitar 37,5% dari total pendapatan merupakan transfer dari pemerintah pusat. 2% merupakan pendapatan hibah. Artinya, sekitar 60,5% dari total pendapatan, pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu menghasilkan pendapatan.

4.1.14 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Grafik 4.14
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi DIY (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Penerapan asas ekonomis, efisiensi dan efektivitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pada tahun pertama, pemerintah Provinsi DIY mampu menunjukkan kinerja keuangannya yang sangat ekonomis yaitu dibuktikan dengan rasio yang kecil, 55,7%. Artinya pada tahun tersebut pemerintah provinsi DIY mampu menghemat dana 44,3%. Kemudian pada tiga tahun

berikutnya mengalami penurunan kinerja, namun penurunan tersebut masih masuk dalam kriteria ekonomis. Pada tahun 2015, nilai rasio kinerja ekonomis naik 6,9% dari 85,99% menjadi 91,86%. Kenaikan angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Banten semakin tidak ekonomis. Secara umum realisasi belanja daerah bersumber dari terealisasinya belanja tidak langsung dengan realiasi terbesar pada belanja pegawai. Tingginya belanja pegawai tersebut menunjukkan fleksibilitas fiskal daerah relatif masih terbatas.

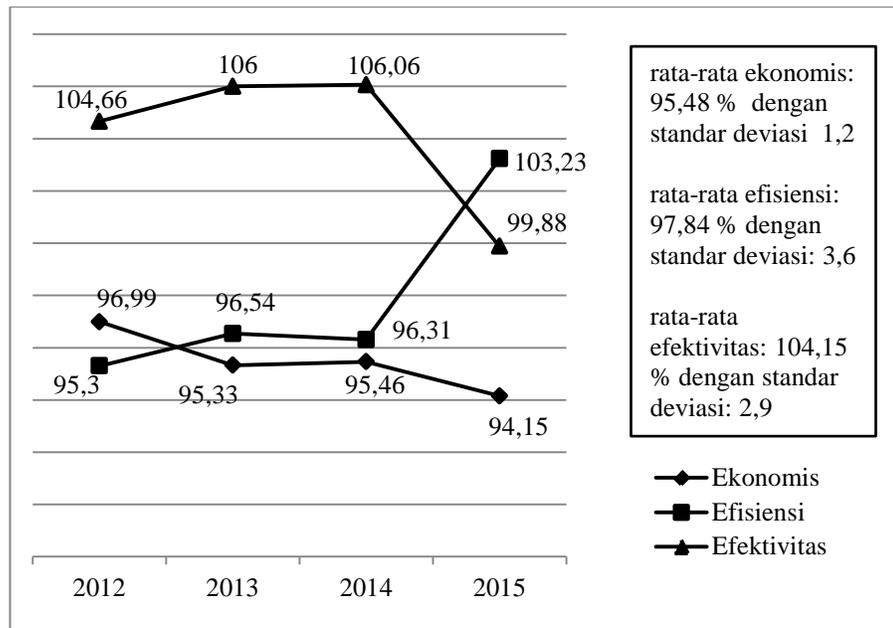
Berdasarkan pada grafik di atas, terlihat bahwa kinerja pemerintah Provinsi DIY semakin tidak efisien. Penurunan kinerja yang terjadi disebabkan oleh tingginya belanja pegawai dibandingkan belanja modal untuk menunjang peningkatan penerimaan daerah. Sebanding dengan kinerja ekonomis. Pada tahun 2012 kinerja keuangan masing menunjukkan kriteria baik, dan tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan seiring dengan prosentase realisasi belanja yang semakin meningkat dan prosentase realisasi pendapatan yang relatif stabil.

Melihat dari nilai rata-rata rasio efektivitas, mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi DIY telah efektif. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang cukup baik yaitu 23,42% dari 78,12% menjadi 101,54%.

Kemudian tahun 2014 efektivitas kinerja mengalami penurunan lagi, namun tidak signifikan hanya 2%. Kemudian tahun 2015 kinerja pemerintah Provinsi DIY meningkat kembali hingga termasuk dalam kategori sangat efektif yaitu 101,26%.

4.1.15 Provinsi Jawa Timur

Grafik 4.15
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Ditinjau dari segi ekonomis, secara umum kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur, ekonomis dengan rata-rata rasio

ekonomis sebesar 95,48%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur konsisten dalam meningkatkan kinerjanya yaitu tahun anggaran 2012 sampai 2015, nilai rasio selalu menurun. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 meurun 1,66%, pada tahun 2014 meningkat 0,93 % dan tahun 2015 meningkat 1,31%. Selama lima tahun tersebut, berdasarkan kelompoknya, belanja langsung mencatat sebagai kontributor terbesar dalam belanja daerah.

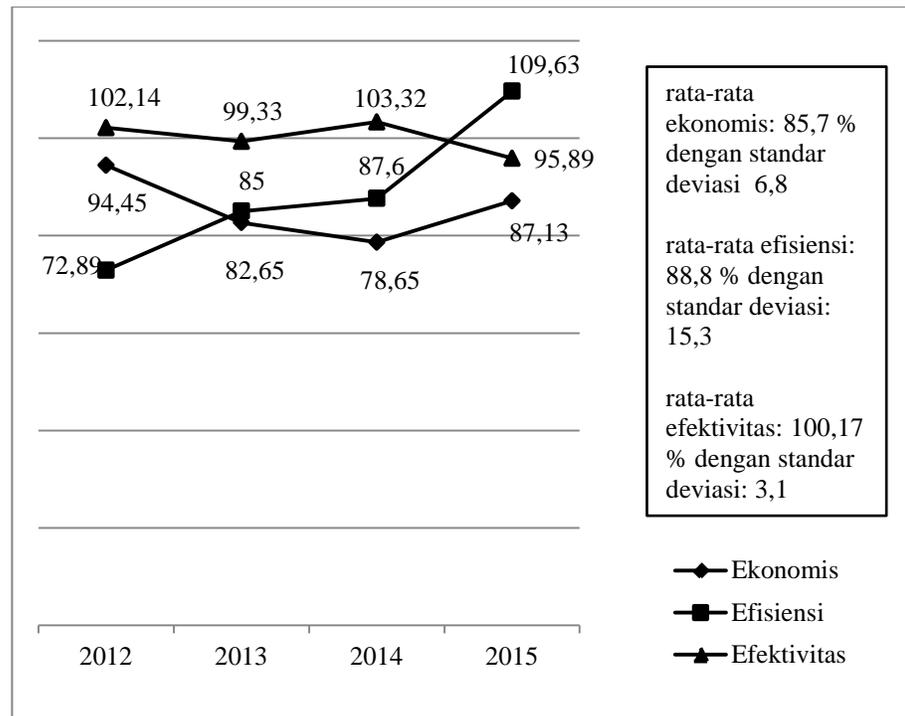
Merujuk pada nilai rata-rata rasio efisiensi kinerja, bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur disimpulkan kurang efisien dengan nilai rata-rata 97,84. Pada tiga tahun pertama, efisiensi kinerja mengalami naik turun yang tidak tinggi. Tahun 2013 mengalami penurunan efisiensi kinerja 1,24% dan 2014 mengalami peningkatan hanya sebesar 0,23%. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 efisiensi kinerja menunjukkan penurunan yang signifikan hingga disimpulkan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak efisien, yaitu menurun 6,92% dari 96,31% menjadi 103,23%.

Efektivitas kinerja pemerinntah Provinsi Jawa Timur, jika dilihat berdasarkan rata-rata rasio efektivitas dinyatakan sangat efektif, yaitu sebesar 104,15%. Tahun 2012 sampai tahun 2014 efektivitas kinerja mengalami peningkatan dan juga masuk dalam kriteria sangat efektif, sementara tahun 2015 mengalami penurunan kinerja yang

menyebabkan kinerja keuangan termasuk efektif. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah selalu meningkat. Namun realisasi pendapatan daerah tidak selalu mengalami peningkatan.

4.1.16 Provinsi Banten

Grafik 4.16
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Banten (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



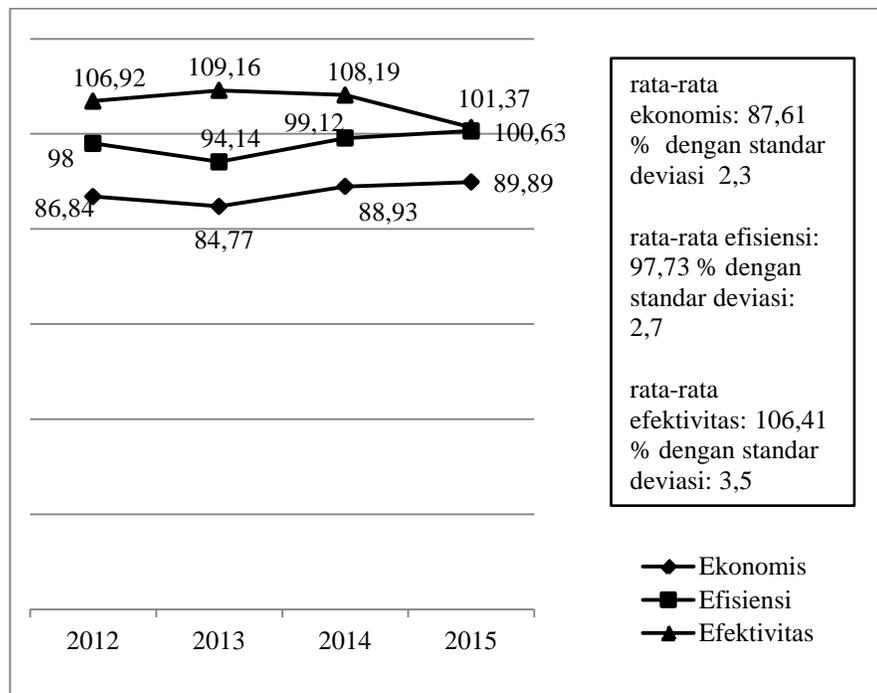
Tahun 2012 sampai dengan 2014, pemerintah Provinsi Banten mampu mendorong kinerja keuangannya yaitu ditunjukkan dengan rasio yang semakin ekonomis. Artinya, pada tiga tahun tersebut, pemerintah dalam menggunakan atau mengelola keuangannya lebih hemat. Antara yang dianggarkan dengan realisasi belanjanya berselisih semakin besar. Namun hal yang serupa tidak terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, rasio kinerja ekonomis naik 8,8% dari 87,13% menjadi 78,65%. Turunnya kinerja ekonomis yang terjadi pada tahun 2015, disebabkan oleh upaya SKPD dalam meningkatkan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta kenaikan gaji PNS dan UMR.

Tahun 2013 efisiensi kinerja turun 2,1% dari tahun 2012 yang mencapai 72,8%. Tahun 2014 turun 2,6% dan tahun 2015 turun 22,03%. Bahkan pada tahun 2015 kinerja pemerintah sangat inefisien. Untuk tahun 2015 yang rasio melebihi 100% disebabkan oleh adanya perolehan pajak daerah yang tidak melampaui target, antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun anggaran 2015 sebesar Rp 817.308.241.621,00 atau 99,03% dari target yang direncanakan, realisasi pajak pendapatan rokok tahun anggaran 2015 sebesar Rp 470.658.861.039 atau sebesar 79,77% dari target yang direncanakan.

PAD Provinsi Banten masih didominasi oleh besarnya penerimaan dari sektor pajak daerah yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,89% dari total PAD. Naik turunnya efektivitas kinerja pemerintah Banten tidaklah besar, yaitu 3,1, dan secara keseluruhan selama 4 tahun, anggaran kinerja keuangan Provinsi Banten sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas mencapai 100,17%.

4.1.17 Provinsi Bali

Grafik 4.17
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Bali (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



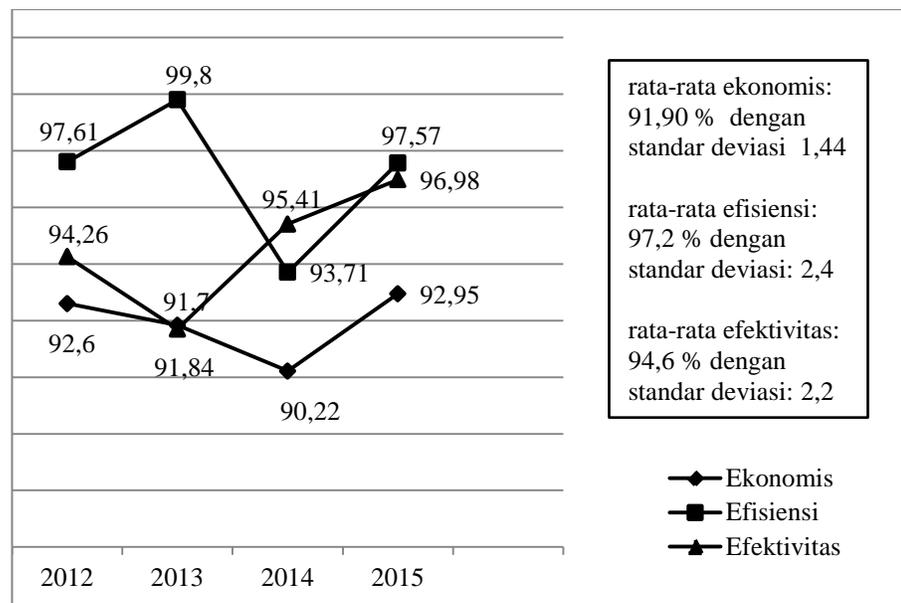
Jika dilihat secara umum kinerja ekonomis Pemerintah Provinsi Bali dari tahun anggaran 2012 sampai 2015 stabil dalam kategori ekonomis dengan nilai rata-rata rasio ekonomis 87,61% dan standar deviasi 2,3. Terjadi perbaikan kinerja keuangan elemen ekonomis pada tahun 2013. Meningkat dari 86,84% menjadi 84,77%. Nilai rasio ekonomis terbesar berada di tahun 2015. Lebih dari 50% komponen belanja operasi berkontribusi pada jumlah belanja daerah. Sedangkan untuk untuk belanja modal hanya sekitar 12%. Bahkan pada tahun 2015 posisi keuangan berada pada keadaan defisit. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, untuk menyerasikan belanja daerah dalam rangka mendorong roda ekonomi Bali.

Sama halnya dengan kinerja ekonomis. Peningkatan efisiensi kinerja hanya terjadi pada tahun 2013. Tahun 2015 bahkan terjadi inefisiensi kinerja dengan nilai rasio efisiensi melebihi 100% yaitu 100,63%. Pada tahun 2015 juga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 31.063.956.740,72. Berdasarkan perhitungan, pada tahun-tahun sebelumnya efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bali termasuk dalam kriteria kurang efisien dan posisi keuangan masih dalam keadaan surplus. Tahun 2012 surplus anggaran sebesar Rp 70.974.000.000,00. Sementara tahun 2013 surplus anggaran sebesar Rp 240.620.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp 86.032.840.316,57.

Jika dilihat secara umum kinerja ekonomis Pemerintah Provinsi Bali dari tahun anggaran 2012 sampai 2015 stabil dalam kategori sangat efektif dengan nilai rata-rata rasio efektivitas 106,41% dan standar deviasi 3,5. Tahun 2012 besarnya rasio efektivitas kinerja mencapai 106,92%, tahun 2013 meningkat menjadi 109,16%, tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, yaitu masing-masing rasio efektivitas kinerja 108,19% dan 101,37%.

4.1.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Grafik 4.18
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Tahun 2012 sampai 2014, pemerintah konsisten dalam memperbaiki kinerja ekonomisnya. Meskipun pada tiga tahun tersebut, hanya meningkat kurang dari 2%. Tahun 2013 dan 2014 masing-masing meningkat 0,76% dan 1,62%. Sedangkan kinerja ekonomis dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 2,73% menjadi 92,95%. Pada tahun 2015 jumlah pengeluaran didominasi oleh belanja operasional yaitu sebesar Rp 2.079.875.735.926,78. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 selisih Rp 343.481.665.355,45.

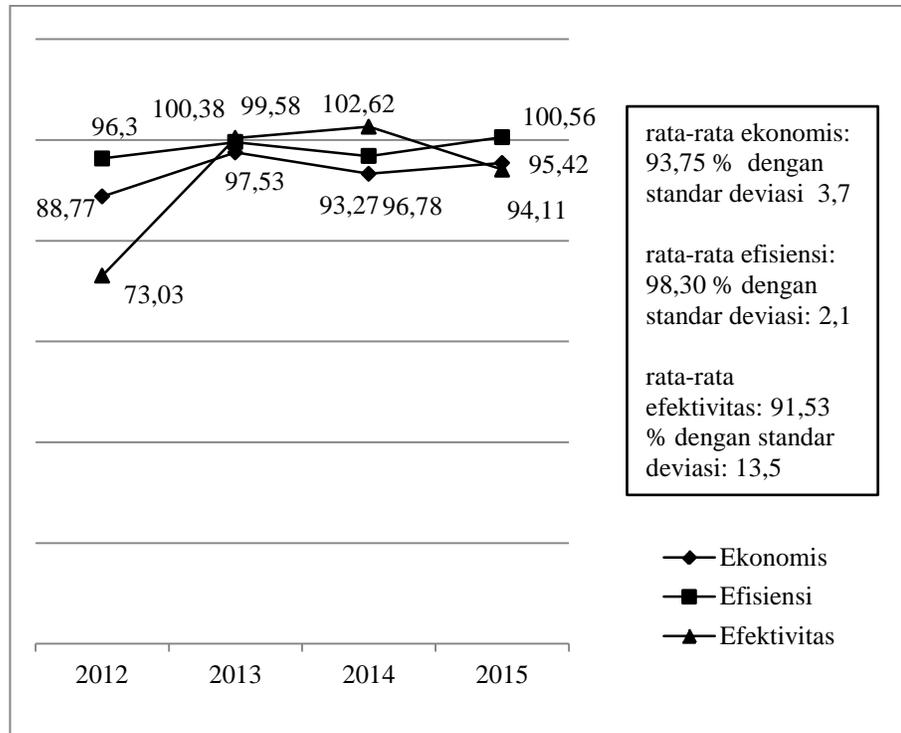
Berbeda dengan kinerja ekonomis, dari segi efisiensi kinerja pemerintah NTB mengalami fluktuasi. Melihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi (91,90%), dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah NTB kurang efisien. Selama empat tahun anggaran, kinerja yang paling efisiensi ada pada tahun 2014 yaitu 93,71%. Tahun 2013 kinerja turun 2,2% dari 97,61% menjadi 99,8%. Pada tahun 2014 pemerintah mampu memperbaiki atau meningkatkan efisiensi kinerja sebesar 6%. Namun penurunan kinerja terjadi kembali pada tahun 2015. Efisiensi kinerja turun lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya turun 2,2% namun tahun ini turun sebesar 54,9% dari 93,71 % menjadi 97,57 %.

Sementara itu, efektivitas kinerja pemerintah NTB menunjukkan kinerja yang baik, hanya tahun 2013 yang mengalami

penurunan. Peningkatan kinerja yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk mencapainya. Pada dua tahun terakhir pemerintah menunjukkan perbaikan kinerja, dibuktikan dengan peningkatan angka rasio efektivitas. Meskipun tahun 2015 peningkatan kinerja tidak sebaik peningkatan yang terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2014 naik sebesar 4,3% dan tahun 2015 meningkat 1,6%. Penurunan kinerja terjadi pada tahun anggaran 2013 sebesar 3,56%.

4.1.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Grafik 4.19
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi NTT (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Tahun 2012 realisasi belanja pemerintah Provinsi NTT mencapai 88,77% dengan total realisasi sebesar Rp 2.089,45 miliar. Dari total tersebut pos belanja operasional yang sebagian merupakan belanja pegawai menyumbang realisasi paling besar, yaitu 90%, sedangkan belanja modal yang merupakan penggerak roda ekonomi daerah hanya mencatat sebesar 83,5% atau paling rendah di antara pos

belanja yang lainnya. Minimnya realisasi tersebut diperkirakan merupakan dampak dari keterlambatan proses pengadaan proyek pemerintah. Untuk tahun 2013 total belanja tercatat Rp 2,34 triliun atau meningkat 12,07% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp 2,08 triliun. Tidak berbeda dengan tahun 2012, tahun 2013 yang mendominasi belanja daerah adalah belanja operasional, sementara pos belanja modal mencatat realisasi sebesar Rp 241,26 miliar atau 103,59%. Nominal tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,47% dibandingkan tahun 2012 sebesar 224,48%. Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa tahun 2012 kinerja keuangan dari segi ekonomis lebih baik dari tahun 2013. Begitu pula dengan dua tahun berikutnya yang mengalami kenaikan dan penurunan kinerja.

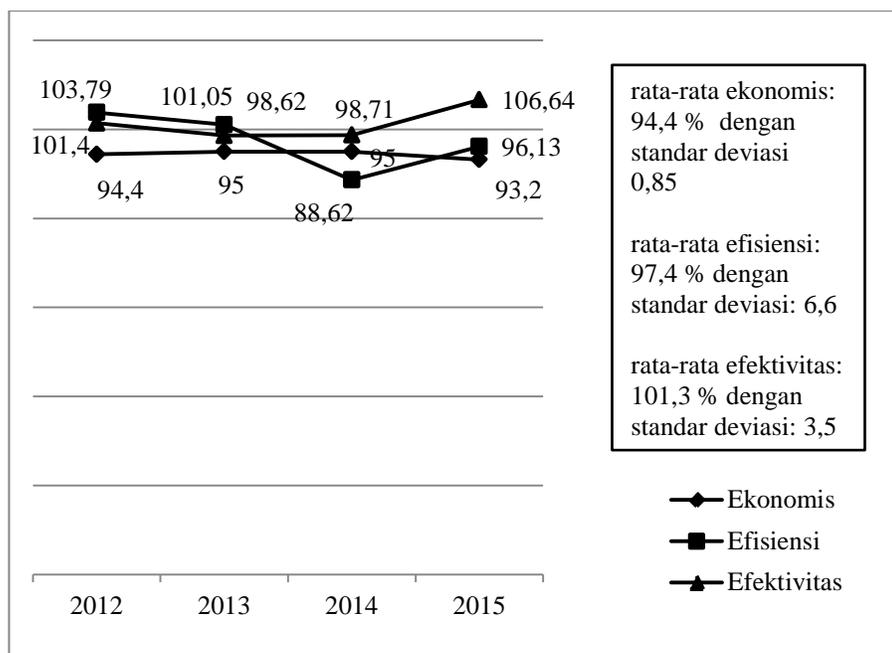
Realisasi belanja yang lebih besar daripada jumlah pendapatan menyebabkan semakin tidak efisien kinerja. Tahun 2012 rasio efisiensi kinerja mencapai 96,3%, menurun di tahun 2013 sebesar 99,58%. Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Untuk tahun 2015 kembali mengalami penurunan sehingga efisiensi kinerja mencapai 100,56% dan termasuk inefisiensi kinerja.

Berdasarkan nilai rata-rata rasio efektivitas, disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi NTT termasuk dalam kategori efektif. Secara lebih rinci tahun 2012 kinerja cukup efektif, tahun 2013

dan tahun 2014 sangat efektif dan pada tahun 2015 turun menjadi efektif dengan prosentase 95,42%. Secara keseluruhan empat tahun anggaran, pendapatan daerah NTT masih ditopang oleh dana perimbangan.

4.1.20 Provinsi Kalimantan Barat

Grafik 4.20
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2012-2015 dari segi ekonomis relatif stabil dengan kriteria

ekonomis dan nilai standar deviasi hanya sebesar 0,85, karena rasio terletak pada kisaran 95% dengan rata-rata 94,4%. Kinerja tahun 2012 ke 2013 mengalami sedikit penurunan. Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2013 masih belum optimal, tercermin dari realisasi belanja tahun 2013 mencapai Rp 3,25 triliun atau 95% dari target APBD. Berdasarkan kondisi tersebut, di mana realisasi penyerapan anggaran belanja yang lebih tinggi dari pendapatan, maka tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat berada dalam kondisi defisit. Tahun 2014, kinerja ekonomis stabil, nilai rasio ekonomis sama dengan tahun anggaran 2013, yaitu 95%. Tahun 2015 mengalami peningkatan 1,8% dari 95% menjadi 93,2%.

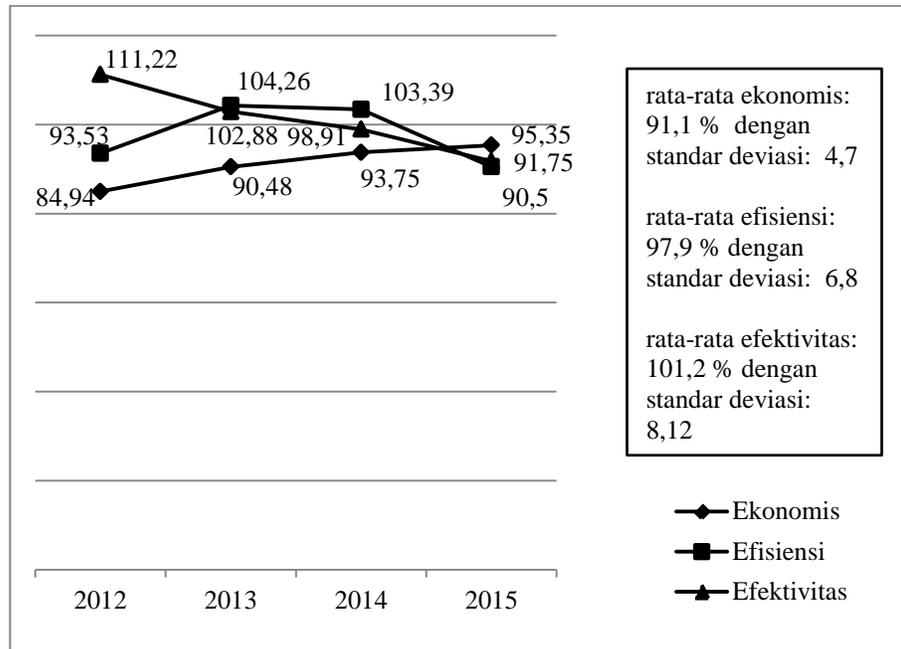
Secara umum, dari tahun anggaran 2012 sampai tahun 2015, pemerintah menunjukkan perbaikan kinerja. Meskipun kinerja keuangan pemerintah masih dalam kategori kurang efisien. Kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan kinerja. Namun capaian pada tahun 2015 masih di bawah angka rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam memperoleh PAD belum optimal yang menyebabkan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak efisien.

Tahun 2012 dan 2015 kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan angka di atas 100%, sehingga mengindikasikan

efektivitas kinerja. Tahun 2013 dan tahun 2014 pemerintah mengalami penurunan kinerja dan berada pada kisaran 98% (efektif). Peningkatan kinerja kembali terjadi di tahun 2015. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 8%. Secara lebih rinci, realisasi PAD hingga tahun 2015 masih ditopang oleh pajak daerah dengan porsi 85,64%.

4.1.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Grafik 4.21
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



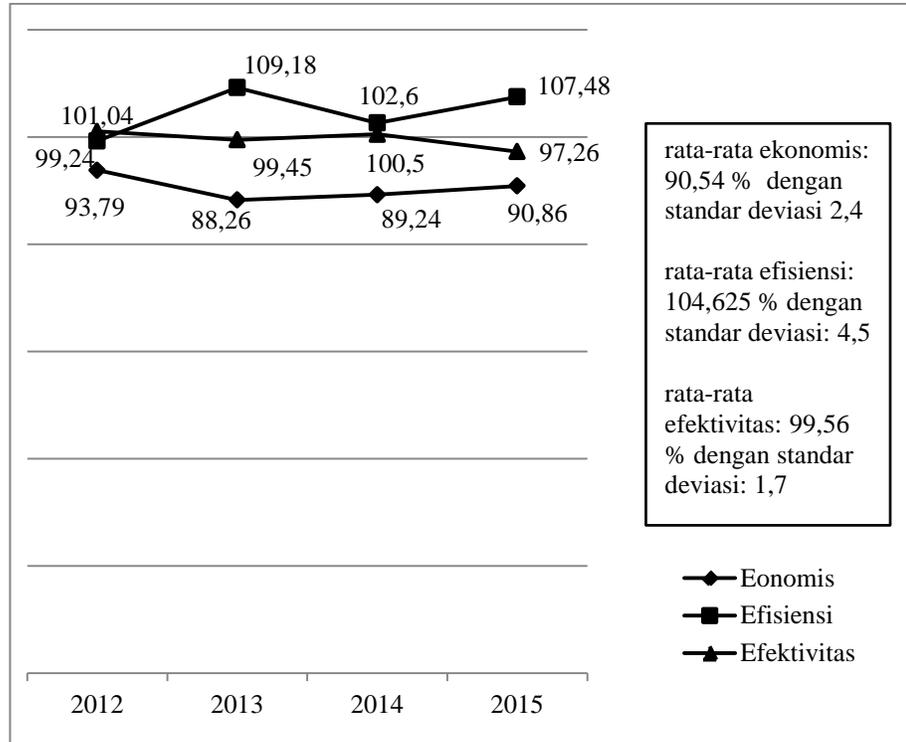
Kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2012 sampai 2015 selalu mengalami penurunan, meski belum melampaui angka 100%. Tahun 2012 penyerapan dana belanja sebesar 84,94% dari anggaran belanja, kemudian tahun anggaran 2013 realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja meningkat 3,6% menjadi 90,48%. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2014 sebesar 3,7% menjadi 93,75%. Realisasi penyerapan belanja tahun 2015 sebesar 95,35% dari dana belanja daerah yang dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah, diketahui realisasi total pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2015 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun belanja daerah dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan, namun tahun 2013 dan 2014, belanja daerah masih melebihi perolehan pendapatan daerah yang sehingga menyebabkan inefisiensi kinerja. Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012 sampai dengan 2015 sebesar 97,9% atau dapat dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2012 rasio efisiensinya sebesar 93,53%, kemudian tahun 2013 menjadi 104,26%, tahun 2014 sebesar 103,39%, dan tahun 2015 sebesar 90,5%.

Sama halnya dengan kinerja ekonomis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Riau selama 4 tahun anggaran juga selalu mengalami penurunan. Telah dijelaskan bahwa rata-rata selama empat tahun anggaran pendapatan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pendapatan yang ditargetkan, sehingga menyebabkan efektivitas kinerja selalu turun. Pada dua tahun anggaran pertama, kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat efektif. Tahun 2012 dan 2013 masing-masing efektivitas mencapai 111,22% dan 102,88%. Namun dua tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga kinerja termasuk dalam kategori efektif yaitu masing-masing sebesar 98,91% dan 91,75%. Tahun 2014 turun sebesar 3,97% dan tahun 2015 turun sebesar 7,16%.

4.1.22 Provinsi Kalimantan Selatan

Grafik 4.22
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Selama empat tahun anggaran kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kriteria ekonomis, meskipun dari 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan dan dua tahun berikutnya mengalami penurunan. Tahun 2012 selisih antara realisasi belanja dengan anggarannya adalah sebesar Rp 34.309.865.469,00. Sedangkan selisih realisasi belanja dengan

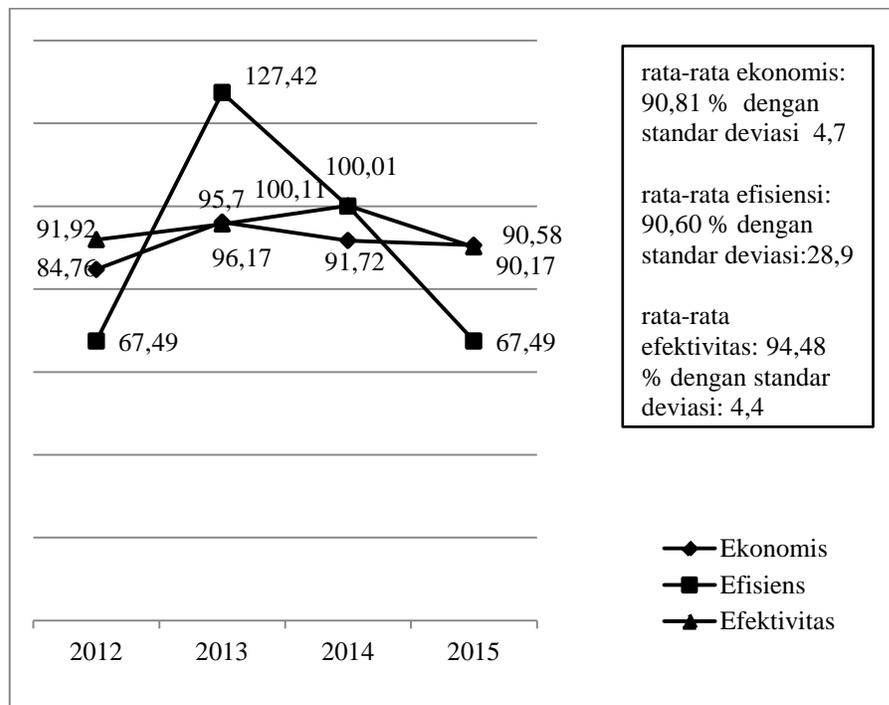
anggarannya pada tahun 2013 sebesar Rp 631.803.060.864,02. Sehingga dapat diketahui bahwa selisih realisasi dengan anggaran belanja tahun 2012 lebih sedikit dibandingkan tahun 2013 sehingga prosentase rasio ekonomis tahun 2012 juga lebih besar dari tahun 2013. Dengan demikian tahun kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 lebih ekonomis daripada kinerja tahun 2012.

Efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami fluktuasi, dan naik turunnya kinerja tersebut masih dalam kriteria inefisiensi dan cukup signifikan yang dibuktikan dengan standar deviasi 4,5. Dari pos realisasi pendapatan daerah komponen yang secara umum tidak terealisasi secara penuh adalah PAD. Untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sudah terealisasi penuh. Selain dari pada itu, adanya ketidakserasian antara belanja operasional dan belanja modal. Hal tersebut yang dapat menyebabkan perbandingan antara realisasi belanja untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan melebihi angka 100% (inefisiensi). Tahun 2013 efisiensi kinerja keuangan menurun dari 109,18% menjadi 99,24% atau sebesar 9,94%. Kemudian tahun 2014 kinerja mengalami peningkatan sebesar 6,58%, dan tahun 2015 efisiensi kinerja keuangan kembali mengalami penurunan dari 107,48% menjadi 102,6% atau 4,88%.

Selama empat tahun anggaran dan berdasarkan pada rata-rata rasio efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tergolong efektif (99,56%). Hal tersebut berarti bahwa secara umum program kerja pemerintah telah terealisasi walaupun tidak secara sepenuhnya. Fluktuasi efektivitas yang terjadi dapat diketahui dengan nilai standar deviasi yaitu 1,7, dan diketahui bahwa naik turunnya efektivitas kinerja stabil.

4.1.23 Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 4.23
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sudah ekonomis, dengan nilai rata-rata ekonomis 90,81%. Penurunan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2013, yaitu sebesar 11,41% disebabkan oleh adanya realisasi belanja langsung yang lebih rendah. Rendahnya belanja langsung tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal.

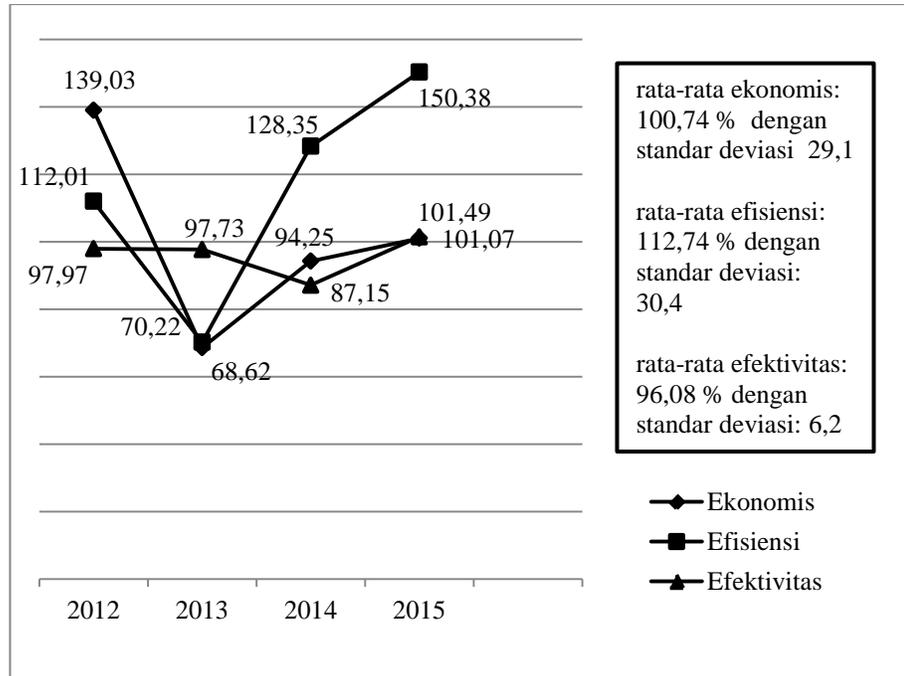
Efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara umum kurang efisien. Kinerja tahun 2012 menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu 67,49%. Tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar 59,93% yang sehingga menyebabkan inefisiensi kinerja. Demikian pula pada tahun 2014 yang masih inefisiensi kinerja. Namun pada tahun 2014 pemerintah telah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk lebih efisien. Efisiensi kinerja meningkat sebesar 27,41%. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur konsisten dalam meningkatkan efisiensi kinerjanya. Terlihat dalam grafik bahwa garis efisiensi turun secara tajam, hingga pada tahun 2015 kembali efisien seperti halnya pada tahun 2012.

Ditinjau dari elemen efektivitas, secara umum kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk dalam kategori efektif. Secara lebih rincinya, terjadi kenaikan efektivitas kinerja di

tahun 2012, tahun 2013, sampai tahun 2014 yang kinerja pemerintah Kalimantan Timur mampu merealisasikan program kerja melampaui target. Tingginya realisasi PAD ada tahun 2014 didukung oleh tingginya realisasi pajak dan retribusi daerah yaitu sebesar 111,30% dan 129,65%. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 105,3% dan 151,4%. Selain dari pada itu salah satu faktor yang menyebabkan efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat efektif adalah seluruh komponen pada PAD lainnya juga mendukung lebih tingginya realisasi PAD.

4.1.24 Provinsi Kalimantan Utara

Grafik 4.24
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



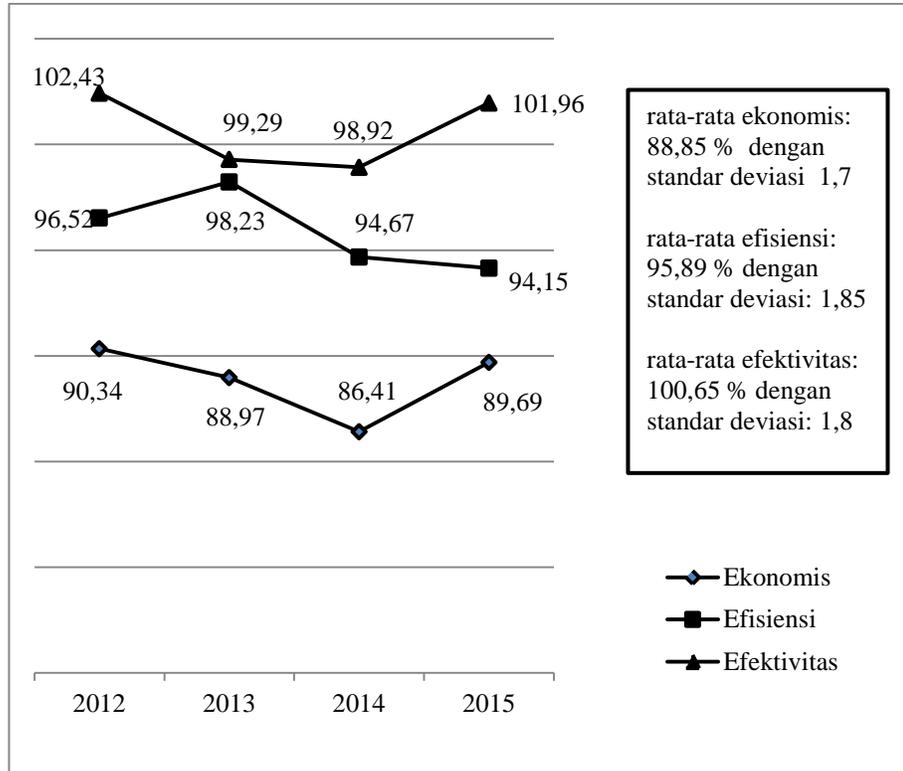
Dilihat berdasarkan nilai rata-rata rasio ekonomis yang mencapai 100,74% maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak ekonomis. Terjadi perbaikan kinerja atau penekanan jumlah relisasi belanja pada tahun 2013 terhadap tahun 2012 hingga mencapai 60,41%. Tahun 2014 dan 2015, kembali mengalami kemerosotan kinerja, hingga pada tahun 2015 kinerja keuangan tidak ekonomis. Realisasi pada tahun 2015 lebih besar Rp 28.857.522.470,21,00 atau sekitar 1,07%.

Tahun 2013 sampai tahun 2015 efisiensi kinerja mengalami penurunan hingga menyebabkan inefisiensi kinerja dan defisit. Dari tahun 2012 ke tahun 2013 merupakan peningkatan efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meningkat dari 112,01% menjadi 70,22% dan masuk dalam kriteria efisien. Namun, tahun berikutnya hingga tahun 2015, efisiensi kinerja mengalami penurunan yang sangat tajam. Tahun 2014 turun dari 70,32% menjadi 128,35% atau 58,03%. Sedangkan tahun 2015 turun dari 128,35% menjadi 150,38% atau 22,3% dan menyebabkan nilai standar deviasi sangat besar, yaitu mencapai 30,4.

Efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 mengalami perbaikan kinerja. Tahun 2012 rasio efektivitas mencapai 97,97%, tahun 2013 menurun sebesar 0,26%, dan kemudian tahun 2014 tahun juga turun sebesar 10,56. Turunnya realisasi pendapatan tersebut juga tidak terlepas dari baru dipekannya Kalimantan Utara yang pada awalnya merupakan satu bagian dengan Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum jumlah pendapatan daerah masih didominasi oleh dana dari pemerintah pusat dan untuk perolehan PAD belum dilakukan secara optimal.

4.1.25 Provinsi Sulawesi Utara

Grafik 4.25
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Peningkatan kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terjadi di tahun 2013 dan tahun 2014. Kemudian pada tahun mengalami penurunan. Namun rasio ekonomis di tahun 2015 masih lebih rendah daripada tahun 2012 yang mencapai kisaran 90%. Berdasarkan klasifikasi belanja operasional-modal, pagu anggaran APBD masih didominasi oleh belanja operasional yang hingga

mencapai 62,44% dari total anggaran belanja. Sementara belanja modal hanya sebesar 22,80%, diikuti dengan bagi hasil 14,59%. Masih relatif rendahnya komposisi belanja menunjukkan bahwa dukungan fiskal terhadap komponen belanja yang memberikan *multipier effect* lebih besar terhadap perekonomian, masih lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk biaya operasional.

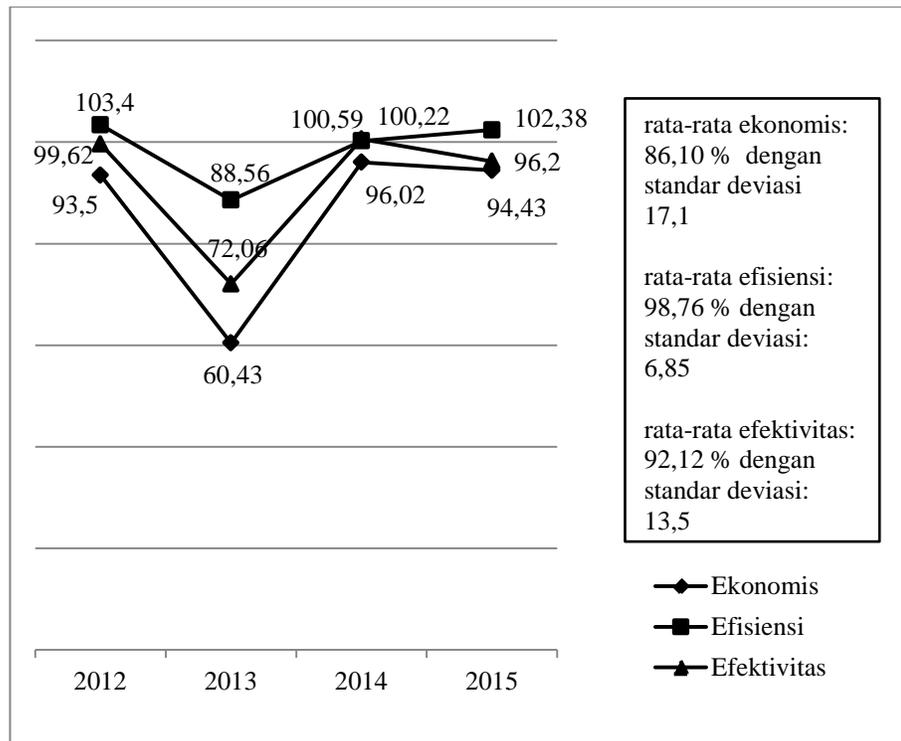
Lain halnya dengan pengukuran ekonomis kinerja keuangan. Berdasarkan perhitungan, efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan kinerja pada tiga terakhir . Untuk secara keseluruhan, kinerja pemerintah ini kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 95,89%. Telah disebutkan di atas, bahwa belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja operasional, yang pada dasarnya belanja modal dapat memberikan *multiplier effect* lebih besar bagi perekonomian. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan pendapatan daerah tidak optimal.

Kinerja pada tahun 2012 sangat efektif, kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan, namun tidak terlalu besar, masih berada pada kisaran 100%. Pada tahun 2014 efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara relatif stabil. Efektivitas kinerja mengalami peningkatan lagi pada tahun 2015 sebesar 3,04% dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Meskipun efektivitas kinerja baik,

namun pada kenyataannya, besarnya perolehan pendapatan daerah masih bergantung besar kepada pemerintah pusat tercatat pada tahun 2014 dana perimbangan terealisasi melampaui target, yaitu 101,2%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 97,20%.

4.1.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Grafik 4.26
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



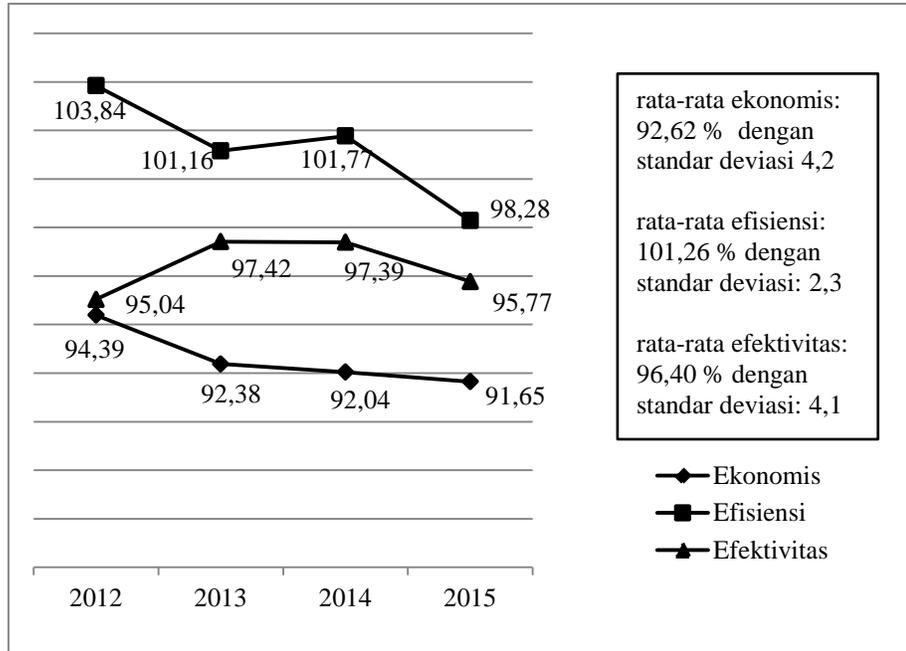
Perbaikan kinerja yang sangat signifikan dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013. Namun tahun 2014 penurunan kinerja pemerintah juga sangat signifikan. Kemudian untuk tahun 2015 ada upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja. Sama halnya dengan pengukuran dengan menggunakan elemen efisiensi. Naik turunnya rasio ekonomis terlihat cukup besar yang didasarkan dengan nilai standar deviasi 17,1. Untuk perhitungan efisiensi kinerja, pada tahun 2015 kinerja tetap mengalami penurunan. Penurunan tingkat realisasi pendapatan daerah dipengaruhi oleh 92,92% dari target yang diperkirakan. Sedangkan pada tahun 2014 PAD mencapai 99,84%. Tahun 2012 merupakan kinerja keuangan yang tidak efisien yaitu 103,4%. Kemudian tahun 2013 kinerja keuangan meningkat menjadi efisien dan mencapai 88,56%. Namun tahun 2014 dan 2015 kembali merosot dalam kriteria tidak efisien.

Tahun 2015, efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Realisasi komponen PAD didominasi oleh komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mencapai 144,2%. Sementara untuk realisasi penerimaan pajak daerah menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 97,25% menjadi 91,89%. Hal tersebut yang menyebabkan pencapaian program kerja tidak optimal. Kemerosotan efektivitas kinerja yang tinggi terjadi

pada tahun 2013 yang mencapai 60,43% atau turun sebesar 39,13%. Tahun 2014 kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat efektif. Namun tahun 2015 penurunan kinerja terjadi kembali, yaitu sebesar 4,37%. Salah satu faktor pendorong yang menyebabkan penurunan tingkat realisasi pajak daerah adalah kinerja negatif sektor konstruksi yang mengalami penurunan sehingga pajak yang dihasilkan dari proyek pembangunan tidak optimal. Selain itu, juga disebabkan oleh belum optimalnya proses pemungutan pajak.

4.1.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 4.27
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Pengukuran kinerja pada elemen ekonomis pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 secara umum menunjukkan kinerja yang ekonomis dan dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan kinerja. Rasio ekonomis yang paling besar terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2012 realisasinya mencapai Rp 3,93 triliun atau 94,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp 4,1 triliun.

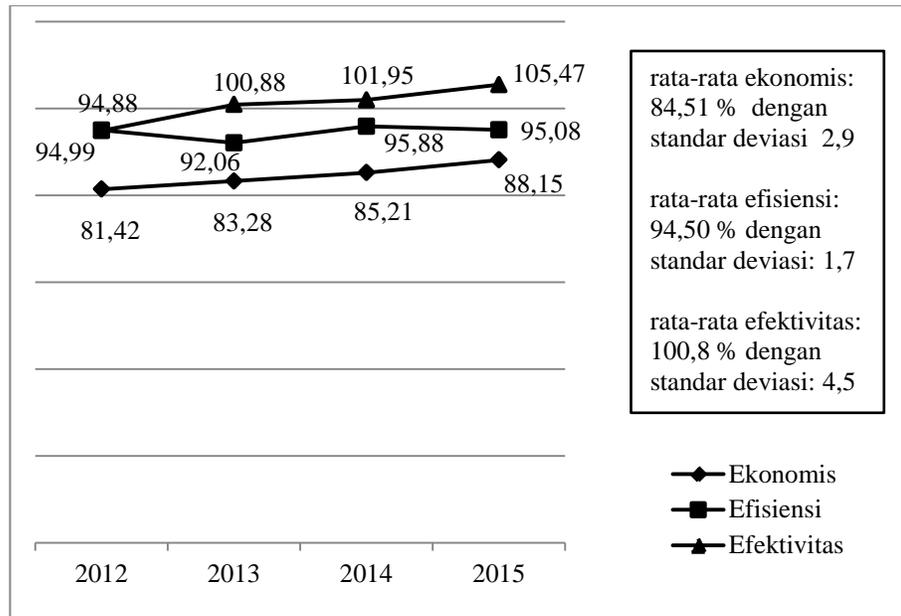
Tahun 2012 sampai 2014 kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah inefisiensi. Tahun 2013 sempat mengalami peningkatan kinerja, namun terjadi penurunan kembali di tahun 2014. Berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan pendapatan daerah tersebut maka pada tahun 2012 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 170 miliar. Namun defisit tersebut masih dapat ditutupi dengan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang masih terdapat anggaran sebesar Rp 212,34 miliar. Begitu pula pada tahun 2013 dan 2014 yang juga mengalami defisit anggaran masing-masing Rp 56.624.737.477,51 dan Rp 97.190.000.000,00. Adanya peningkatan efisiensi kinerja keuangan pada tahun 2015 yang meningkat sebesar 3,49%, dipengaruhi oleh porsi realisasi belanja modal yang menunjukkan peningkatan nilai dan prosentase terhadap total APBD serta belanja operasional yang mengalami penurunan.

Kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan hasil perhitungan rasio efektivitas, secara umum kinerja termasuk dalam kriteria efektif, yang berarti hampir semua program kerja pemerintah terealisasi. Rata-rata rasio efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 96,40%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan kinerja dan pada tahun 2014 efektivitas kinerja stabil. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan dari capaian tahun 2014

97,395 menjadi 95,77%. Secara keseluruhan pada realisasi PAD kontribusi terbesar pada realisasi pajak daerah.

4.1.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Grafik 4.28
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja ekonomis pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama empat tahun anggaran menunjukkan konsistensi dalam penurunan kinerja. Realisasi belanja yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya belanja operasional menyebabkan kinerja

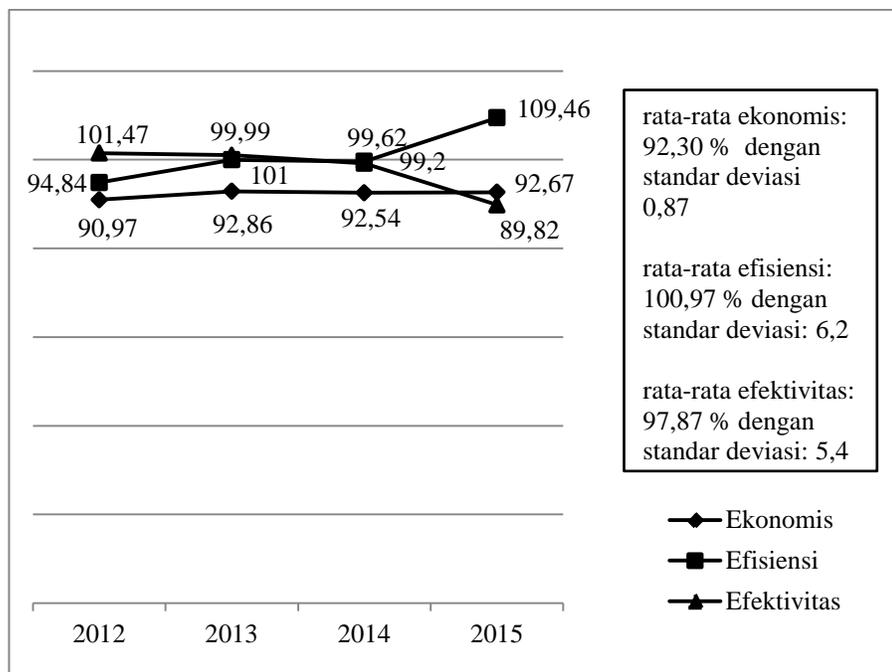
keuangan semakin tidak ekonomis. Nilai rasio ekonomis dari tahun 2012 hingga 2015 selalu meningkat. Namun penurunan kinerja tersebut masih di bawah 90%.

Perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum kurang efisien. Fluktuasi yang terjadi selama empat tahun tidak begitu besar, dengan nilai standar deviasi 1,7. Tahun 2012 rasio efisiensi kinerja senilai 94,99%, tahun 2013 sebesar 92,06%, tahun 2014 sebesar 95,88% dan tahun 2015 mencapai 95,08%.

Realisasi pendapatan daerah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2015 pendapatan daerah tertinggi disumbangkan oleh komponen pendapatan transfer dengan realisasi sebesar 98,38%. Namun pencapaian ini masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan kinerja, dan selama tiga terakhir menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pemerintah untuk kepada dana pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi komponen pendapatan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

4.1.29 Provinsi Gorontalo

Grafik 4.29
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Gorontalo (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Secara kompleks, kinerja keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dikatakan ekonomis dengan rata-rata di bawah angka 100% yaitu 92,30%. Berdasarkan pada grafik di atas, dari tahun 2012 sampai tahun 2015, kinerja ekonomis terlihat konsisten pada kisaran rasio 90%. Dan juga dikuatkan dengan nilai standar deviasi 0,87. Namun demikian, jika dilihat lebih jelas, tahun 2013 kinerja keuangan

pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan, tapi tidak signifikan.

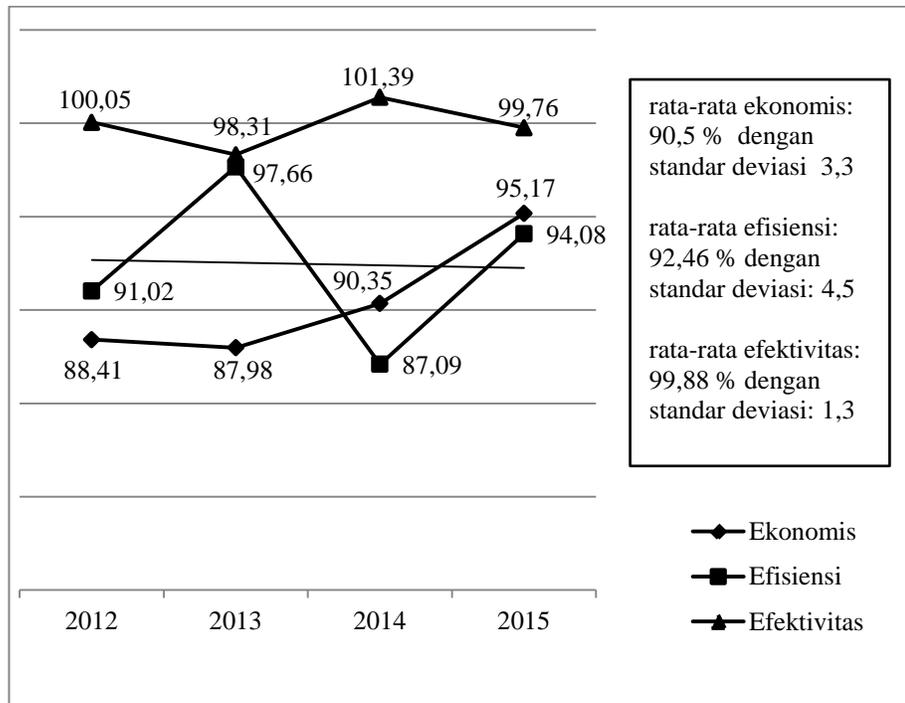
Efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo secara umum mengalami penurunan. Penurunan yang paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,8% yang menyebabkan kinerja masuk dalam kriteria inefisien. Bahkan pada tahun 2015 Provinsi Gorontalo dalam kondisi defisit yaitu mencapai Rp 121.650.000.000,00. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dalam kondisi surplus. Peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun juga dimaksudkan untuk mendorong pendapatan daerah. Misalnya dengan perbaikan infrastruktur, pemberian stimulus pertanian untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian dari pada itu, belanja daerah lebih didominasi oleh belanja operasional yang secara umum selalu meningkat. Di sisi lain, belanja modal masih cenderung stabil. Kinerja ini tentunya belum memuaskan arena belanja modal data mendorong daya saing Provinsi Gorontalo dan untuk menarik minat investor untuk dapat mengembangkan usahanya di Provinsi Gorontalo.

Penurunan efektivitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang konsisten selama lima tahun anggaran, terlihat pada grafik di atas. Padahal untuk mempercepat pembangunan daerah, dari

tahun 2015 sampai 2015 target pendapatan telah ditingkatkan, dan realisasi perolehan pendapatan juga meningkat. Namun rasio pencapaian pendapatan terhadap anggaran pendapatan APBD semakin menurun. Pada tahun 2015, target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 1,43 triliun dan sampai akhir triwulan IV tahun 2015 telah terealisasi Rp 1,28 triliun atau 89,82% dari target pendapatan pada APBD 2015.

4.1.30 Provinsi Sulawesi Barat

Grafik 4.30
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 sebesar 88,41%. Kemudian ke tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan kinerja yaitu dari 88,41% menjadi 87,98% (0,49%). Untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun anggaran 2015, kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selalu mengalami penurunan. Tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,37% dan 4,82%. Secara umum kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih dalam kategori ekonomis. Meskipun tahun 2015 kinerja keuangan paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun ini kualitas belanja lebih baik, karena ditopang oleh kenaikan belanja modal, terutama perbaikan jalan, irigasi dan jaringan yang mencapai 57,62% atau sebesar Rp 243,66 miliar dan belanja gedung Rp 97,13 miliar.

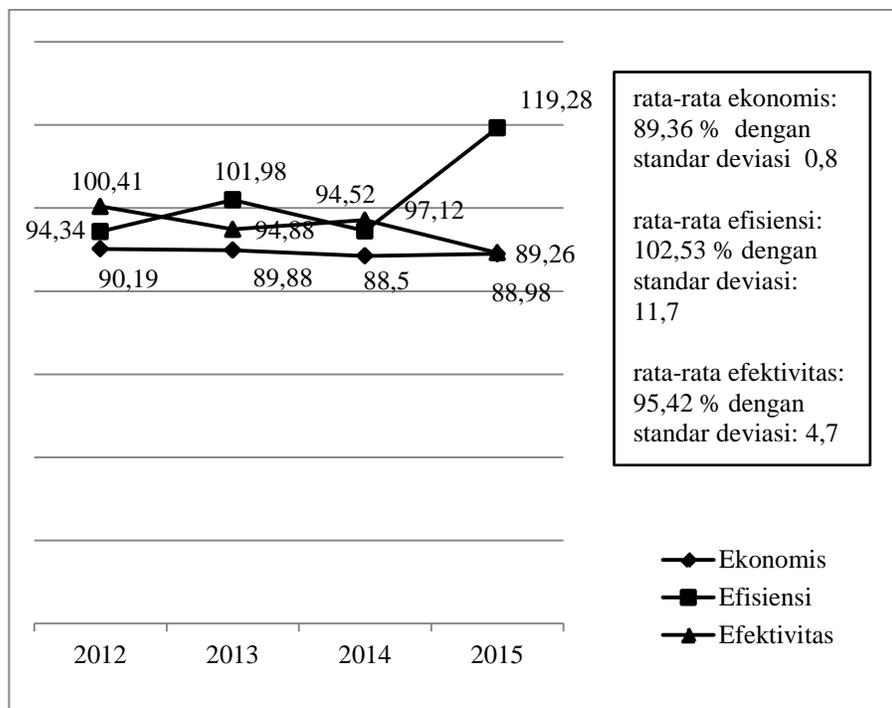
Ditilik dari segi kemampuan mendapatkan penghasilan, Sulawesi Barat mengalami naik turun yang cukup signifikan. Tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan kinerja sebesar 5,64% dengan realisasi belanja dan pendapatan tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 1.046.606.350.000,00 dan Rp 1.071.722.550.000,00 dan surplus sebesar Rp 25.116.200.000,00. Tahun 2013 ke tahun 2014 efisiensi kinerja mengalami peningkatan sebesar 9,57% dan juga masih dalam kondisi surplus anggaran sebesar Rp 112.819.610.000,00.

Kemudian tahun 2015, yang rasio efisiensi kinerjanya mencapai 94,08%, selisih antara realisasi pendapatan dan belanja sebesar Rp 71.627.730.000,00.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nominal APBD terus meningkat. Dari sisi pendapatan porsi dana perimbangan mengalami penurunan, yang dalam hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pemerintah pusat semakin menurun. Untuk secara keseluruhan, efektivitas kinerja keuangan masih tergolong efektif. Tahun 2013 dan tahun 2015 kinerja keuangan yang mengalami penyusutan. Pada akhir tahun 2013 realisasi penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 1.071,71 miliar atau terealisasi 98,31%, serta pencapaian tersebut melemah dibandingkan periode 2012, yang terealisasi 100,05%. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan perolehan PAD agar lebih efektif kinerjanya yaitu meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan, pemberdayaan BUMD, dan perluasan basis penerimaan pajak.

4.1.31 Provinsi Maluku

Grafik 4.31
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Maluku (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



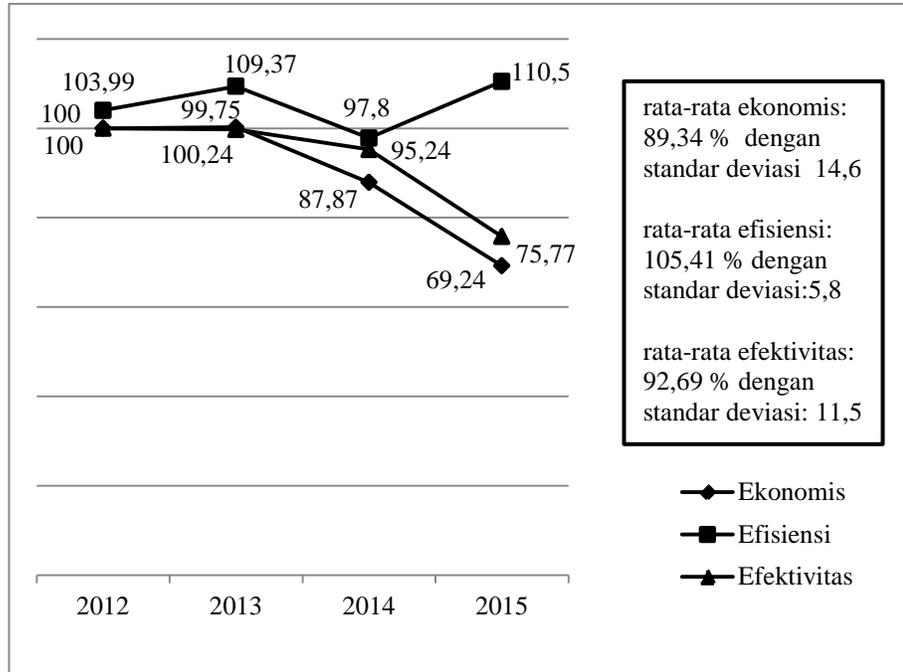
Kinerja pemerintah Provinsi Maluku dari tahun anggaran 2012 sampai tahun 2015 cukup stabil dalam kisaran 90% dengan standar deviasi 0,8% dan secara keseluruhan, selama empat tahun anggaran kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku lebih ekonomis dengan rata-rata 89,36%.

Fluktuasi yang terjadi pada efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Maluku cukup tinggi dengan ditunjukkan dengan angka standar deviasi, yaitu 11,7. Tahun 2012 dan tahun 2014 kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya kurang efisien. Sementara pada tahun 2013 dan tahun 2015 terjadi inefisien. Secara umum, kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku tergolong dalam inefisiensi, dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai 102,53%. Tahun 2012 rasio efisiensi sebesar 94,3%. Kemudian pada tahun 2013 menurun hingga inefisien 1,98%. Peningkatan efisiensi kinerja terjadi lagi di tahun 2014, dari 101,98% menjadi 94,52% (7,76%). Tahun 2015 kinerja keuangan tidak efisien, dengan capaian rasio efisiensi 119,28%.

Efektivitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku juga mengalami naik turun. Secara keseluruhan pos pendapatan daerah belum terealisasi secara optimal. Berdasarkan komponen penyusunnya, realisasi pendapatan daerah di tahun 2012 mencapai 10,41%, termasuk dalam kinerja yang sangat efektif. Kemudian di tahun 2013 turun menjadi 94,8%. Tahun 2014 meningkat sebesar 2,24% menjadi 97,12%. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali hingga mencapai 89,26% dan termasuk pada kinerja yang efektif.

4.1.32 Provinsi Maluku Utara

Grafik 4.32
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Maluku Utara (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Terlihat dari grafik bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan perbaikan, terkecuali pada tahun 2013 yang hanya menurun sangat kecil yaitu 0,24%. Namun secara keseluruhan, kinerja keuangan sudah menunjukkan ekonomis. Penyerapan belanja yang tidak melebihi dari anggaran APBD menunjukkan bahwa terdapat penghematan anggaran. Tahun 2014

meningkat dari 100,24% menjadi 87,87% atau 12,37% dan tahun 2015 meningkat dari 87,87% menjadi 69,24%.

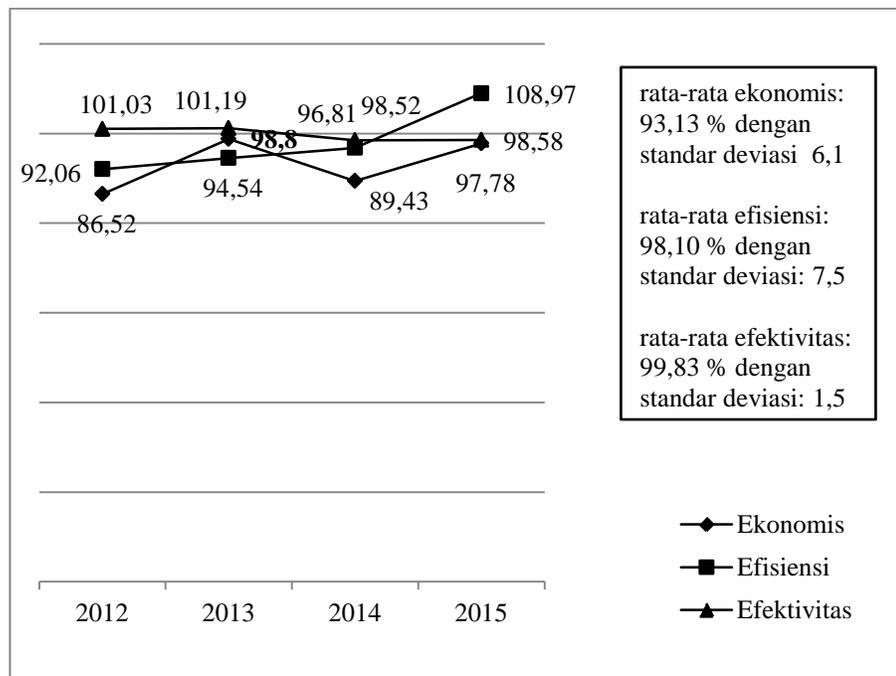
Tahun 2012 ke tahun 2013, efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara menurun 5,38%. Tahun 2014 merupakan tahun dengan efisiensi kinerja yang terbaik selama empat tahun anggaran, yaitu meningkat 2,57 dan masuk dalam kriteria kurang efisien. Namun penurunan kembali terjadi di tahun 2015 yang dalam tahun ini merupakan efisiensi kinerja yang paling rendah selama empat tahun anggaran, yaitu inefisiensi mencapai 110,50%. Ditilik secara keseluruhan, kinerja keuangan dari tahun 2012 sampai 2015 inefisien dengan rata-rata 105,41%.

Beralih pada penilaian kinerja keuangan dari segi efektivitas. Nilai rata-rata rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Maluku Utara mencapai 92,69% dan mengindikasikan bahwa kinerja selama empat tahun anggaran adalah efektif. Namun jika dilihat dari tahun per tahun, efektivitas kinerja keuangan selalu mengalami penurunan bahkan tahun 2015 kinerja keuangan dapat dikatakan kurang efektif, karena pendapatan yang terealisasi jauh dari target APBD. Tahun 2012 realisasi pendapatan sama dengan yang dianggarkan. Tahun 2013 turun sangat kecil, hanya 0,25%. Tahun 2014 kembali turun sebesar 4,51% dan tahun 2015 anjlok hingga

mencapai 75,77%. Anjloknya prosentase efektivitas tersebut, disebabkan oleh lesunya operasi dari perusahaan tambang nikel yang diikuti dengan berhentinya perusahaan-perusahaan pendukung sektor pertambangan seperti jasa sewa alat, jasa angkut, jasa pengiriman, restoran dan lain-lain. Perusahaan tersebut selama ini menjadi lumbung PAD bagi Maluku Utara melalui pajak maupun retribusi daerah (KEKR Maluku Utara, 2015).

4.1.33 Provinsi Papua

Grafik 4.33
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi Papua (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Program kerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama empat tahun anggaran, telah dapat dikatakan ekonomis dalam memanfaatkan anggarannya, meskipun pada tahun 2013 dan 2015 terjadi penurunan masing-masing sebesar 12,32% dan 8,35%. Hanya dari tahun 2013 ke tahun 2014 yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,37%.

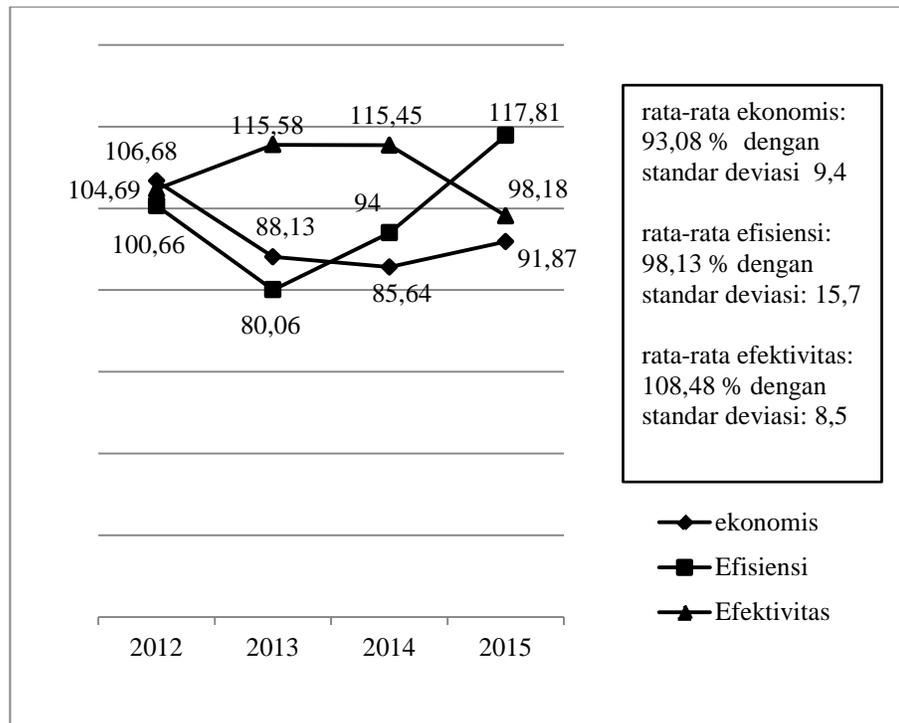
Melihat struktur anggaran belanja Provinsi Papua, jelaslah bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pembangunan masih terbatas. Penyerapan belanja pemerintah Provinsi Papua kurang memperhatikan pada pendapatan daerah. Seharusnya alokasi belanja daerah lebih dititik beratkan pada sektor yang lebih produktif untuk menghasilkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti peningkatan BUMD. Dari tahun anggaran 2012 sampai 2015 efisiensi kinerja pemerintah Provinsi Papua konsisten mengalami penurunan. Tahun 2013 terjadi penurunan kinerja sebesar 2,48%. Tahun 2014 sebesar 2,27 dan tahun 2015 penurunan efisiensi kinerja keuangan sebesar 12,16%.

Sementara dari sisi efektivitas, secara umum kinerja masih masuk dalam kriteria efektif. Tahun 2012 dan 2013 pemerintah dapat melampaui target dan mampu mempertahankan kinerjanya dalam posisi sangat efektif, yaitu mencapai 101,03% dan 101,19%. Akan

tetapi, pada dua tahun anggaran berikutnya pencapaian atau realisasi kinerja menjadi 98,52% atau turun 1,67% dan tahun 2015 sebesar 98,58%. Berdasarkan pada nilai rata-rata, kinerja pemerintah Provinsi Papua termasuk efektif, karena 99,83 % program kerja telah dicapai.

4.1.34 Provinsi Papua Barat

Grafik 4.34
Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Papua Barat (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015



Ditinjau dari rata-rata rasio ekonomis, secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah ekonomis. Pada tahun 2012 kinerja keuangan termasuk tidak ekonomis karena terdapat pemborosan sebesar 6,68%. Kemudian terdapat perbaikan kinerja tahun 2013 sebesar 18,55% dan tahun 2014 sebesar 2,49%. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2015 mengalami penurunan kinerja namun masih dalam kriteria ekonomis yaitu sebesar 6,23% dari 85,64% menjadi 91,887%.

Kinerja keuangan dari segi efisiensi, pada tahun 2012 kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat tidak efisien (100,66%) dan terjadi defisit anggaran Rp 25.543.494.560,00. Posisi keuangan pada tahun 2013 yaitu surplus Rp 1.124.000.000.000,00. Artinya, pada tahun 2013 terjadi peningkatan efisiensi kinerja dari 100,66% menjadi 80,06%. Kemudian dua tahun selanjutnya efisiensi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat selalu terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2015 inefisien sebesar 17,81%. Penurunan kinerja yang cukup tinggi di tahun 2014 dan 2015, menyebabkan nilai standar deviasi juga cukup tinggi, yaitu 15,7.

Efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat secara keseluruhan telah dapat dikatakan sangat efektif. Hanya tahun 2015 yang masih tergolong efektif, karena realisasi pendapatan di bawah

100%. Tahun 2012 sampai tahun 2014 efektivitas kinerja sangat efektif dan rata-rata rasio efektif 111,91%. Namun demikian, meskipun secara keseluruhan perolehan pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

5.2 Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Nama Provinsi	Rata-rata Rasio		
		Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
1	Aceh	93,10	100,98	99,20
2	Sumatera Utara	86,54	104,64	88,19
3	Sumatera Barat	93,31	97,61	101,26
4	Riau	73,88	96,55	101,78
5	Jambi	90,96	102,20	107,70
6	Sumatera Selatan	90,32	92,08	94,62
7	Bengkulu	92,44	99,61	101,00

8	Lampung	85,73	93,34	90,44
9	Kep. Bg. Belitung	86,22	98,96	99,54
10	Kepulauan Riau	90,94	95,22	99,35
11	DKI Jakarta	74,25	92,36	86,97
12	Jawa Barat	89,65	97,65	106,81
13	Jawa Tengah	93,45	99,70	101,30
14	DIY	80,34	90,70	95,10
15	Jawa Timur	95,48	97,84	104,15
16	Banten	85,70	88,80	100,17
17	Bali	87,61	97,73	106,41
18	NTB	91,90	97,20	94,60
19	NTT	93,75	98,30	91,53
20	Kalimantan Barat	94,40	97,40	101,30
21	Kalimantan Tengah	91,10	97,90	101,20
22	Kalimantan Selatan	90,54	104,625	99,56
23	Kalimantan Timur	90,81	90,60	94,48
24	Kalimantan Utara	100,74	112,74	96,08
25	Sulawesi Utara	88,85	95,89	100,65
26	Sulawesi Tengah	86,10	98,76	92,12

27	Sulawesi Selatan	92,62	101,26	96,40
28	Sulawesi Tenggara	84,51	94,50	100,80
29	Gorontalo	92,30	100,97	97,87
30	Sulawesi Barat	90,50	92,46	99,88
31	Maluku	89,36	102,53	95,42
32	Maluku Utara	89,34	105,41	92,69
33	Papua	93,13	98,10	99,83
34	Papua Barat	93,08	98,13	108,48
	Nilai Terendah	73,88	88,80	86,97
	Nilai Tertinggi	100,74	112,74	108,48
	Modus	-	-	101,30
	Median	90,68	97,87	99,55
	Standar Deviasi	5,41	4,84	5,28
	Rata-rata Nasional	89,50	98,02	98,44

4.2.1 Rasio Ekonomis

Hasil perhitungan pada rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah provinsi seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan telah dapat dikatakan ekonomis dengan

rata-rata nasional sebesar 89,50%. Jarak atau selisih rasio ekonomis setiap provinsi dengan rata-rata nasional sebesar 5,41. Nilai tersebut lebih tinggi dari dari rasio yang lainnya. Artinya, ketimpangan kinerja ekonomis lebih tinggi. Hasil perhitungan ini sejalan dengan teori Halim (2002) yang menyatakan biaya terendah yang mencakup pengelolaan secara berhati-hati serta cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara ekonomi, artinya semakin besar anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi biaya yang dikeluarkan maka rasio ekonominya semakin tinggi (Purnamasari, 2014).

Hanya terdapat satu provinsi yang kinerja keuangannya tidak ekonomis, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya rasio ekonomis Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan, yaitu kualitas belanja yang kurang baik (proporsi belanja pegawai sangat besar). Proporsi belanja pegawai relatif cukup besar, dengan prosentase pada kisaran 30%. Kemudian, penyaluran dana perimbangan yang tidak sesuai dan lambat dan penyerapan belanja modal yang sedikit dan lambat.

Sementara kinerja keuangan yang paling ekonomis diantara 34 provinsi adalah Provinsi Riau dengan rasio ekonomis 73,88%. Beberapa upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penghematan dana, misalnya dengan penghematan belanja operasi,

memotong dana perjalanan dinas para pegawai dan mengoptimalkan belanja modal yang secara umum memberikan *multiplier effect*, seperti belanja jalan, irigasi dan jaingan.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Berdasarkan pada hasil perhitungan pada rasio efisiensi kinerja keuangan yang paling efisien adalah Provinsi Banten dengan rasio efisiensi sebesar 88,80%. Potensi pemerintah dalam menghasilkan PAD sangat optimal, yaitu dibuktikan dengan realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan total yang selalu mendominasi dan selalu mengalami peningkatan Lebih dari 50% pendapatan daerah ditopang oleh PAD. Namun di tahun 2015, kinerja keuangan mengalami inefisiensi 9,63%, dan mencapai 109,63%. Inefisiensi tersebut disebabkan oleh adanya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang sebesar 67,8% menurun dari tahun 2014 sebesar 69,31%. Selanjutnya, perolehan pajak dan retribusi yang tidak melampaui target, antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 817.308.241.621,00 atau 9,03% dari target APBD, realisasi pajak pendapatan rokok yang terealisasi sebesar Rp 470.658.861.039,00 atau 79,77%. Kemudian, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp 527.085.000,00 atau 9,88%.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Provinsi Banten adalah memberikan insentif untuk merangsang agar kegiatan ekonomis masyarakat meningkat seperti, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan, serta peningkatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, belanja gedung, tanah yang dapat mendorong investasi.

Sama halnya dengan pengukuran ekonomis. Efisiensi kinerja yang paling rendah adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2014 sampai tahun 2015 efisiensi kinerja mengalami penurunan hingga menyebabkan inefisiensi kinerja dan defisit anggaran masing-masing sebesar Rp 419.012.425.933,52 dan Rp 1.484.820.917.516,46. Secara umum dari tahun 2012 sampai 2015 realisasi pendapatan selalu lebih kecil dari biaya yang digunakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efisiensinya kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian intern pemerintah yang kurang optimal. Dalam hal ini merupakan kaitannya dengan aparatur pemerintah. Terdapat *discomunication* antar lembaga dan kurangnya kerja sama.

- b. Masih terdapat ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Contohnya, pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pengeluaran untuk belanja modal yang masih kurang dari 30%.
- c. Sumber daya manusia yang kurang memiliki dedikasi dan tanggung jawab. Dalam hal ini juga termasuk aparatur perpajakan. Seharusnya dalam peungutan pajak menggunakan prosedur yang lebih sederhana, dan lebih bervariasi, dengan tujuan agar masyarakat akan lebih mudah dalam membayarnya.
- d. Kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Utara yang masih rendah. Tercatat pada tahun 2012, ketergantungan terhadap pemerintah pusat sebesar 89,02% dan pada tahun 2013 sebesar 86,42%.
- e. Pemberdayaan dan pengelolaan terhadap BUMD yang masih kurang. Secara umum, dalam keadaan BUMD yang sebenarnya peningkatan pendapatan lebih kecil dari peningkatan biaya untuk produksi. Memang, jika dipandang secara nominal masih mendapat keuntungan (*profit*). Namun hal tersebut yang menyebabkan besarnya keuntungan dari satu periode ke periode berikutnya mengalami penurunan.

Ditinjau secara nasional, diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi kinerja keuangan seluruh provinsi adalah kurang efisien dengan rasio efisiensi sebesar 98,02%. Hanya terdapat satu provinsi yang kinerja

keuangannya dikatakan cukup efisien, yaitu Provinsi Banten. Terdapat 9 provinsi atau 26,5% yang efisiensi kinerja keuangannya masuk dalam kriteria tidak efisien, dan 70,56% atau 24 provinsi, kinerja keuangannya kurang efisien. Berdasarkan standar deviasi yang senilai 4,84, terlihat bahwa ketimpangan efisiensi kinerja antar provinsi tidak terlalu tinggi. Kurangnya efisiensi kinerja dapat disebabkan oleh pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya ketidakserasian antara belanja operasional dengan belanja modal.

Perhitungan efisiensi kinerja tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk. (2014), yaitu kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng cukup efisien dengan rasio efisiensi sebesar 86,86%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan yang terus mengalami peningkatan sehingga melampaui realisasi belanja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teorinya Mahsun (2013), yang menyebutkan bahwa konsep efisiensi dalam pengelolaan suatu organisasi adalah penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya untuk mencapai hasil yang maksimal atau dikenal dengan istilah *spending well*.

4.2.3 Rasio Efektivitas

Menurut hasil perhitungan pada rasio efektivitas, secara nasional kinerja keuangan pemerintah provinsi termasuk dalam kriteria efektif,

karena rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 98,44%. Terdapat 14 provinsi atau 41,2% yang kinerja keuangannya termasuk dalam kriteria sangat efektif, 18 provinsi atau 52,9% masuk dalam kriteria efektif dan 2 provinsi atau 5,9% yang kinerja keuangannya cukup efektif. Ketimpangan efektivitas kinerja keuangan antar provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan efisiensi kinerja keuangan, yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi, yaitu sebesar 5,28.

Provinsi yang efektivitas kerjanya paling baik adalah Provinsi Papua Barat dengan rasio efektivitas mencapai 108,48%. Hanya tahun 2015 yang masih tergolong efektif, karena realisasi pendapatan di bawah 100%. Tahun 2012 sampai tahun 2014 efektivitas kinerja sangat efektif dan rata-rata rasio efektif 111,91%. Pemerintah daerah Papua Barat harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya, terutama dari sektor pariwisata. Inisiatif, kreatifitas dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Dari berkembangnya sektor pariwisata yang dimiliki Papua Barat akan menumbuhkan pula potensi-potensi PAD yang lain seperti, BUMD, restoran, penginapan, dan lahan investasi lainnya.

Pengukuran efektivitas kinerja keuangan yang paling rendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata rasio efektivitas 86,97%. Memang dalam anggaran dan realisasi secara nominal meningkat, namun prosentase realisasi terhadap APBD tidak demikian. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa program-program pemerintah tidak dapat direalisasikan secara penuh. Tingginya realisasi pendapatan secara nominal didukung oleh banyaknya lapangan pekerjaan di provinsi tersebut, dan juga merupakan pusat kegiatan industri, serta merupakan pusat pemerintahan.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kurang efektifnya kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya mutasi kendaraan bermotor yang keluar melebihi mutasi kendaraan bermotor yang masuk. Misalnya, pada tahun 2012 perbandingan jumlah kendaraan bermotor yang keluar dan masuk adalah sebanyak 233.185 dan 40.363. Sehingga pada tahun 2012 terjadi *potencial loss* sebesar Rp 108.605.450.630.
- b. Masih banyak kendaraan bermotor yang belum daftar ulang dan STNK yang belum terdaftar.
- c. Terjadinya perubahan lingkungan secara cepat, seperti banjir, pergantian pemimpin, dan semakin tingginya persaingan dalam segala bidang di lingkungan ASEAN. Pemerintah yang kurang tanggap dengan adanya perubahan lingkungan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa program akan terhambat pencapaiannya.
- d. Tidak sedikit aparatur pemerintah yang kurang tegas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil perhitungan ini, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Saputra Liando, dkk. (2014) tentang pengukuran kinerja pemerintah menggunakan metode *Value for Money* di Pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sangihe sebesar 93,89% pada tahun 2012 dan 92,78% pada tahun 2013, dan telah memenuhi standar efektivitas. Di samping itu, hasil perhitungan ini juga didukung oleh Rosyada (2016) yang mengutarakan bahwa rasio efektivitas kinerja keuangan yang semakin besar menggambarkan tingkat pencapaian suatu pelayanan publik yang berdasarkan pada sasaran awal.

4.3 Klasifikasi Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Setiap Pulau

Tabel 4.2
Perbandingan Rata-rata Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi
Berdasarkan Pulau (dalam persen)
Tahun Anggaran 2012-2015

No.	Pulau	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
1	Jawa	86,48	94,51	99,08
2	Sumatera	88,34	98,12	98,31
3	Nusa Tenggara	91,09	97,74	97,51
4	Sulawesi	89,15	97,31	97,95

5	Kalimantan	93,52	100,65	98,52
6	Kepulauan Maluku	89,35	103,97	94,06
7	Papua	93,105	98,12	104,16
	Modus	-	-	-
	Median	89,35	98,12	98,32
	Nilai Terendah	86,48	94,51	94,06
	Nilai Tertinggi	93,52	103,97	104,16
	Standar Deviasi	2,56	2,96	2,98

Secara keseluruhan, pengukuran kinerja keuangan perspektif *Value for Money* telah dapat dikatakan merata pada setiap pulau. Standar deviasi masing-masing elemen hampir sama dan berkisar pada angka 3. Kinerja keuangan yang paling ekonomis berada pada pulau Jawa.

Sama halnya dengan pengukuran ekonomis. Kinerja yang paling efisien juga berada pada pulau Jawa. Telah kita ketahui bahwa pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan banyak para urban di pulau Jawa. Tidak heran jika pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan dan banyak investor yang menanamkan modal di pulau Jawa, baik dalam bidang pariwisata, hiburan, teknologi dan informasi bahkan bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebutlah yang merupakan lumbung PAD bagi pemerintah daerah di pulau Jawa.

Sementara pada perhitungan rasio efektivitas, kinerja keuangan yang paling efektif adalah pulau Papua, yang terdiri dari pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Perolehan PAD di pulau Papua, pada umumnya merupakan kontribusi dari pajak dan retribusi daerah, juga dari sektor pariwisata. Namun pada dua provinsi tersebut, perolehan pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang mengindikasikan bahwa pemerintah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

Hasil perhitungan di atas selaras dengan teori *Good and Clean Governance*. Pinsip dari teori tersebut adalah kegiatan dalam suatu instansi pemerintahan yang dilakukan dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum, dan daya tangkap serta akuntabilitas (Rosyada, 2016).

Pengukuran ekonomis pada kinerja keuangan pemerintah juga merupakan bagian dari proses mewujudkan pemerintahan yang bersih, karena pengukuran ekonomis menggambarkan kehematan dalam mengelola biaya, yang nantinya akan dapat diketahui ada tidaknya kebocoran dana dan program yang dinilai tidak layak secara ekonomi. Pengukuran efisiensi kinerja juga salah satu bagian dari penerapan pemerintahan yang baik dan bersih, karena salah satu karakteristik dari *Good Governance* menurut UNDP adalah efisien dan efektif, yang artinya proses pelaksanaan program menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud, dan dengan menggunakan sumber-sumber daya sebaik mungkin.

Kemudian, pengukuran efektivitas kinerja juga menggambarkan dari perwujudan *Good Governance*, yang mana efektivitas kinerja mencerminkan sejauh mana program-program pemerintah untuk kepentingan publik tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio ekonomis kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Regulasi atau kebijakan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM. Dikeluarkannya berbagai peraturan mengenai pengeluaran pemerintah daerah, dimaksudkan agar aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu pemerataan dan keadilan, akuntabilitas, tidak adanya penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya, serta sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
 - b. Komunikasi kelembagaan. Terciptanya komunikasi yang benar antara pimpinan dengan bawahan (dalam hal ini SKPD) akan berimplikasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 - c. Struktur belanja daerah yang lebih banyak pada pos belanja operasional dibandingkan belanja modal. Tidak sedikit contoh pengeluaran

pemerintah daerah untuk membiayai program-program kerja yang dinilai tidak produktif, seperti intensitas perjalanan dinas yang terlalu sering, kunjungan kerja dan makan minum para aparatur pemerintah DIY di DPRD serta pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Olahraga.

- d. Semakin jauh jarak suatu daerah atau pulau dengan letak pemerintah pusat dan pusat perindustrian. Pada realitasnya, pembangunan infrastruktur (belanja modal) lebih ditekankan pada daerah atau pulau yang merupakan pusat pemerintahan serta pusat industri. Sehingga akan lebih banyak tenaga kerja yang lebih tertarik berdomisili di pulau tersebut dan para investor untuk menanamkan modalnya. Sementara, daerah atau pulau yang jauh dari pusat pemerintahan dan kondisi lingkungan yang masih didominasi alam, pemerintah daerah kurang optimal dalam pembiayaan belanja modal.
2. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi belanja modal. Belanja modal merupakan belanja daerah yang memiliki nilai produktivitas bagi perekonomian daerah dan juga memberikan *multiplier effect*. Belanja modal akan mendorong pembukaan dan perluasan usaha oleh investor di daerah tersebut dan mempermudah akses perekonomian daerah, seperti pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.

- b. Optimalisasi perusahaan daerah dan UMKM. Laba yang diperoleh dari BUMD secara langsung akan menjadi lumbung bagi PAD. Sementara UMKM akan menciptakan ekonomi kreatif dan inovasi yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. Prosedur pelayanan publik atau aturan main yang sederhana, terutama pada pelayanan pajak yang pada umumnya menjadi kontributor terbesar dalam PAD. Memungkinkan masyarakat akan taat untuk membayar pajak dan retribusi.
 - d. Daerah atau pulau yang terpisah jauh dari pusat pemerintahan dan perindustrian. Telah disebutkan bahwa infrastruktur lebih diprioritaskan di pulau yang merupakan pusat dari pemerintahan dan banyak kawasan perindustrian, seperti pulau Jawa. Dalam suatu pulau, kota yang menjadi pusat industri ataupun pusat perekonomian yang lainnya akan memberikan dampak bagi daerah yang berada di sekitarnya.
3. Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan PAD yaitu insentif untuk merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, seperti: penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak.
 - b. Sistem pengendalian intern pemerintah. Baik buruknya sistem pengendalian terhadap kinerja pemerintah atau kelembagaan juga

berpengaruh pada perolehan PAD. Hal ini erat kaitannya dengan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan.

- c. Jumlah BUMD di setiap provinsi atau secara umum pada setiap pulau.
- d. Kondisi lingkungan dan potensi yang dimiliki setiap daerah atau pulau. Misalnya, provinsi DIY yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Kemudian, pulau Papua dan Kepulauan Maluku yang juga memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang sangat melimpah, memungkinkan dilakukan ekspor.
- e. Besarnya prosentase dana perimbangan yang diterima dari pusat terhadap total pendapatan daerah.

5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh setiap provinsi sangat melimpah dan berdampak besar bagi masyarakatnya. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak dan retribusi yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan PAD juga akan meningkat. Selain dari pada itu, peningkatan dalam mengelola potensi daerah juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau

kemandirian fiskal akan meningkat, mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Dari pihak aparatur pemerintah daerah, harus memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, terutama dalam pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. termasuk pengeluaran dana dalam mendukung perolehan PAD.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 4 tahun. Kemudian dari hasil perhitungan yang telah ditemukan, sebaiknya lebih dikembangkan lagi, seperti analisis faktor yang mempengaruhi, melakukan perbandingan yang didasarkan pada pandangan islam beserta tolok ukur yang digunakan dalam islam, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Tri Astuti. (2011). “ Analisis *Value for Money* pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang. Tugas Akhir Ahli Madya. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/8064/1/10557.pdf>
- Aini, Wildan Nikmatul. (2016). “Implementasi Manajemen Strategi pada Usaha Koperasi Pondok Pesantren Darul Huda Trenggalek”. Skripsi Sarjana. Diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4708/1/COVER.pdf>
- Al-Maqassary, Ardi. (2013). “Langkah-langkah Meningkatkan Kinerja”. Diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2013/10/langkahlangkah-meningkatkan-kinerja.html>
- Ardila, Isna dan Ayu Anindya Putri. (2015). “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Valur for Money* pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 15 Nomor I. Diakses dari http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/428/pdf_60
- Arfan, Demi Aulia. (2014). “ Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Skripsi Sarjana. Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/15286/1/skripsi.pdf>
- Azlim, dkk. (2012). “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi SKPD di Kota Banda Aceh”. Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor I. Diakses dari <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmia/images/Jurnal/vol.1.ma/1.1.ma/1.1.14.azlim.pdf>
- Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR PrOVINSI Sumatera Barat Triwulan IV”. Diakses dari <http://www.sumbarprov.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Bengkulu” Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Lampung” Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Jawa Barat Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi Bali”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. “KEKR Provinsi NTT”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Badan Keuangan Daerah. (2015). “Transparansi Keuangan”. Diakses dari <http://www.bakuda.kalselprov.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). “KEKR Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2014”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). “KEKR Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV 2015”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2014). “KEKR Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2013”. Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2016). "KEKR Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2015". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Sulawesi Barat". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2012). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2013). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2014). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2012). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2013). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2014). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bank Indonesia. (2015). "Laporan Tahunan Keuangan dan Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara". Diakses dari <http://www.bi.go.id/>

Bappeda. (2015). " Analisis APBD". Diakses dari <http://bappeda.kaltaraprov.go.id/>

BPKA. (2017). "Laporan Realisasi Anggaran". Diakses dari <http://bpka.acehprov.go.id/>

BKAD. "Laporan Realisasi Anggaran". Diakses dari <http://bpkad.sumselprov.go.id/>

BPKAD. (2015). "Laporan Realisasi Anggaran". Diakses dari http://e-keuangan.riau.go.id/BPKAD_RIAU/

BPKAD. (2015). Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta". Diakses dari <http://www.bpkad.jakarta.go.id/>

BPKAD. (2015). Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah DIY". Diakses dari <http://dpkad.jogjaprov.go.id/>

BPKBMD. (2015). "LRA Prov. Sulut". Diakses dari <http://www.bpkbmd.sulutprov.go.id/>

- BPS. (2015). “ Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Diakses dari <http://www.irjabar.bps.go.id/>
- BPKP. (2017). “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1858/LAKIP-PEMERINTAH-DAERAH>
- BPS. (2014). “ Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat”. Diakses dari <http://www.irjabar.bps.go.id/>
- Departemen Agama RI. (2007). “Akuntabilitas dan *Good Governance*”. Jakarta: Sekjen Biro Organisasi dan Tata Laksana Depag RI.
- Dispenda. (2016). “Pendapatan Papuan Tahun 2011-2015”. Diakses dari <http://www.dispendapapua.com/>
- Ferina, Ika Sasti dan Fika Arista. (2013). “Penilaian Kinerja dengan Menerapkan Indikator *Value for Money* pada Kantor Pertahanan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2011”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Volume 11 Nomor 21. Diakses dari <https://www.google.com/search?q=ika+sasti+ferina%2C+penilaian+kinerja+dengan+menerapkan+indikator+value+for+money+pada+kantor+pertahanan+kecamatan+musi+banyuasin+tahun+2009-2-11&ie=utf-8&oe=utf-8>
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Isra, Saldi. (2010). “Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Daerah”. Diakses dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/254-menciptakan-pemerintah-yang-baik-dan-bersih-di-daerah.html>

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). “Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkatkan”. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat>
- Liando, Harry Saputra, dkk. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value for Money*”. Jurnal EMBA. Volume 2 Nomor 3.
- Mahsun, Mohammad. (2013). “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nugrahayu, Ributani Erika. (2015). “Penerapan Metode *Balanced Scorecard* Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Perusahaan”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 4 nomor 10. Diakses dari <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1099/1057>
- Pemprov Gorontalo. (2012). “TPKD”. Diakses dari <http://www.gorontaloprov.go.id/>
- Pemprov Sumut. (2017). “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://www.sumutprov.go.id/>
- Pemprov Gorontalo. (2015). “CALK Provinsi Gorontalo 2014”. Diakses dari <http://www.gorontaloprov.go.id/>
- Pemprov Kepulauan Riau.” LKPD yang Sudah Diaudit”. Diakses dari <http://www.kepriprov.go.id/>
- Pemprov Sulawesi Tengah. (2015). “ Laporan Realisasi Anggaran Sulawesi Tengah Tahun 2013 dan 2014”. Diakses dari <http://www.sultengprov.go.od/>
- Pemprov Jatim. (2016). “LKPD Provinsi Jawa Timur”. Diakses dari <http://transparansi.jatimprov.go.id/>
- Pemprov Kalbar. (2016). “LRA”. Diakses dari <http://www.kalbarprov.go.id/>
- Pemprov Kalteng (2016). “Realisasi APBD”. Diakses dari <http://www.kaltengprov.go.id/>

- Pemprov Jabar. (2017). “Ringkasan Laporan Realisasi APBD”. Diakses dari <http://www.jabarprov.go.id/>
- Pemprov Lampung. (2015). “Laporan Realisasi Anggaran”. Diakses dari <http://www.lampungprov.go.id/>
- Pemerintah provinsi Jambi. (2016). “Laporan Realisasi APBD”. <http://jambiprov.go.id/images/keuangan/6492LRAPBD.pdf>
- PPID Banten. (2015). “Laporan Keuangan”. Diakses dari <http://www.bantenprov.go.id/>
- PPID. “Laporan Realisasi Anggaran Pemprov Jawa Tengah”. Diakses dari <http://ppid.jatengprov.go.id/>
- PPID NTB. (2015). “Laporan Keuangan Provinsi NTB”. Diakses dari <http://ppid.ntbprov.go.id/>
- Punamasari, I Desak Made Ia, dkk. (2014). “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. *E-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Volume 2. Diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qg5I3WIYEXkJ:ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjm/article/download/2105/1838+&cd=1&hl=id&ct=clnk>
- Putra, Yosi Pratama. (2012). “*Value for Money*”. Diakses dari <http://yosipratamaputra.blogspot.co.id/2012/04/value-for-money.html>
- Rosyada, Ayu Amrina. (2016). “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *E-journal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 4 Volume 1. Diakses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp->

content/uploads/2016/01/JURNAL%20Ayu%20%2801-20-16-09-36-29%29.pdf

- Sari, Kusuma DA. dan WA. Winarno. (2012). "Implementasi *E-Governmen System* dalam Upaya Peningkatan *Clean and Good Governance* di Indonesia". JEAM Volume XI Nomor 1. Diakses dari <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/download/1192/955>
- Sugiyono. (2012). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif fan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). "Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sukesti, Fatmasari, dan Alfasanudin. "Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan *Good Governance*". Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161539&val=423&title=TRANSPARANSI%20APBD%20SEBAGAI%20SARANA%20AKUNTABILITAS%20PUBLIK%20DAN%20GOOD%20GOVERNANCE>
- Sunyoto, Danang. (2013). "Metodologi Penelitian Akuntansi". Bandung: PT Refika Aditama.
- Tuliat. (2017). "Jumlah Provinsi di Indonesia". diakses dari <http://www.tuliat.com/jumlah-provinsi-di-indonesia/>
- Yahya, Idhar. (2006). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah". Jurnal Sistem Teknik Industri. Volume 7 Nomor 4. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21134/sti-okt2006-7%20%285%29.pdf;jsessionid=06EB9A341019904965C56CC928114974?sequence=1>

Yarni, Meri dan Latifah Amir. (2014). “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum.

LAMPIRAN 1: DATA APBD SETIAP PROVINSI TAHUN 2012-2015

1. PROVINSI ACEH

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	22.828.126.702.750,80	22.935.543.518.387,00
	Total Belanja	24.128.719.266.139,50	22.072.979.280.603,50
	Surplus/ (Defisit)	(1.300.592.563.388,67)	862.564.237.783,54
2	2013		
	Total Pendapatan	16.391.617.221.056,20	16.025.540.653.721,80
	Total Belanja	16.975.458.059.050,70	15.383.926.598.766,00
	Surplus/ (Defisit)	(583.840.837.994,45)	641.614.054.955,79
3	2014		
	Total Pendapatan	11.539.505.689.891,00	11.606.324.715.015,34
	Total Belanja	12.939.644.749.248,00	12.045.847.341.692,77
	Surplus/ (Defisit)	(1.400.139.059.357,00)	(439.522.626.677,40)
4	2015		
	Total Pendapatan	11.941.681.508.075,00	11.694.163.498.592,00
	Total Belanja	12.749.671.570.835,00	12.149.291.570.815,70
	Surplus/ (Defisit)	(807.990.062.760,00)	(455.128.072.223,76)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Aceh, 2013 dan PPID Proov. Aceh, 2015

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	7.889.040.516.493,00	7.200.498.304.672,00
	Total Belanja	8.305.169.256.857,00	7.632.295.295.420,00
	Surplus/ (Defisit)	(416.128.740.364,00)	(431.796.990.748,00)
2	2013		
	Total Pendapatan	9.111.133.465.652,00	7.397.986.773.339,07
	Total Belanja	9.025.417.688.998,00	7.260.468.252.653,90
	Surplus/ (Defisit)	85.715.776.654,00	137.518.520.685,17
3	2014		
	Total Pendapatan	5.046.111.839.162,45	4.181.096.448.524,36
	Total Belanja	5.467.952.757.114,00	4.316.645.669.627,94
	Surplus/ (Defisit)	(421.840.917.951,55)	(135.549.221.103,58)
4	2015		
	Total Pendapatan	8.675.000.000.000,00	8.452.000.000.000,00
	Total Belanja	8.443.000.000.000,00	7.944.000.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	232.000.000.000,00	508.000.000.000,00

Sumber: www.sumutprov.go.id dan KEKR Provinsi Sumatera Utara, 2015

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.918.255.223.000,00	2.922.606.759.394,00
	Total Belanja	3.180.395.927.093,00	2.965.216.213.119,00
	Surplus/ (Defisit)	(262.144.704.093,00)	(42.609.453.725,00)
2	2013		
	Total Pendapatan	2.071.160.695.841,00	2.183.958.892.494,08
	Total Belanja	2.328.765.083.501,14	2.132.956.523.415,00
	Surplus/ (Defisit)	(257.603.877.660,14)	51.002.369.079,08
3	2014		
	Total Pendapatan	3.616.146.248.000,00	3.635.880.000.000,00
	Total Belanja	3.643.950.200.000,00	3.483.700.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(27.803.952.000,00)	152.180.000.000,00
4	2015		
	Total Pendapatan	4.037.186.260.000,00	4.058.100.000.000,00
	Total Belanja	4.042.424.049.700,00	4.002.400.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(5.237.789.700,00)	55.700.000.000,00

Sumber: KEKR Provinsi Sumatera Barat

4. PROVINSI RIAU

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	6.639.430.133.500,64	6.847.315.819.648,20
	Total Belanja	8.373.811.701.788,19	6.670.765.136.944,64
	Surplus/ (Defisit)	(1.734.381.568.287,55)	176.550.682.703,56
2	2013		
	Total Pendapatan	6.937.720.762.637,46	6.994.646.204.554,06
	Total Belanja	8.915.522.031.720,57	7.525.282.506.040,30
	Surplus/ (Defisit)	(1.977.801.269.083,11)	(530.636.301.486,24)
3	2014		
	Total Pendapatan	7.400.619.878.055,10	8.132.409.891.832,53
	Total Belanja	8.848.296.291.336,97	5.602.074.495.738,66
	Surplus/ (Defisit)	(1.447.676.413.281,87)	2.530.335.396.093,87
4	2015		
	Total Pendapatan	7.407.059.641.183,97	6.911.044.805.939,19
	Total Belanja	11.388.481.944.547,70	7.760.972.468.295,68
	Surplus/ (Defisit)	(3,981.422.303.363,74)	(849.927.662.457,49)

Sumber: BPKAD Riau, 2015

5. PROVINSI JAMBI

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.181.289.285.429,00	2.662.697.133.695,17
	Total Belanja	2.766.573.219.873,85	2.558.079.676.618,46
	Surplus/ (Defisit)	(585.283.934.444,85)	104.617.457.076,71
2	2013		
	Total Pendapatan	2.628.379.097.426,36	2.886.262.906.136,10
	Total Belanja	3.268.522.086.963,19	3.012.362.428.561,54
	Surplus/ (Defisit)	(640.142.989.536,83)	(126.099.522.425,44)
3	2014		
	Total Pendapatan	3.127.131.786.586,67	3.221.336.441.560,14
	Total Belanja	3.641.235.253.698,06	3.185.400.231.266,69
	Surplus/ (Defisit)	(514.103.467.111,39)	35.936.210.293,45
4	2015		
	Total Pendapatan	3.259.508.046.034,99	3.129.704.823.875,76
	Total Belanja	3.734.034.470.675,92	3.425.751.341.964,74
	Surplus/ (Defisit)	(474.526.424.640,93)	(296.046.518.088,98)

Sumber: www.jambiprov.go.id

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	5.028.742.103.378,00	5.223.940.074.318,61
	Total Belanja	5.386.053.394.359,91	5.060.923.743.214,26
	Surplus/ (Defisit)	(357.311.290.981,91)	163.016.331.104,35
2	2013		
	Total Pendapatan	6.000.782.738.000,00	5.468.139.691.033,10
	Total Belanja	6.221.526.149.006,89	5.678.703.610.531,20
	Surplus/ (Defisit)	(220.743.411.006,89)	(210.563.919.498,10)
3	2014		
	Total Pendapatan	6.482.962.573.064,65	6.252.136.312.520,51
	Total Belanja	6.048.607.430.664,52	5.781.570.143.910,34
	Surplus/ (Defisit)	434.355.142.400,13	470.566.168.610,17
4	2015		
	Total Pendapatan	6.883.873.903.633,09	5.990.424.062.611,95
	Total Belanja	5.609.583.728.080,00	4.497.889.160.889,22
	Surplus/ (Defisit)	1.274.290.275.553,09	1.492.534.891.722,73

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

7. PROVINSI BENGKULU

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.558.320.000.000,00	1.562.525.000.000,00
	Total Belanja	1.586.155.000.000,00	1.518.453.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(27.835.000.000,00)	44.072.000.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	1.681.002.000.000,00	1.695.228.000.000,00
	Total Belanja	1.922.414.000.000,00	1.727.482.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(241.412.000.000,00)	(32.254.000.000,00)
3	2014		
	Total Pendapatan	1.894.355.000.000,00	1.983.744.000.000,00
	Total Belanja	2.091.932.000.000,00	1.901.512.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(197.577.000.000,00)	82.232.000.000,00
4	2015		
	Total Pendapatan	2.227.400.000.000,00	2.186.620.000.000,00
	Total Belanja	2.426.780.000.000,00	2.263.270.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(199.380.000.000,00)	(76.650.000.000,00)

Sumber: KEKR Provinsi Bengkulu

8. PROVINSI LAMPUNG

Tabel 4.8
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	4.000.306.794.341,68	3.148.921.373.853,58
	Total Belanja	4.102.400.519.399,68	2.377.105.148.706,79
	Surplus/ (Defisit)	(102.093.725.058,00)	771.816.225.146,79
2	2013		
	Total Pendapatan	4.410.729.851.197,22	3.896.468.858.615,87
	Total Belanja	4.102.400.519.399,68	3.880.022.154.703,60
	Surplus/ (Defisit)	308.329.331.797,54	16.446.693.912,7
3	2014		
	Total Pendapatan	4.576.790.000.000,00	4.526.530.000.000,00
	Total Belanja	4.615.980.000.000,00	4.454.840.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(39.190.000.000,00)	71.690.000.000,00
4	2015		
	Total Pendapatan	4.996.088.720.595,00	4.787.308.489.026,39
	Total Belanja	5.091.450.250.642,43	4.781.202.048.883,15
	Surplus/ (Defisit)	(95.361.530.047,43)	6.106.440.143,24

Sumber: KEKR Provinsi Lampung dan www.lampungprov.go.id

9. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 4.9
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.387.545.298.963,62	1.385.309.533.992,64
	Total Belanja	1.619.791.080.525,16	1.352.129.996.247,36
	Surplus/ (Defisit)	(232.245.781.562,54)	33.179.537.745,28
2	2013		
	Total Pendapatan	1.554.610.000.000,00	1.529.600.000.000,00
	Total Belanja	1.837.130.000.000,00	1.615.340.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(282.520.000.000,00)	(85.740.000.000,00)
3	2014		
	Total Pendapatan	1.722.417.070.217,83	1.720.590.000.000,00
	Total Belanja	1.924.383.150.881,78	1.608.214.763.769,88
	Surplus/ (Defisit)	(201.966.080.663,95)	112.275.236.230,12
4	2015		
	Total Pendapatan	1.918.085.118.953,54	1.906.111.210.239,67
	Total Belanja	2.226.354.387.053,48	1.890.214.843.863,87
	Surplus/ (Defisit)	(308.269.268.099,94)	15.896.366.375,80

Sumber: KEKR Provinsi Kepulauan Babel

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tabel 4.10
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.184.107.506.989,00	2.473.411.609.338,89
	Total Belanja	2.471.998.515.700,00	2.249.826.104.857,33
	Surplus/ (Defisit)	(287.891.08.711,00)	223.585.194.481,56
2	2013		
	Total Pendapatan	6.230.703.000.000,00	6.066.372.000.000,00
	Total Belanja	6.988.594.000.000,00	6.281.371.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(757.892.000.000,00)	(214.999.000.000,00)
3	2014		
	Total Pendapatan	3.160.779.923.432,97	2.919.185.331.874,16
	Total Belanja	3.387.434.772.816,97	3.059.564.530.502,84
	Surplus/ (Defisit)	(480.654.849.384,00)	(393.273.542.253,32)
4	2015		
	Total Pendapatan	3.086.209.797.340,00	2.914.857.620.562,68
	Total Belanja	3.096.123.919.964,00	2.865.884.362.891,34
	Surplus/ (Defisit)	(9.914.122.624,00)	48.973.257.671,34

Sumber: www.kepriprov.go.id

11. PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	33.650.011.958.617,00	35.379.180.051.989,03
	Total Belanja	38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00
	Surplus/ (Defisit)	(4.716.668.115.224,00)	3.820.473.153.064,03
2	2013		
	Total Pendapatan	40.799.864.826.912,00	39.517.544.011.690,00
	Total Belanja	46.578.865.629.904,00	38.301.502.396.759,00
	Surplus/ (Defisit)	(5.779.000.802.992,00)	1.216.041.614.931,00
3	2014		
	Total Pendapatan	65.042.099.407.000,00	43.824.300.560.665,00
	Total Belanja	63.650.106.383.473,00	37.799.664.298.459,00
	Surplus/ (Defisit)	1.391.993.023.527,00	6.024.636.262.206,00
4	2015		
	Total Pendapatan	56.309.238.000.000,00	44.209.238.168.583,00
	Total Belanja	59.685.552.609.233,00	43.031.322.947.557,00
	Surplus/ (Defisit)	(3.376.314.609.233,00)	1.177.915.221.026,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta, 2012

12. PROVINSI JAWA BARAT

Tabel 4.12
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	15.280.679.125.313,00	16.878.128.994.991,00
	Total Belanja	18.241.334.184.062,00	16.992.477.598.326,00
	Surplus/ (Defisit)	(2.960.655.058.749,00)	(44.348.603.335,00)
2	2013		
	Total Pendapatan	17.380.163.669.990,20	19.237.611.310.213,00
	Total Belanja	20.054.069.975.958,20	18.396.745.323.179,00
	Surplus/ (Defisit)	(2.673.906.305.968,00)	40.865.987.034,00
3	2014		
	Total Pendapatan	21.283.060.000.000	22.442.000.000.000
	Total Belanja	24.225.750.000.000,00	20.918.430.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(2.942.690.000.000,00)	1.523.570.000.000,00
4	2015		
	Total Pendapatan	23.981.900.000.000,00	24.240.400.000.000,00
	Total Belanja	27.752.700.000.000,00	24.642.700.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(3.770.800.000.000,00)	(402.300.000.000,00)

Sumber: Ringkasan LRA Pemprov Jawa Barat dan KEKR Provinsi Jawa Barat

13. PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 4.13
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	11.423.264.720.000,00	11.694.479.699.467,00
	Total Belanja	11.928.572.886.000,00	11.446.844.105.134,00
	Surplus/ (Defisit)	(505.308.166.000,00)	247.634.594.333,00
2	2013		
	Total Pendapatan	12.665.103.924.000,00	13.343.358.327.576,00
	Total Belanja	13.684.684.479.000,00	12.724.776.308.434,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.019.580.555.000,00)	618.582.019.142,00
3	2014		
	Total Pendapatan	14.425.140.107.000,00	15.157.460.004.451,00
	Total Belanja	16.038.948.597.000,00	15.086.065.034.422,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.613.808.490.000,00)	71.394.970.039,00
4	2015		
	Total Pendapatan	18.222.726.402.000,00	16.828.153.996.157,00
	Total Belanja	19.631.559.656.000,00	17.820.760.495.342,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.408.833.254.000,00)	(992.606.499.185,00)

Sumber: PPID Provinsi Jawa Tengah

14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 4.14
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	7.986.408.000.000,00	6.238.695.000.000,00
	Total Belanja	8.634.625.000.000,00	4.809.547.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(648.217.000.000,00)	1.429.148.000.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	9.428.326.000.000,00	9.574.065.000.000,00
	Total Belanja	9.591.303.000.000,00	8.422.372.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(162.977.000.000,00)	1.151.693.000.000,00
3	2014		
	Total Pendapatan	3.155.760.939.182,27	3.139.871.880.417,16
	Total Belanja	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41
	Surplus/ (Defisit)	(310.984.523.087,50)	158.803.59.995,75
4	2015		
	Total Pendapatan	3.357.761.886.230,77	3.400.014.811.777,00
	Total Belanja	3.806.092.624.463,02	3.496.425.502.266,45
	Surplus/ (Defisit)	(448.330.738.232,25)	(96.410.690.489,45)

Sumber: KEKR Provinsi DIY dan DPPKA Provinsi DIY

15. PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 4.15
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	14.727.475.360.000,00	15.541.624.780.000,00
	Total Belanja	15.153.689.100.000,00	15.311.533.120.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(426.213.740.000,00)	230.091.660.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	16.399.184.060.000,00	17.390.109.460.000,00
	Total Belanja	17.611.859.870.000,00	16.789.007.220.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.212.675.810.000,00)	601.102.240.000,00
3	2014		
	Total Pendapatan	19.583.941.908.338,00	20.772.483.892.730,94
	Total Belanja	20.957.372.614.798,70	20.006.319.305.425,98
	Surplus/ (Defisit)	(1.373.430.706.460,70)	766.164.587.304,96
4	2015		
	Total Pendapatan	22.246.180.607.897,00	22.218.448.268.374,45
	Total Belanja	24.361.065.655.950,90	22.936.305.610.145,75
	Surplus/ (Defisit)	(2.114.885.048.053,00)	(717.857.341.771,30)

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Timur, www.jatimprov.go.id

16. PROVINSI BANTEN

Tabel 4.16
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	8.474.950.571.339,00	8.656.395.495.445,00
	Total Belanja	9.303.525.389.927,00	8.925.813.452.214,00
	Surplus/ (Defisit)	(828.574.818.588,00)	(269.417.946.769,00)
2	2013		
	Total Pendapatan	6.212.174.027.000,00	6.230.229.613.799,00
	Total Belanja	6.406.888.228.639,00	5.295.139.151.997,00
	Surplus/ (Defisit)	(134.714.201.639,00)	935.090.661.802,00
3	2014		
	Total Pendapatan	7.872.703.765.441,00	6.192.155.567.940,00
	Total Belanja	7.872.703.765.441,00	6.192.155.567.940,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.031.716.863.441,00)	8 76.277.344.714,00
4	2015		
	Total Pendapatan	7.642.073.284.037,00	7.328.220.769.427,00
	Total Belanja	9.278.067.492.192,00	8.084.140.158.994,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.635.994.208.155,00)	(755.919.389.567,00)

Sumber: PPID Provinsi Banten,

17. PROVINSI BALI

Tabel 4.17
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	3.398.628.000.000,00	3.633.704.000.000,00
	Total Belanja	4.102.658.000.000,00	3.562.730.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(704.312.000.000,00)	70.974.000.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	3.763.503.000.000,00	4.108.326.000.000,00
	Total Belanja	4.562.576.000.000,00	3.867.706.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(799.072.000.000,00)	240.620.000.000,00
3	2014		
	Total Pendapatan	4.231.297.026.615,49	4.577.678.390.572,03
	Total Belanja	5.051.006.963.462,39	4.491.645.550.255,46
	Surplus/ (Defisit)	(819.709.936.846,90)	86.032.840.316,57
4	2015		
	Total Pendapatan	4.900.892.440.866,50	4.967.966.966.800,82
	Total Belanja	5.560.963.656.157,19	4.999.030.923.541,54
	Surplus/ (Defisit)	(660.071.215.290,69)	(31.063.956.740,72)

Sumber: KEKR Provinsi Bali

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tabel 4.18
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.370.407.070.900,00	2.242.817.184.524,64
	Total Belanja	2.364.438.870.749,04	2.189.181.696.292,53
	Surplus/ (Defisit)	5.968.200.150,96	53.635.488.232,11
2	2013		
	Total Pendapatan	2.594.808.258.800,00	2.379.555.590.300,46
	Total Belanja	2.586.039.126.500,00	2.374.904.157.964,81
	Surplus/ (Defisit)	8.769.132.300,00	4.651.432.335,65
3	2014		
	Total Pendapatan	2.923.616.362.119,00	2.789.427.241.814,45
	Total Belanja	2.897.422.574.129,80	2.614.100.101.360,92
	Surplus/ (Defisit)	26.193.787.989,20	175.327.140.453,53
4	2015		
	Total Pendapatan	3.555.737.341.478,00	3.448.585.631.903,26
	Total Belanja	3.620.067.736.772,33	3.364.903.671.428,20
	Surplus/ (Defisit)	-64.330.395.294,33	83.681.960.475,06

Sumber: PPID Provinsi NTB

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tabel 4.19
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.256.453.000.000,00	2.169.596.000.000,00
	Total Belanja	2.353.815.000.000,00	2.089.451.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(97.362.000.000,00)	80.145.000.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	2.342.342.000.000,00	2.351.292.000.000,00
	Total Belanja	2.400.818.000.000,00	2.341.545.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(58.476.000.000,00)	9.747.000.000,00
3	2014		
	Total Pendapatan	2.748.366.000.000,00	2.820.475.000.000,00
	Total Belanja	2.926.611.000.000,00	2.729.650.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	-178.245.000.000,00	90.825.000.000,00
4	2015		
	Total Pendapatan	3.353.173.000.000,00	3.343.785.000.000,00
	Total Belanja	3.523.979.000.000,00	3.362.436.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	-170.805.000.000,00	-118.651.000.000,00

Sumber: KEKR Provinsi NTT

20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel 4.20
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.892.316.228.408,99	2.932.912.819.123,34
	Total Belanja	3.224.691.424.739,21	3.043.956.904.976,04
	Surplus/ (Defisit)	(332.375.196.330,22)	(111.044.085.852,70)
2	2013		
	Total Pendapatan	3.307.933.469.228,00	3.262.314.099.069,14
	Total Belanja	3.469.973.034.774,13	3.296.606.750.102,82
	Surplus/ (Defisit)	(162.039.565.546,13)	(34.292.651.033,68)
3	2014		
	Total Pendapatan	3.768.215.710.326,00	3.719.770.110.973,66
	Total Belanja	3.469.973.034.774,13	3.296.606.750.102,82
	Surplus/ (Defisit)	(162.039.565.546,13)	(34.292.651.033,68)
4	2015		
	Total Pendapatan	4.636.577.225.666,00	4.494.428.711.520,47
	Total Belanja	4.635.688.655.160,66	4.320.618.793.066,07
	Surplus/ (Defisit)	888.570.505,34	17.809.918.454,40

Sumber: www.kalbarprov.go.id

21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 4.21
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	2.260.466.375.417,00	2.514.031.289.315,78
	Total Belanja	2.627.371.838.284,14	2.351.347.319.759,83
	Surplus/ (Defisit)	(366.905.462.867,14)	162.683.969.555,95
2	2013		
	Total Pendapatan	2.730.453.500.000,00	2.809.096.138.861,17
	Total Belanja	3.236.743.389.435,44	2.928.725.621.225,59
	Surplus/ (Defisit)	(506.289.889.435,44)	(119.629.482.364,42)
3	2014		
	Total Pendapatan	3.164.139.120.000,00	3,129.694.746.217,76
	Total Belanja	3.451.343.953.374,02	3.235.800.198.763,29
	Surplus/ (Defisit)	(289.204.833.374,02)	(106.105.452.545,53)
4	2015		
	Total Pendapatan	3.545.258.447.305,51	3.252.747.574.089,82
	Total Belanja	3.087.639.745.546,00	2.943.921.541.005,60
	Surplus/ (Defisit)	(173.854.688.169,49)	(229.686.222.858,22)

Sumber: www.kaltengprov.go.id

22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tabel 4.22
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	3.305.280.000.000,00	4.382.515.000.000,00
	Total Belanja	3.481.900.000.000,00	4.005.204.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(176.620.000.000,00)	377.311.000.000,00
2	2013		
	Total Pendapatan	4.374.897.084.000,00	4.350.810.456.952,25
	Total Belanja	5.381.877.607.616,00	4.750.074.546.751,98
	Surplus/ (Defisit)	(1.006.980.523.616,00)	(399.264.089.799,73)
3	2014		
	Total Pendapatan	4.769.434.684.500,00	4.793.164.631.015,94
	Total Belanja	5.510.996.086.064,00	4.917.827.639.756,94
	Surplus/ (Defisit)	(741.501.401.564,00)	(124.663.008.741,00)
4	2015		
	Total Pendapatan	4.891.420.000.000,00	4.757.210.000.000,00
	Total Belanja	5.627.390.000.000,00	5.113.130.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(735.970.000.000,00)	(355.920.000.000,00)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan KEKR Provinsi Kalsel, 2015

23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tabel 4.23
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	10.296.924.310.000,00	9.464.926.705.876,01
	Total Belanja	7.536.703.161.000,00	6.388.107.684.363,00
	Surplus/ (Defisit)	3.760.221.149.000,00	3.086.819.021.512,99
2	2013		
	Total Pendapatan	11.940.096.000.000,00	11.427.196.000.000,00
	Total Belanja	15.139.000.000.000,00	14.559.828.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(3.198.904.000.000,00)	(3.132.632.000.000,00)
3	2014		
	Total Pendapatan	11.192.327.000.000,00	11.205.052.000.000,00
	Total Belanja	12.217.683.000.000,00	11.206.226.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(1.025.356.000.000,00)	(1.174.000.000,00)
4	2015		
	Total Pendapatan	10.497.631.463.408,00	9.464.926.705.876,01
	Total Belanja	7.052.533.847.969,75	6.388.107.684.363,00
	Surplus/ (Defisit)	-986.628.546.594,01	-740.415.588.335,99

Sumber: KEKER Provinsi Kalimantan Timur, 2015

24. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tabel 4.24
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	7.692.536.760.000,00	7.536.103.870.000,00
	Total Belanja	6.071.300.800.000,00	8.440.968.180.000,00
	Surplus/ (Defisit)	1.621.236.120.000,00	(904.864.310.000,00)
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.425.000.000.000,00	1.392.713.702.065,82
	Belanja Daerah	1.425.000.000.000,00	977.895.449.583,60
	Surplus/Defisit	0,00	414.818.252.482,22
3	2014		
	Pendapatan Daerah	1.736.545.356.576,00	1.513.352.878.113,48
	Belanja Daerah	2.050.026.758.025,31	1.942.365.304.047,00
	Surplus/Defisit	(313.481.401.449,31)	(419.012.425.933,52)
4	2015		
	Pendapatan Daerah	1.914.973.406.997,00	1.943.458.987.466,54
	Belanja Daerah	2.699.422.382.512,79	2.728.279.904.983,00
	Surplus/Defisit	(1.174.448.975.515,79)	(1.484.820.917.516,46)

Sumber: Laporan Pengawasan Keuangan oleh BPKP dan BAPPEDA Kaltara

25. PROVINSI SULAWESI UTARA

**Tabel 4.25
Laporan Realisasi Anggaran**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.791.334.741.250,00	1.834.908.287.642,00
	Total Belanja	1.960.448.831.535,00	1.771.118.335.760,00
	Surplus/ (Defisit)	(169.114.090.285,00)	3.789.951.882,00
2	2013		
	Pendapatan Daerah	2.063.748.741.750,00	2.062.083.087.023,00
	Belanja Daerah	2.276.652.783.917,00	2.025.590.874.885,00
	Surplus/Defisit	(212.904.042.167,00)	36.492.212.138,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	2.380.358.000.000,00	2.354.775.000.000,00
	Belanja Daerah	2.579.764.000.000,00	2.229.208.000.000,00
	Surplus/Defisit	199.406.000.000,00	125.567.000.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	1.339.429.086.105,00	1.365.705.443.665,00
	Belanja Daerah	1.433.702.565.121,00	1.285.864.832.396,00
	Surplus/Defisit	(104.273.79.016,00)	79.840.611.269,00

Sumber: BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara, 2012

26. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tabel 4.26
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.940.098.220.000,00	1.932.756.970.000,00
	Total Belanja	2.137.184.890.000,00	1.998.409.070.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(297.086.670.000,00)	(55.652.100.000,00)
2	2013		
	Pendapatan Daerah	2.139.535.666.831,00	1.541.798.951.181,09
	Belanja Daerah	2.259.847.978.009,00	1.365.699.162.871,98
	Surplus/Defisit	(120.312.311.178,00)	176.099.788.309,11
3	2014		
	Pendapatan Daerah	2.425.806.877.096,00	2.440.226.816.031,31
	Belanja Daerah	2.547.105.900.088,00	2.445.661.248.557,50
	Surplus/Defisit	(121.299.022.992,00)	(5.434.431.989,19)
4	2015		
	Pendapatan Daerah	2.998.525.310.000,00	2.884.564.200.000,00
	Belanja Daerah	3.127.525.080.000,00	2.953.280.680.000,00
	Surplus/Defisit	(128.999.770.000,00)	(68.916.480.000,00)

Sumber: KEKR Provinsi Sulawesi Tengah dan www.sultengprov.go.id

27. PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Tabel 4.27
Laporan Realisasi Anggaran**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	4.665.220.000.000,00	4.433.960.000.000,00
	Total Belanja	4.877.550.000.000,00	4.604.090.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(212.340.000.000,00)	(170.130.000.000,00)
2	2013		
	Pendapatan Daerah	4.996.499.327.036,00	4.867.592.611.712,80
	Belanja Daerah	5.330.072.086.081,27	4.924.217.349.190,31
	Surplus/Defisit	(333.572.759.045,27)	(56.624.737.477,51)
3	2014		
	Pendapatan Daerah	5.650.580.000.000,00	5.503.150.000.000,00
	Belanja Daerah	6.084.920.000.000,00	5.600.340.000.000,00
	Surplus/Defisit	(434.340.000.000,00)	(97.190.000.000,00)
4	2015		
	Pendapatan Daerah	6.445.780.000.000,00	6.173.350.000.000,00
	Belanja Daerah	6.619.510.000.000,00	6.066.860.000.000,00
	Surplus/Defisit	(173.730.000.000,00)	106.490.000.000,00

Sumber: KEKR Provinsi Sulawesi Selatan

28. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tabel 4.28
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.857.752.225.122,00	1.762.667.052.207,00
	Total Belanja	2.056.564.248.649,00	1.674.352.693.858,00
	Surplus/ (Defisit)	(198.812.023.527,00)	88.314.358.349,00
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.951.960.636.640,00	1.969.134.529.409,00
	Belanja Daerah	2.176.892.463.187,00	1.812.816.605.466,00
	Surplus/Defisit	(224.931.826.547,00)	156.317.923.942,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	2.136.550.000.000,00	2.178.200.000.000,00
	Belanja Daerah	2.450.850.000.000,00	2.088.450.000.000,00
	Surplus/Defisit	(314.300.000.000,00)	310.250.000.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	2.342.790.000.000,00	2.470.900.000.000,00
	Belanja Daerah	2.665.150.000.000,00	2.349.420.000.000,00
	Surplus/Defisit	(322.360.000.000,00)	121.480.000.000,00

Sumber: KEKR Provinsi Sulawesi Tenggara

29. PROVINSI GORONTALO

Tabel 4.29
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	919.648.971.498,20	933.169.935.457,83
	Total Belanja	972.907.486.719,12	885.021.160.786,00
	Surplus/ (Defisit)	(53,258,435,220.92)	48,148,774,671.83
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.040.798.096.373,00	1.051.263.106.441,00
	Belanja Daerah	1.131.915.649.690,00	1.051.160.402.286,00
	Surplus/Defisit	(91.126.53.317,00)	102.704.155,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	1.218.762.778.436,41	1.209.049.489.262,54
	Belanja Daerah	1.301.534.795.885,28	1.204.490.038.148,55
	Surplus/Defisit	(82,772,017,448.87)	4,559,451,113.99
4	2015		
	Pendapatan Daerah	1.431.820.000.000,00	1.286.110.000.000,00
	Belanja Daerah	1.518.820.000.000,00	1.407.740.000.000,00
	Surplus/Defisit	(87.000.000.000,00)	(121.650.000.000,00)

Sumber: Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo, 2012

KEKR Provinsi Gorontalo, 2013

CALK Pemprov Gorontalo, 2014

KEKR Provinsi Gorontalo, 2015

30. PROVINSI SULAWESI BARAT

Tabel 4.30
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	959.028.550.000,00	959.552.210.000,00
	Total Belanja	987.896.150.000,00	873.402.480.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(28.867.600.000,00)	86.149.730.000,00
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.090.150.110.000,00	1.071.722.550.000,00
	Belanja Daerah	1.189.530.980.000,00	1.046.606.350.000,00
	Surplus/Defisit	(99.380.870.000,00)	25.116.200.000,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	1.390.027.460.000,00	1.409.288.700.000,00
	Belanja Daerah	1.358.581.000.000,00	1.227.422.380.000,00
	Surplus/Defisit	(127.168.700.000,00)	112.819.610.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	1.484.433.250.000,00	1.480.884.830.000,00
	Belanja Daerah	1.463.936.460.000,00	1.393.230.460.000,00
	Surplus/Defisit	(96.691.840.000,00)	71.627.730.000,00

Sumber: KEKR Provinsi Sulawesi Barat

31. PROVINSI MALUKU

Tabel 4.31
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.430.694.000.000,00	1.436.609.000.000,00
	Total Belanja	1.502.812.000.000,00	1.355.362.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(72.118.000.000,00)	81.248.000.000,00
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.625.174.000.000,00	1.541.909.000.000,00
	Belanja Daerah	1.749.353.000.000,00	1.572.389.000.000,00
	Surplus/Defisit	(124.178.000.000,00)	(30.480.000.000,00)
3	2014		
	Pendapatan Daerah	1.880.828.000.000,00	1.826.567.000.000,00
	Belanja Daerah	1.950.790.000.000,00	1.726.449.000.000,00
	Surplus/Defisit	(69.962.000.000,00)	100.117.000.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	2.388.455.000.000,00	2.131.844.000.000,00
	Belanja Daerah	2.554.399.000.000,00	2.273.021.000.000,00
	Surplus/Defisit	(165.945.000.000,00)	(141.177.000.000,00)

Sumber: KEKR Provinsi Maluku

32. PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 4.32
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	1.125.033.000.000,00	1.125.033.000.000,00
	Total Belanja	1.170.033.000.000,00	1.170.033.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(45.000.000.000,00)	(45.000.000.000,00)
2	2013		
	Pendapatan Daerah	1.283.230.000.000,00	1.280.000.000.000,00
	Belanja Daerah	1.400.000.000.000,00	1.403.442.000.000,00
	Surplus/Defisit	(116.770.000.000,00)	(123.442.000.000,00)
3	2014		
	Pendapatan Daerah	7.408.353.023.006,00	7.055.504.882.626,00
	Belanja Daerah	7.852.822.759.667,00	6.900.589.907.041,00
	Surplus/Defisit	(344.479.736.661,00)	154.914.975.585,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	2.258.019.363.000,00	1.710.875.575.014,00
	Belanja Daerah	2.327.784.856.080,00	1.611.847.950.026,00
	Surplus/Defisit	-69.764.493.880,00	99.027.624.988,00

Sumber: KEKR Provinsi Maluku Utara

33. PROVINSI PAPUA

Tabel 4.133
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	7.386.153.782.850,00	7.462.044.973.525,00
	Total Belanja	7.940.000.000.000,00	6.870.000.000.000,00
	Surplus/ (Defisit)	(553.846.217.150)	592.044.973.525,00
2	2013		
	Pendapatan Daerah	8.298.239.247.000,00	8.397.158.332.245,00
	Belanja Daerah	8.034.740.000.000,00	7.938.550.000.000,00
	Surplus/Defisit	263.499.247.000,00	457.608.332.245,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	10.802.000.000.000,00	10.642.000.000.000,00
	Belanja Daerah	11.521.000.000.000,00	10.303.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	(719.000.000.000,00)	339.000.000.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	11.987.000.000.000,00	11.817.000.000.000,00
	Belanja Daerah	13.169.000.000.000,00	12.877.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	(1.182.000.000.000,00)	(1.060.000.000.000,00)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

34. PROVINSI PAPUA BARAT

Tabel 4.34
Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2012		
	Total Pendapatan	3.699.884.166.000,00	3.873.388.417.000,00
	Total Belanja	3.654.934.954.550,00	3.898.931.911.560,00
	Surplus/ (Defisit)	44.949.211.450,00	(25.543.494.560,00)
2	2013		
	Pendapatan Daerah	4.878.000.000.000,00	5.638.000.000.000,00
	Belanja Daerah	5.122.000.000.000,00	4.514.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	(244.000.000.000,00)	1.124.000.000.000,00
3	2014		
	Pendapatan Daerah	4.920.000.000.000,00	5.680.000.000.000,00
	Belanja Daerah	6.234.000.000.000,00	5.339.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	(1.314.000.000.000,00)	341.000.000.000,00
4	2015		
	Pendapatan Daerah	8.948.000.000.000,00	8.840.000.000.000,00
	Belanja Daerah	7.489.000.000.000,00	6.880.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	(286.000.000.000,00)	501.000.000.000,00

Sumber: Statistik Keuangan Pemda Papua Barat

CURICULUM VITAE

Nama : April Wulandari
TTL : Purworejo, 30 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Krajan 02/I, Ganggeng, Kec./Kab. Purworejo, Jawa Tengah
Alamat Domisili : PP. Al-Munawwir Komplek Nurussalam Putri
Jl. KH. Ali Maksum No. 381, Krapyak, Sewon, Bantul
Nama Orang Tua
Ayah : H. Soedjono (alm)
Ibu : Messinah
Pendidikan : 1. SD N I Ganggeng Purworejo, lulus tahun 2008
2. SMP N 4 Purworejo, lulus tahun 2012
3. SMA N 6 Purworejo, lulus tahun 2013
4. Masuk FE UII Yogyakarta pada tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun

April Wulandari (13313317)